



7 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.1 PENDAHULUAN

7.1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan laporan keuangan. Laporan keuangan SKPD tersebut kemudian dikonsolidasikan menjadi laporan keuangan pemerintah daerah.

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan utamanya digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah memperhatikan tingkat efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan otonomi daerah tersebut dengan memperhatikan hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, serta potensi daerah itu sendiri. Salah satu diantaranya yang memegang peranan penting adalah aspek keuangan daerah. Aspek keuangan daerah meliputi penggalan potensi, fungsi alokasi, kualitas pengelolaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban keuangan daerah.

Bentuk pertanggungjawaban keuangan adalah berupa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotabaru sebagai entitas pelaporan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan serta standar akuntansi yang berlaku.

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kotabaru tahun anggaran 2018 yang disusun berdasarkan SAP Berbasis AkruaI terdiri atas:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA), yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode laporan.
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- c. Neraca, yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu
- d. Laporan Operasional (LO), yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

- e. Laporan Arus Kas (LAK), yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, aktivitas investasi aset nonkeuangan, aktivitas pembiayaan dan aktivitas transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pada periode tertentu
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK), yang berisi penjelasan naratif atas informasi kuantitatif yang bersifat moneter yang disajikan pada LRA, Laporan Perubahan SAL, LO, LPE, Neraca dan LAK.

Adapun maksud dari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotabaru ini adalah:

- a. Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Perundangan Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Untuk menyajikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas; dan
- c. Untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Sedangkan tujuan penyusunan laporan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, yaitu dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.



7.1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kotabaru atas pelaksanaan APBD Tahun 2018 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- g. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

- j. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta penyampaianannya;
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

- u. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18);
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21);
- w. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 53 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru;
- x. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kotabaru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 54 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kotabaru; dan
- y. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 55 Tahun 2015 tentang tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah Langsung pada Pemerintah Kabupaten Kotabaru.
- z. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 32 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 32);
- â. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 72 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 72);



7.1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.1 Pendahuluan

7.1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan

7.1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan

7.1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

7.2 Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

7.2.1 Ekonomi makro

7.2.2 Kebijakan keuangan

7.2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD

7.3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

7.3.1 Ikhtisar realisasi

7.3.2 Pencapaian target kinerja keuangan

7.3.3 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

7.4 Kebijakan Akuntansi

7.4.1 Entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah

7.4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

7.4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

7.4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan

7.5 Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

7.5.1 Laporan Realisasi Anggaran

7.5.1.1 Pendapatan-LRA

7.5.1.2 Belanja

7.5.1.3 Pembiayaan

7.5.2 Laporan Perubahan SAL

7.5.2.1 Perubahan SAL

7.5.3 Neraca

7.5.3.1 Aset

7.5.3.2 Kewajiban

7.5.3.3 Ekuitas



7.5.4 Laporan Operasional

7.5.4.1 Pendapatan-LO

7.5.4.2 Beban

7.5.4.3 Kegiatan non Operasional

7.5.4.4 Pos Luar Biasa

7.5.5 Laporan Arus Kas

7.5.5.1 Arus Kas dari Operasi

7.5.5.2 Arus Kas dari Investasi Aset Non Keuangan

7.5.5.3 Arus Kas dari aktivitas Pembiayaan

7.5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

7.5.6 Laporan Perubahan Ekuitas

7.5.6.1 Perubahan Ekuitas

7.5.7 Kejadian Setelah Tanggal Neraca

7.6 Penutup



7.2 EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

7.2.1 EKONOMI MAKRO/EKONOMI REGIONAL

7.2.1.1. Perkembangan Ekonomi Makro

Otonomi daerah menciptakan kesempatan bagi masyarakat untuk secara mandiri untuk mengelola perekonomiannya secara profesional untuk kepentingan masyarakat didaerahnya sendiri.

Globalisasi dan keterbukaan menjanjikan peluang bagi akses kepada sumber-sumber input baik kapital, teknologi dan *skill* secara bebas dan murah, disamping itu akan membuka peluang pemasaran lebih luas bagi produk dan komoditas.

Indikator program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah
2. menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan
3. memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah dan
4. terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Proyeksi terhadap indikator makro pembangunan Kabupaten Kotabaru dan penetapan indikator kinerja daerah Kabupaten Kotabaru tahun 2016-2021 sebagaimana diuraikan oleh table berikut ini :

Tabel 1. Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Tahun 2016-2021

No	Indikator	SATUAN	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021
1	Peningkatan IPM		66,73	67,22	67,71	68,21	68,71	69,22
	Lama Sekolah	Tahun	750	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00
	Daya Beli (Konsumsi Riil /Kapita)	(Rp)	720.500	791.400	834600	872.000	914.210	959.000
	Usia Harapan Hidup	Tahun	66,85	66,95	67,00	67,20	67,50	67,80
	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	PDRB (Rp. Jt)	(Rp. Jt)	15.743.480	16.147.320	16.850.200	17.550.450	18.126.919	18.872.321
3	Jumlah Penduduk	Jiwa	328.941	347.234	364.420	382.725	397.140	412.370
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,50	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00
5	Pertumbuhan Penduduk	%	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
6	Income/Kapita (Rp)	(Rp)	47.145.620	47.850.440	48.378.560	49.110.245	49.948.390	50.868.390
7	Tingkat Pengangguran	%	3,36	3,28	3,21	3,15	3,08	2,50
8	Angka Kemiskinan	%	4,10	3,57	3,21	2,94	2,20	2,00
9	Inflasi	%	5,20	5,14	5,09	5,06	5,02	5,00
10	Investasi(Rp. Juta)	(Rp)	32.115.828	34.292.278	36.354.267	38.585.319	41.258.940	43.124.960

Sumber : Bappeda, RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2016- 2021



Dari tabel indikator makro pembangunan Tahun 2016-2021 yang dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kotabaru Tahun 2018 terjadi perubahan target pada setiap indikator tertentu baik kenaikan ataupun penurunan.

Dari seluruh indikator makro pembangunan, target Tahun 2017 ke 2018 untuk indikator lama sekolah menunjukkan kenaikan dan tingkat pengangguran, mengalami penurunan. Sedangkan untuk indikator lainnya mengalami kenaikan atau tetap.

7.2.1.2. Pertumbuhan dan Struktur Ekonomi Kabupaten Kotabaru

Dengan memperhatikan visi, misi, strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah, maka perlu disusun suatu skenario pembangunan jangka menengah daerah yang memuat skenario pembangunan wilayah sesuai tata ruang wilayah dan skenario pembangunan ekonomi makro daerah sesuai perubahan struktur ekonomi daerah.

a. Skenario Pembangunan Ekonomi.

Pengembangan ekonomi Kabupaten Kotabaru diarahkan pada pengembangan sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan industri pengolahan sebagai sektor utama yang mengandalkan kemampuan sumber daya manusia; penggunaan sumber daya yang dapat diperbaharui; pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang produksi, pengolahan, informasi dan transportasi; penguatan keterkaitan mata rantai industri hulu- hilir dalam satu kesatuan struktur ekonomi yang mapan; serta pemanfaatan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif yang menghasilkan produksi bersih dan berkelanjutan.

Berbagai hal yang diperlukan untuk perubahan struktur ekonomi antara lain adalah peningkatan iklim investasi daerah, kepastian hukum, peningkatan partisipasi dan berbagai deregulasi. Selain itu, perlu didukung dengan peningkatan prasarana dan sarana (infrastruktur) secara memadai terutama transportasi laut, darat dan udara; serta penyediaan energi listrik yang dapat memasok kebutuhan pengembangan perkotaan, perdesaan, dan pusat-pusat kegiatan ekonomi.

1) Pengembangan Sektor Utama

Pengembangan sektor utama penggerak perekonomian di Kabupaten Kotabaru diarahkan pada peningkatan produktivitas, nilai tambah dan daya saing sektor pertanian yang dikelola secara profesional berdasarkan manajemen agribisnis. Sektor-sektor utama yang akan dikembangkan antara lain adalah pertanian dalam arti luas yang mencakup tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan. Selain itu, pengembangan sektor utama juga diarahkan pada peningkatan dan penguatan industri pengolahan melalui pengembangan kawasan industri terpadu yang menghasilkan komoditas unggulan melalui peningkatan mutu sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur pendukung,



pengadaan prasarana dan sarana, penguatan jaringan pemasaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan telekomunikasi, dan penguatan pelaku usaha dalam bentuk kemitraan usaha

2) Pengembangan Kehutanan dan Pengelolaan Pertambangan

Pengembangan kehutanan diarahkan untuk mendukung pengembangan sektor utama dengan tetap memperhatikan kawasan fungsional hutan, mempertahankan daya dukung lingkungan, menjaga kualitas lingkungan secara global, serta menjamin pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan. Pengelolaan hutan juga dilakukan dengan memperkuat penegakan hukum secara konsisten bagi pelaku perusakan hutan dan pengguna hasil hutan secara ilegal, rehabilitasi dan konservasi hutan, percepatan pemulihan lahan dan daerah aliran sungai (DAS) yang kritis.

Pengelolaan pertambangan yang sudah ada mengarah pada peningkatan kualitas pengelolaan bahan tambang secara efisien dan efektif yang ramah lingkungan, pembatasan kawasan penambangan secara bertahap, pengolahan sisa tambang dan reklamasi area bekas penambangan agar memiliki nilai guna dalam jangka panjang.

3) Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia.

Peningkatan mutu sumber daya manusia untuk mendukung pengembangan sektor-sektor utama dan penguatan keunggulan komparatif diarahkan pada peningkatan semangat kewirausahaan (*entrepreneurship*), keterampilan, produktivitas, etos kerja dan budaya kerja melalui pendidikan baik secara formal, non formal maupun informal; pengembangan pendidikan unggulan dan kejuruan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja dan potensi wilayah; serta peningkatan kompetensi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang rekayasa genetika, produksi, informasi, dan telekomunikasi.

4) Pembangunan Infrastruktur dan Penyediaan Energi Listrik.

Pembangunan infrastruktur di bidang transportasi, pengairan dan irigasi, telekomunikasi mengarah pada perbaikan jalan dan jembatan, penyediaan layanan pengangkutan barang dan jasa baik melalui darat, laut dan penyeberangan secara lebih cepat, mudah, murah dan terpadu; penyediaan sumber air bersih dan sehat; penguatan jaringan layanan pemasaran untuk mendukung pengembangan sektor-sektor utama dan penguatan keunggulan komparatif Kabupaten Kotabaru.

Penyediaan energi listrik diarahkan pada pembangunan pusat pembangkit listrik, pengembangan sumber energi listrik alternatif terutama di daerah yang belum terjangkau oleh PT PLN, peningkatan efisiensi dalam manajemen sumber daya listrik, dan



perluasan dan perbaikan jaringan terpasang untuk mendorong pengembangan sektor-sektor utama, peningkatan produktivitas masyarakat, peningkatan dunia usaha, dan peningkatan iklim investasi di Kabupaten Kotabaru serta pengembangan berbagai kegiatan berbasis teknologi yang memerlukan pasokan listrik secara memadai.

5) Pengelolaan Keuangan dan Investasi Daerah.

Pengelolaan keuangan dan investasi daerah diarahkan pada pemberian dukungan pendanaan bagi pengembangan sektor-sektor utama, penguatan keunggulan komparatif, peningkatan sumber daya manusia, dan pembangunan infrastruktur dan penyediaan energi listrik melalui pengelolaan anggaran daerah secara cermat, efisien dan efektif. Disamping itu, penataan manajemen badan usaha milik daerah (BUMD) dan penataan manajemen Perangkat Daerah yang menarik Pajak dan Retribusi Daerah perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kotabaru.

Pemerintah daerah Kabupaten Kotabaru juga perlu melakukan peningkatan kerjasama dengan pihak swasta dan berupaya untuk menarik minat pihak swasta untuk berinvestasi di Kabupaten Kotabaru. Selain itu, pengelolaan keuangan dan investasi daerah tetap diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan kemajuan dan kemandirian daerah.

6) Penjaminan Kepastian Hukum.

Penjaminan kepastian hukum diarahkan untuk mendorong pengelolaan keuangan dan investasi daerah ini melalui pemberian jaminan kepastian hukum dalam perijinan, perlindungan dan pengelolaan usaha secara berkelanjutan; pelaksanaan tata pemerintahan yang baik dan bersih; dan penegakan hukum secara adil dan konsisten. Dengan melakukan berbagai upaya yang telah diuraikan diatas, diharapkan pembangunan ekonomi di Kabupaten Kotabaru semakin baik.

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang meliputi bidang terkait khususnya pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, yang ditunjukkan oleh peningkatan nilai indeks pembangunan manusia. Hal ini juga akan sangat ditunjang oleh peningkatan penelitian dan penguasaan Iptek, peningkatan peran wanita dalam pembangunan, peningkatan kegiatan pemuda dan olahraga serta didukung oleh kebersamaan antar pemeluk agama dan semakin diperhatikannya kesejahteraan sosial masyarakat.

Pertumbuhan perekonomian ini ditunjang oleh partisipasi masyarakat dalam skala luas, yang ditandai oleh semakin besarnya koperasi dan UKM. Pada sisi lain semangat otonomi semakin mendorong perkembangan dan daya saing daerah, serta munculnya



spesialisasi daerah. Dengan demikian interaksi ekonomi antar sektor antar wilayah akan semakin meningkat.

Untuk mempercepat pengembangan ekonomi dan wilayah, maka pengembangan kawasan strategis mulai dilakukan. Peningkatan perekonomian pada berbagai bidang juga nampak pada pertanian tanaman pangan dan hortikultura dimana kemandirian wilayah dapat tercapai melalui kemampuan dalam menyediakan kebutuhan pangan. Selanjutnya sentra produksi unggulan dan pusat pelayanan seperti pembentukan system inovasi daerah (SIDa) semakin berkembang. Pola ini juga didukung oleh berkembangnya kelembagaan dan inovasi produk unggulan sehingga semakin meningkatkan daya saing daerah. Indikator perkembangan ini juga ditunjukkan oleh semakin berkembangnya infrastruktur, penggunaan peralatan yang semakin modern, dan mengikuti informasi pasar.

Perkebunan di Kabupaten Kotabaru semakin menunjukkan peran penting dalam perekonomian. Sentra perkebunan akan dikembangkan, dimana hal ini ditandai juga oleh semakin banyaknya sentra perkebunan dan permukiman masyarakat dengan kegiatan utama perkebunan. Selanjutnya mulai dilakukan pengolahan hasil perkebunan sehingga menciptakan produk hulu – hilir secara simultan yang diikuti juga dengan perbaikan pemasaran dan jaringan pasar nasional dan internasional. Dalam hal ini peran berbagai stakeholders juga mulai berkembang.

Pemanfaatan sumberdaya hutan semakin dapat diarahkan pada pembentukan hutan lestari dengan pemanfaatan yang seimbang dengan pengolahan yang semakin intensif. Hal ini ditandai oleh meningkatnya pengolahan hasil hutan, berkurangnya pengambilan bahan mentah, dan perdagangan hasil hutan sebagai hasil primer semakin berkurang. Hal ini juga ditunjukkan oleh meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga dan mengolah hutan lestari. Partisipasi masyarakat dalam menjaga hutan lestari makin meningkat dan penegakan hukum makin ditingkatkan. Semakin intensif dan ekstensifnya pemanfaatan lahan pertanian juga sekaligus membuka peluang pengembangan peternakan, disamping ternak yang dikembangkan secara intensif.

Perkembangan perekonomian Kabupaten Kotabaru juga ditopang oleh perkembangan perikanan yang semakin meningkat perannya. Pengembangan ini ditopang oleh SDM yang semakin handal, infrastruktur perikanan yang lebih mapan seperti pengolahan hasil ikan menjadi industri perikanan sebagai salah satu komoditas yang dapat diandalkan.

Perkembangan ekonomi yang membaik, iklim usaha yang makin kondusif menjadikan minat investasi dari dalam negeri dan luar negeri semakin meningkat. Diperkirakan laju investasi di



Kabupaten Kotabaru semakin meningkat. Hal ini ditunjang oleh semakin meningkatnya jaminan kepastian usaha dan kepastian hukum, meningkatnya kemudahan berusaha dan investasi yang ditunjukkan oleh semakin meningkatnya nilai investasi daerah. Perkembangan perekonomian akan lebih berkembang dengan ditunjang oleh perindustrian, perdagangan dan koperasi.

Industri berbasis sistem inovasi daerah dan produk unggulan daerah makin berkembang, kawasan industri mulai dipasarkan dengan dukungan infrastruktur dan deregulasi yang memadai, serta promosi pengembangan kawasan industri terus ditingkatkan. Jika hal ini telah tercapai maka neraca perdagangan kabupaten Kotabaru akan semakin positif, sentra produk pemasaran telah terbentuk. Peran pemerintah juga menunjukkan adanya peningkatan melalui semakin membaiknya peran BUMD dalam pembangunan, yang juga ditandai oleh peningkatan peran publik dalam pengelolaan BUMD. Demikian juga dengan koperasi, usaha kecil dan menengah semakin berperan dalam perekonomian lokal sampai internasional yang ditandai oleh meningkatnya jumlah UKM dalam kegiatan perekonomian. Semakin terpeliharanya kualitas alam dan terjaganya budaya menjadikan pariwisata akan semakin menarik. Perkembangan ini ditandai oleh semakin meningkatnya wisatawan nusantara dan mancanegara, semakin tingginya tingkat hunian, dan semakin baiknya pengelolaan kepariwisataan di Kabupaten Kotabaru. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kotabaru juga sudah mulai memantapkan kalender wisata untuk menyambut wisatawan pada berbagai event serta semakin tertata dan menarik obyek wisata unggulan daerah.

b. Skenario Pembangunan Wilayah

Skenario pembangunan wilayah diperlukan untuk memberikan acuan bagi penataan ruang; pemerataan pembangunan antar wilayah; pemerataan pertumbuhan ekonomi diseluruh wilayah Kabupaten Kotabaru; pengembangan kawasan ekonomi dan kawasan strategis; serta percepatan kemajuan daerah perdesaan, daerah pedalaman tertinggal dan daerah perbatasan serta pulau-pulau kecil.

Penetapan fungsi dan peran setiap kabupaten/kota ditentukan oleh beberapa kriteria, yaitu:

- 1) jangkauan transportasi utama termasuk transportasi darat, sungai dan penyeberangan yang dapat mendukung mobilitas sumberdaya dan komoditas;
- 2) potensi utama dan potensi penunjang daerah termasuk sumber daya alam dan prasarana;
- 3) kesesuaian tatanan lingkungan termasuk daerah aliran sungai, hulu-hilir, dan satuan wilayah sungai;

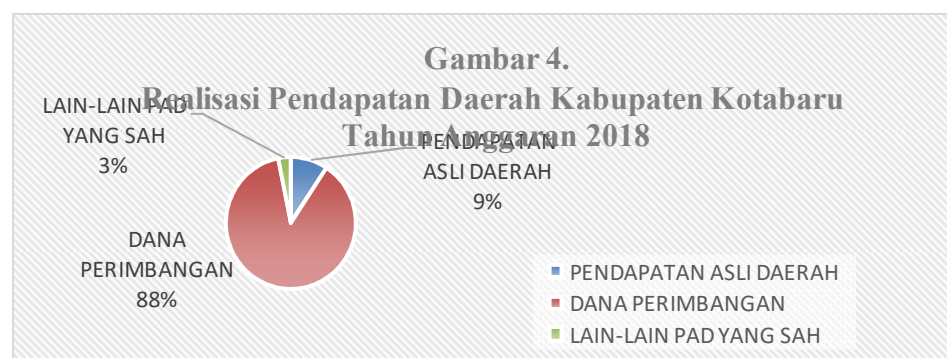


- 4) keunggulan komparatif setiap daerah;
- 5) memperhatikan alih fungsi lahan dan daerah resapan air dan
- 6) keterkaitan antar satu daerah dengan daerah lainnya. Berdasarkan potensi dasar, potensi penunjang, kendala, serta dengan pertimbangan utama kebutuhan pengembangan wilayah dan kesesuaian dengan tata ruang wilayah.

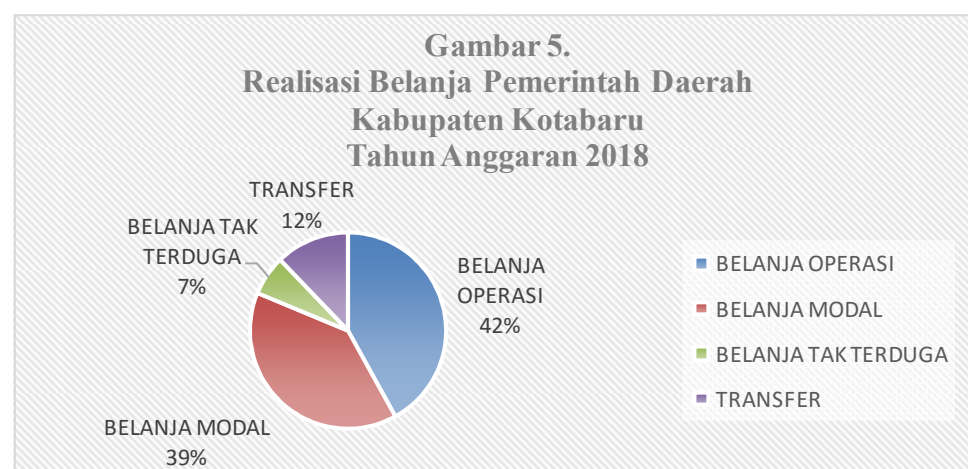
c. Keuangan Daerah

Peran pemerintah daerah dalam pembangunan Kabupaten Kotabaru dapat tercermin dari pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada tahun 2018 realisasi Pendapatan Daerah mencapai 86,80 persen. Sedangkan realisasi Belanja Daerah mencapai 86,32 persen.

Realisasi Pendapatan Daerah sebagian besar berasal dari Dana Perimbangan seperti Bagi Hasil Pajak, DAU, dan DAK yang total mencapai 87,23 persen. Selebihnya sebesar 7,92 persen berasal dari Pendapatan Asli Daerah dan 2,68 persen dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru (diolah)



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru (diolah)



Lebih jauh jika ditelaah menurut fungsinya, sebagian besar belanja daerah digunakan untuk kepentingan pembiayaan pelayanan umum, perumahan dan fasilitas umum, dan pendidikan. Sedangkan belanja untuk kepentingan lainnya seperti pembangunan sektor pariwisata dan budaya, perlindungan sosial, ketertiban dan keamanan, serta lingkungan hidup masih tergolong kecil yaitu total hanya sebesar 2,0 persen.

7.2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN

7.2.2.1 Arah Kebijakan Aspek Pendapatan

Kebijakan pendapatan Kabupaten Kotabaru untuk TA 2018 diarahkan untuk optimalisasi penerimaan pendapatan daerah dan peningkatan pelayanan administrasipemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang efisien, efektif dan taat pada ketentuan yang berlaku, yang dilakukan melalui kebijakan sebagai berikut:

- a. Intensifikasi dan ekstensifikasi PAD sejalan dengan proses revisi UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang sedang dilaksanakan di tingkat pusat, yang akan mengatur *closed-list* jenis-jenis pajak dan retribusi sehingga tidak dimungkinkan lagi ekstensifikasi jenis-jenis pajak dan retribusi oleh daerah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kemampuan Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena Daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis pajak daerah dan diskresi dalam penetapan tarif. Di pihak lain, dengan tidak memberikan kewenangan kepada Daerah untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi baru akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
- a. Mendayagunakan potensi alam dengan tetap memperhatikan keseimbangan, ekosistem dan kelestarian alam;
- b. Mereformasi manajemen pemungutan dan pengelolaan sumber PAD serta Peningkatan pelayanan administrasi pemungutan pendapatan daerah;
- c. Efektifitas dan efisiensi penggunaan PAD;
- d. Menekan biaya pemungutan sumber PAD sesuai peraturan yang berlaku;
- e. Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat di bidang pendapatan daerah, sebagai upaya untuk membangun kesadaran masyarakat bahwa pemungutan pendapatan daerah bukanlah semata-mata iuran wajib yang memberatkan melainkan cerminan relasi transaksional sebagai timbal balik atas pelayanan atau fasilitas yang mereka peroleh;
- f. Mempromosikan Kabupaten Kotabaru agar menarik investor masuk Kabupaten Kotabaru; dan
- g. Memberikan kemudahan, fasilitas dan kesempatan bagi investor yang akan menanam modalnya di Kabupaten Kotabaru.



Kebijakan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Kotabaru pada TA 2018 terdiri dari:

- a. Target pendapatan daerah dari kelompok Pendapatan Asli Daerah akan ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi terhadap masing-masing jenis penerimaan, obyek penerimaan serta rincian obyek penerimaan; Untuk sektor PAD kecuali Lain-lain PAD yang Sah dilakukan dengan mempertimbangkan pertumbuhan rata-rata seluruh obyek pendapatan dan retribusi daerah;
- b. Penetapan target pendapatan berdasarkan potensi riil yang dapat dicapai berdasarkan peraturan perundang-undangan, bukan karena desakan belanja atau pertimbangan lainnya;
- c. Dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah, diupayakan tidak menetapkan kebijakan pemerintahan daerah yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat dan akan ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;
- d. Penyempurnaan perda pemungutan pajak dan retribusi berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Dalam hal jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penetapan target pendapatan pada TA 2018 sesuai ketentuan pada Pasal 180 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, dan mengacu pada Peraturan Daerah yang ada;
- e. Rekrutmen/penambahan aparat pemungut pendapatan;
- f. Peningkatan SDM aparatur pengelola pendapatan;
- g. Melakukan upaya pendekatan sosial dan budaya dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
- h. Pencantuman rencana penerimaan hibah berupa uang dalam APBD TA 2018 didasarkan atas Naskah Perjanjian Hibah (NPH) yang telah direncanakan;
- i. Penerimaan hibah yang bersumber dari APBN atau sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat dan telah diarahkan penggunaannya untuk dana bergulir, dianggarkan dalam APBD pada akun pendapatan, kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah, jenis pendapatan hibah sesuai dengan objek dan rincian objek berkenaan;
- j. Sumbangan yang diterima dari organisasi/lembaga tertentu/perorangan atau pihak ketiga yang tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran maupun pengurangan kewajiban pihak ketiga/pemberi sumbangan diatur dalam peraturan daerah;



- k. Lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah termasuk dana penyesuaian dan dana otonomi khusus dianggarkan pada lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- l. Dana bagi hasil pajak dari provinsi yang diterima Kabupaten Kotabaru merupakan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- m. Perhitungan proyeksi bagi hasil pajak dari provinsi tidak dapat menggunakan Tahun 2012 sebagai tahun dasarnya karena pada Tahun 2012 terjadi penerimaan yang luar biasa pada obyek ini
- n. Kebijakan pendapatan Kabupaten Kotabaru untuk TA 2018 masih diarahkan untuk optimalisasi penerimaan pendapatan daerah dan peningkatan pelayanan administrasi pemungutan pendapatan asli daerah (PAD) yang efisien, efektif dan taat pada ketentuan yang berlaku, sehingga pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun terus meningkat secara signifikan;
- o. Upaya untuk membangun kesadaran masyarakat bahwa pemungutan pendapatan daerah bukanlah semata-mata iuran wajib yang memberatkan melainkan cerminan relasi transaksional sebagai timbal balik atas pelayanan atau fasilitas yang mereka peroleh; dan
- p. Optimalisasi perolehan pendapatan dari Dana Perimbangan, dan Lain-lain Penerimaan Daerah Yang Sah akan terus dilaksanakan pada Tahun 2018. Optimalisasi perolehan Dana Perimbangan dilakukan pada jenis pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak melalui usaha rekonsiliasi data perhitungan bagi hasil dengan Pemerintah Pusat.

7.2.2.2 Arah Kebijakan Aspek Belanja

Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung setiap SKPD.

Belanja tidak langsung untuk belanja hibah, belanja sosial, dan belanja bantuan kepada Kabupaten/Pemerintah Desa serta belanja tidak terduga disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana dan kebutuhan belanja langsung.

Arah pengelolaan belanja daerah mendatang difokuskan pada:

- a. Peranan belanja daerah dapat memberikan *multiplier effect* bagi pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. Belanja daerah sebagai instrumen fiskal diharapkan dapat memberikan dorongan optimal bagi dunia usaha di berbagai sektor;



- c. Belanja daerah diharapkan dapat memberi kontribusi bagi peningkatan sumber daya manusia sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang cerdas dan madani;
- d. Belanja daerah kedepan lebih ditekankan pada upaya menambah daya tarik investasi dengan cara mendorong dan memberi kemudahan, fasilitas dan kesempatan pihak investor untuk menanam modal;
- e. Belanja daerah diarahkan untuk menambah dan atau memperbaiki infrastruktur jalan antara lain meningkatkan kualitas jalan raya, kualitas jalan yang menghubungkan daerah sekitarnya serta akses jalan ke pedesaan, jembatan, drainase, penerangan jalan/listrik, sarana pendidikan serta kesehatan dan sarana lainnya dalam rangka memberikan pelayanan prima pada masyarakat dan dunia usaha serta terwujudnya infrastruktur yang memadai untuk menambah daya tarik investasi dalam rangka pencapaian pertumbuhan ekonomi;
- f. Belanja daerah diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana air bersih dan listrik;
- g. Belanja daerah diarahkan untuk penyediaan fasilitas umum (taman kota, jalur hijau, lapangan olah raga, dan lain-lain);
- h. Belanja daerah diarahkan untuk Rekayasa lingkungan dan Pengendalian lingkungan Kabupaten Kotabaru sesuai aturan yang berlaku;
- i. Memfasilitasi penyediaan pasar, pertokoan dan mal serta memfasilitasi kegiatan ekonomidan perdagangan di Kabupaten Kotabaru; dan
- j. Memberi bantuan modal usaha, teknologi, dan manajemen usaha serta memfasilitasi usaha kemitraan antara pengusaha kecil, menengah dan besar.

Kebijakan umum belanja daerah Kabupaten Kotabaru untuk Tahun 2018 memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Anggaran Daerah yang efektif dan efisien yang memperhatikan fungsi dan prioritas kegiatan;
- b. Anggaran Daerah yang mengutamakan target kinerja;
- c. Anggaran Daerah bertumpu pada kepentingan publik;
- d. Anggaran Daerah dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah (work better and cost less);
- e. Anggaran Daerah yang mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran;
- f. Anggaran Daerah yang dikelola dengan pendekatan kinerja (performance oriented) untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan;
- g. Anggaran Daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi yang terkait; dan



- h. Anggaran Daerah harus dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan dananya dengan memperhatikan prinsip *value for money*.

Kebijakan belanja daerah diatas didasari beberapa asumsi pokok sebagai berikut:

- a. Perkiraan penerimaan pendapatan daerah diharapkan dapat terpenuhi sehingga dapat memberikan dukungan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah dan mampumemenuhi kebutuhan pelayanan dasar serta penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kotabaru; dan
- b. Perkiraan kebutuhan belanja daerah dapat mendanai program-program strategis daerah dalam mendukung dan menjaga target indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012-2016.

7.2.2.3 Arah Kebijakan Aspek Pembiayaan

Kebijakan umum pembiayaan daerah diprioritaskan pada pembiayaan yang tidak memberatkan beban anggaran di tahun-tahun mendatang dan mempersulit likuiditas keuangan daerah. Oleh karena itu optimalisasi sumber penerimaan pembiayaan yang paling mungkin dapat dilakukan secara cepat, yaitu dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) dan transfer dari dana cadangan serta surplus penerimaan.

Kebijakan pembiayaan yang akan diambil oleh Kabupaten Kotabaru pada penyusunan APBD adalah melalui kebijakan defisit anggaran dengan sumber pembiayaan dari Sisa Lebih Anggaran Tahun yang Lalu. Kebijakan defisit anggaran diambil dengan pertimbangan:

- a. Kebutuhan pendanaan kegiatan pelayanan pemerintahan dan program-program pembangunan yang cukup besar dan memenuhi skala prioritas;
- b. Secara makro ekonomi akan menguntungkan perekonomian Kabupaten Kotabaru dengan penambahan jumlah uang yang beredar melalui pengeluaran pemerintah dan akan mengundang masuknya investasi swasta

7.2.3 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Indikator pencapaian kinerja yang disajikan dalam laporan keuangan ini adalah mengacu pada target-target yang dicanangkan pada masing-masing program ada urusan wajib dan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam Tahun Anggaran 2018 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 32 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 32), Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 72 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 72);

Sesuai dengan struktur APBD Kabupaten Kotabaru TA 2018 yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja dikelompokkan berdasarkan urusan pemerintahan yang terdiri dari belanja Urusan Wajib dan belanja Urusan Pilihan.

Urusan Wajib dan Urusan Pilihan dilaksanakan melalui anggaran Belanja Langsung yaitu belanja yang terkait langsung dengan suatu program/kegiatan. Total anggaran belanja langsung Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp879.695.693.850,00 Total Realisasi anggaran belanja langsung TA 2018 Sebesar Rp742.642.152.814,70.

Sedangkan anggaran belanja tidak langsung TA 2018 adalah sebesar Rp792.295.727.506,00 atau mencapai 92,08% dari total anggaran belanja tidak langsung daerah TA 2018 yaitu sebesar Rp700.667.143.839,00.

7.3 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

7.3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan disajikan dengan menggambarkan pencapaian kinerja keuangan masing-masing program pada Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kotabaru pada TA 2018. Uraian lengkap kinerja program dan kegiatan dari masing-masing urusan tersebut disajikan terpisah dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Kotabaru Tahun 2018.

Berdasarkan struktur APBD Kabupaten Kotabaru TA 2018, dilaksanakan 26 Urusan Wajib dan 8 Urusan Pilihan. Urusan Wajib dan Urusan Pilihan dilaksanakan melalui anggaran Belanja Langsung yaitu belanja yang terkait langsung dengan suatu program/kegiatan. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2018 berdasarkan urusan sebagai berikut:

Tabel 6 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2018 Berdasarkan Urusan

No	Jenis Urusan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar			
1	Pendidikan	374.290.894.349,00	324.374.716.413,00	86,66
2	Kesehatan	256.718.517.150,00	210.614.935.330,70	82,04
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	170.242.346.687,00	137.697.991.918,00	80,88
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	18.510.428.438,00	16.369.690.690,00	88,43
5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	30.039.799.872,00	27.320.096.579,00	90,95
6	Sosial	6.023.563.596,00	4.886.545.591,00	81,12
	Jumlah Urusan Wajib Pelayanan Dasar	855.825.550.092,00	721.263.976.521,70	84,28
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar			



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

1	Tenaga Kerja	8.584.852.946,00	7.940.213.393,00	92,49
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9.113.618.731,00	6.822.387.671,00	74,86
3	Pangan	7.445.989.361,00	6.607.538.262,00	88,74
4	Pertanahan	11.652.599.824,00	4.281.137.770,00	36,74
5	Lingkungan Hidup	10.268.497.363,00	9.455.479.424,00	92,08
6	Administrasi Kependudukan dan Capil	8.361.657.998,00	7.847.827.859,00	93,85
7	Pemberdayaan Masyarakat Desa	12.232.419.822,00	10.037.555.617,00	82,06
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.477.868.700,00	4.111.223.506,00	75,05
9	Perhubungan	11.782.548.562,00	10.834.468.349,00	91,95
10	Komunikasi dan Informatika	10.188.879.220,00	9.339.440.352,00	91,66
11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	7.097.858.527,00	6.253.609.930,00	88,11
12	Penanaman Modal	7.786.358.377,00	7.263.490.450,00	93,28
13	Kepemudaan dan Olah Raga	13.104.760.554,00	11.927.942.454,00	91,02
14	Statistik	600.000.000,00	595.046.690,00	99,17
15	Kebudayaan	4.577.124.000,00	4.480.650.391,00	97,89
16	Perpustakaan	5.317.003.734,00	4.734.709.492,00	89,05
17	Kearsipan	111.086.600,00	110.436.500,00	99,41
	Jumlah Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	133.703.124.319,00	112.643.158.110,00	84,25
	Urusan Pilihan			
1	Kelautan dan Perikanan	9.784.262.795,00	7.843.346.871,00	80,16
2	Pariwisata	34.846.415.845,00	30.228.417.313,00	86,75
3	Pertanian	29.010.920.579,00	25.718.470.159,00	88,65
4	Kehutanan	5.919.661.422,00	4.873.502.944,00	82,33
5	Perdagangan	15.391.601.175,00	13.802.637.619,00	89,68
6	Perindustrian	983.152.000,00	644.555.600,00	65,56
7	Transmigrasi	226.879.500,00	223.933.300,00	98,70
	Jumlah Urusan Pilihan	96.162.893.316,00	83.334.863.806,00	86,66
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang			
1	Administrasi Pemerintahan	216.049.053.840,00	192.779.907.975,00	89,23
2	Pengawasan	15.754.502.531,00	13.624.784.009,00	86,48
3	Perencanaan	15.346.878.488,00	14.298.621.608,00	93,17
4	Keuangan	307.316.870.005,00	275.335.738.927,00	89,59
5	Kepegawaian	30.025.091.018,00	28.422.761.267,00	94,66
6	Pendidikan dan Pelatihan	1.807.457.747,00	1.605.484.430,00	88,83
	Jumlah Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	586.299.853.629,00	526.067.298.216,00	89,73
	TOTAL	1.671.991.421.356,00	1.443.309.296.653,70	86,32



7.3.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Belanja TA 2018 terealisasi 86,32 persen dibandingkan dengan anggarannya. Rendahnya realisasi Belanja TA 2018 terutama terjadi pada pos Belanja Langsung, yaitu belanja untuk pelaksanaan program dan kegiatan SKPD. Hal ini antara lain disebabkan oleh antara lain:

- a. Kurang optimalnya kinerja pihak ketiga dalam melaksanakan pekerjaan, sehingga tidak dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan dan harus dilakukan pemutusan kontrak dengan persentase penyelesaian pekerjaan yang rendah
- b. Penawaran yang terlalu kecil dari pemenang lelang sehingga realisasi anggaran sangat signifikan perbedaannya dibanding jumlah anggarannya
- c. Terlambatnya proses lelang yang berpengaruh pada terbatasnya waktu pelaksanaan pekerjaan, sehingga penyelesaian pekerjaan tidak tercapai
- d. Adanya efesiensi dalam pelaksanaan belanja barang dan jasa
- e. Tidak terserapnya sebagian besar belanja tidak langsung terutama belanja bantuan sosial yang tidak direncanakan atau belanja tidak tersangka



7.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI

7.4.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

7.4.1.1 Entitas Akuntansi

Entitas akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan.

Kepala SKPD (Sekretaris Daerah/Kepala Dinas/Badan/Kantor) sebagai entitas akuntansi melimpahkan wewenangnya kepada Kepala Bagian Tata Usaha di lingkungannya sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD/PPK-SKPD untuk menyelenggarakan akuntansi pengelolaan keuangan dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

Tabel 7: Entitas Akuntansi Kabupaten Kotabaru TA. 2018

NO	KODE	S K P D
1	1 . 01 . 1 . 1	DINAS PENDIDIKAN
2	1 . 02 . 1 . 1	DINAS KESEHATAN
3	1 . 02 . 2 . 1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTABARU
4	1 . 03 . 1 . 1	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
5	1 . 03 . 2 . 1	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
6	1 . 04 . 1 . 1	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
7	1 . 05 . 1 . 1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1 . 05 . 2 . 1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
9	1 . 05 . 3 . 1	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
10	1 . 05 . 4 . 1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
11	1 . 06 . 1 . 1	DINAS SOSIAL
12	2 . 01 . 1 . 1	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
13	2 . 02 . 1 . 1	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
14	2 . 03 . 1 . 1	DINAS KETAHANAN PANGAN
15	2 . 05 . 1 . 1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

NO	KODE	S K P D
16	2 . 06 . 1 . 1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
17	2 . 07 . 1 . 1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
18	2 . 09 . 1 . 1	DINAS PERHUBUNGAN
19	2 . 10 . 1 . 1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
20	2 . 11 . 1 . 1	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERINDUSTRIAN
21	2 . 12 . 1 . 1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
22	2 . 13 . 1 . 1	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
23	2 . 17 . 1 . 1	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
24	3 . 01 . 1 . 1	DINAS PERIKANAN
25	3 . 02 . 1 . 1	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
26	3 . 03 . 1 . 1	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
27	3 . 03 . 3 . 1	DINAS PERKEBUNAN
28	3 . 06 . 1 . 1	DINAS PERDAGANGAN
29	4 . 01 . 3 . 1	SEKRETARIAT DAERAH
30	4 . 01 . 4 . 1	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
31	4 . 01 . 6 . 1	SEKRETARIAT KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
32	4 . 01 . 7 . 1	SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
33	4 . 01 . 8 . 1	KECAMATAN PULAU LAUT UTARA
34	4 . 01 . 9 . 1	KECAMATAN PULAU LAUT TIMUR
35	4 . 01 . 10 . 1	KECAMATAN PULAU LAUT TENGAH
36	4 . 01 . 11 . 1	KECAMATAN PULAU SEBUKU
37	4 . 01 . 12 . 1	KECAMATAN PULAU LAUT BARAT
38	4 . 01 . 13 . 1	KECAMATAN PULAU LAUT KEPULAUAN
39	4 . 01 . 14 . 1	KECAMATAN PULAU LAUT SELATAN
40	4 . 01 . 15 . 1	KECAMATAN PULAU SEMBILAN
41	4 . 01 . 16 . 1	KECAMATAN KELUMPANG HILIR
42	4 . 01 . 17 . 1	KECAMATAN KELUMPANG HULU
43	4 . 01 . 18 . 1	KECAMATAN KELUMPANG SELATAN
44	4 . 01 . 19 . 1	KECAMATAN HAMPANG



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

NO	KODE	S K P D
45	4 . 01 . 20 . 1	KECAMATAN KELUMPANG BARAT
46	4 . 01 . 21 . 1	KECAMATAN KELUMPANG TENGAH
47	4 . 01 . 22 . 1	KECAMATAN KELUMPANG UTARA
48	4 . 01 . 23 . 1	KECAMATAN SAMPANAHAN
49	4 . 01 . 24 . 1	KECAMATAN PAMUKAN BARAT
50	4 . 01 . 25 . 1	KECAMATAN SUNGAI DURIAN
51	4 . 01 . 26 . 1	KECAMATAN PAMUKAN UTARA
52	4 . 01 . 27 . 1	KECAMATAN PAMUKAN SELATAN
53	4 . 01 . 28 . 1	KECAMATAN PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR
54	4 . 02 . 1 . 1	INSPEKTORAT
55	4 . 03 . 1 . 1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
56	4 . 04 . 1 . 1	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
57	4 . 04 . 2 . 1	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
58	4 . 04 . 3 . 1	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
59	4 . 05 . 1 . 1	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

7.4.1.2 Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang bercirikan:

- Entitas tersebut dibiayai oleh APBD;
- Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
- Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau pejabat negara yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat;
- Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kotabaru adalah Bupati Kotabaru. Dalam pelaksanaannya Bupati melimpahkan wewenangnya kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah.



Produk dari entitas pelaporan ini adalah laporan keuangan konsolidasian berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan arus Kas dan Catatan atas Laporan keuangan.

7.4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam laporan operasional. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas maka entitas pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan demikian

Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula di LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas maka LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau entitas pelaporan, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

7.4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Beberapa informasi penting yang perlu disajikan, sehubungan dengan basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan ini adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode TA yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.



Pendapatan dicatat sebesar nilai nominal atau nilai wajar untuk aset donasi dan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

b. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja dicatat sebesar nilai nominal atau nilai wajar untuk aset donasi dan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pengeluaran bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan penerimaan).

c. Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Transfer dicatat sebesar nilai nominal.

d. Surplus atau Defisit

Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

Surplus/Defisit dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

e. Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau untuk memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan dicatat sebesar nilai nominal atau nilai wajar untuk aset donasi dan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan/pengeluaran bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan penerimaan/pengeluaran).

f. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Pengukuran aset adalah sebagai berikut:

- 1) Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- 2) Investasi Jangka Pendek dicatat sebesar nilai perolehan;



- 3) Piutang dicatat berdasarkan nilai buku;
- 4) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, Penyisihan piutang tidak tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang yang mungkin tidak tertagih, diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih beredar (*outstanding*). Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang, jenis piutang, serta mempertimbangkan keberadaan agunan dan barang sitaan.
- 5) Persediaan dicatat sebesar:
 - a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lain seperti donasi/rampasan;
- 6) Investasi Jangka Panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut;
- 7) Aset Tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan;

g. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

h. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir laporan perubahan ekuitas

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

7.4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

7.4.4.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan

- a. Kebijakan akuntansi pendapatan bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi pendapatan mencakup definisi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran/penilaian dan pengungkapan pendapatan;



- b. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah;
- c. Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan;
- d. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah;
- e. Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah;
- f. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- g. Pendapatan diukur dengan mata uang rupiah pada saat kas diterima. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah BI pada saat terjadi pendapatan;
- h. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan;
- i. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama;
- j. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

7.4.4.2 Kebijakan Akuntansi Belanja

- a. Kebijakan akuntansi belanja bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi belanja mencakup definisi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran/penilaian dan pengungkapan belanja;
- b. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode TA 2018 bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah;
- c. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi:
 - 1) **Klasifikasi ekonomi** adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga;



- 2) **Belanja operasi** adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial;
 - 3) **Belanja modal** adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud;
 - 4) **Belanja Tak Terduga** adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah;
- d. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah;
 - e. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan;
 - f. Dalam hal badan layanan umum daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah;
 - g. Belanja diukur dengan mata uang rupiah pada saat kas keluar. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah BI pada saat terjadi belanja;
 - h. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain;
 - i. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

7.4.4.3 Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Transfer Masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

Transfer Keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain, seperti pengeluaran transfer bagi hasil ke desa, berupa bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi.



Kebijakan Akuntansi Transfer

- a. Transfer masuk dicatat sebesar penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
- b. Transfer keluar dicatat sebesar pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti dana bagi hasil yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru.

7.4.4.4 Kebijakan Akuntansi Surplus dan Defisit

Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

Kebijakan Akuntansi Surplus atau Defisit

Surplus/Defisit dicatat sebesar Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

7.4.4.5 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

- a. Kebijakan akuntansi pembiayaan bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi pembiayaan meliputi definisi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran/penilaian dan pengungkapan pembiayaan;
- b. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada TA 2018 bersangkutan maupun tahun-TA berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran;
- c. Pembiayaan diklasifikasikan menurut penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan dan pembiayaan netto;
- d. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan;
- e. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode TA tertentu, dan pembentukan dana cadangan;
- f. Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode TA tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos pembiayaan netto;
- g. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah;



- h. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah;
- i. Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dan dengan azas bruto;
- j. Pembiayaan diukur menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Pembiayaan yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat terjadinya pembiayaan;
- k. Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit anggaran.

7.4.4.6 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. SiLPA/SiKPA dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.

7.4.4.7 Kebijakan Akuntansi Aset

Kebijakan akuntansi aset bertujuan mengatur perlakuan akuntansi aset meliputi, definisi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran/penilaian dan pengungkapan aset.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diklasifikasikan sebagai Aset Lancar dan Aset Nonlancar.

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

- a. Diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan; atau
- b. Berupa kas dan setara kas.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Semua aset selain yang termasuk dalam aset lancar, diklasifikasikan sebagai aset nonlancar. Aset Nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan



aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.

7.4.4.7.1 Kas dan Setara Kas

- a. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan;
- b. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD)/Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan hingga tanggal neraca;
- c. Saldo simpanan di bank yang dapat dikategorikan sebagai kas adalah saldo simpanan atau rekening di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya;
- d. Kas pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah;
- e. Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:
 - 1) Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh gubernur, bupati/walikota untuk menampung penerimaan dan pengeluaran;
 - 2) Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah;
 - 3) Uang tunai di bendahara umum daerah;
- f. Kas dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca;
- g. Dalam saldo kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan kepada pihak ketiga berupa Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).

7.4.4.7.2 Piutang

- a. Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Piutang dikelompokkan menjadi Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/D, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Denda, dan Piutang Lainnya;
- b. Piutang dinilai sebesar nilai nominal;



- c. Piutang pajak dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak yang pembayarannya belum diterima;
- d. Piutang retribusi dicatat berdasarkan surat ketetapan retribusi yang pembayarannya belum diterima;
- e. Piutang Lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/BUMD, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi, dan Piutang Pajak;
- f. Piutang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

7.4.4.7.3 Persediaan

- a. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
- b. Persediaan merupakan aset yang berwujud:
 - Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
 - Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
 - Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
 - Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan;
- c. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- d. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah;
- e. Persediaan disajikan sebesar:
 - 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - 2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - 3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan;
- f. Metode pencatatan yang digunakan untuk akun persediaan adalah metode *Physical inventory* yaitu persediaan dicatat/diakui berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal akhir periode akuntansi.



7.4.4.7.4 Investasi/Penyertaan

- a. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
- b. Investasi pemerintah dibagi atas dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset nonlancar;
- c. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan non permanen. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan;
- d. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:
 - 1) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
 - 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*);
- e. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut;
- f. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut;
- g. Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan menggunakan:
 - 1) Metode biaya, yaitu investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait;
 - 2) Metode ekuitas, yaitu pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap;



- 3) Penggunaan 2 metode di atas didasarkan pada kriteria berikut:
 - a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya (*Cost Method*);
 - b) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas (*Equity Method*);
 - c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas (*Equity Method*);
- h. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai (*cash dividend*) dicatat sebagai pendapatan;
- i. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah akan dicatat mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama;
- j. Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah dan lain sebagainya;
- k. Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata;
- l. Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya;
- m. Investasi dalam Dana Bergulir:
 - 1) Dana bergulir adalah dana yang dipinjamkan kepada sekelompok masyarakat, unit usaha kecil dan menengah, perusahaan daerah, untuk ditarik kembali setelah jangka waktu tertentu, dan kemudian disalurkan kembali;
 - 2) Nilai investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa tertagih.

7.4.4.7.5 Aset Tetap

- a. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum;



- b. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:
 - 1) Tanah;
 - 2) Peralatan dan Mesin;
 - 3) Gedung dan Bangunan;
 - 4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
 - 5) Aset Tetap Lainnya; dan
 - 6) Konstruksi dalam Pengerjaan.
- c. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:
 - 1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - 2) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - 3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - 4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- d. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan;
- e. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan;
- f. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh;
- g. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan;
- h. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan/atau melewati satu periode TA, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai;
- i. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan;



- j. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan;
- k. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas;
- l. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan;
- m. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan;
- n. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun Diinvestasikan dalam Aset Tetap;
- o. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya;
- p. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang;
- q. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
- r. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya;
- s. Konstruksi dalam pengerjaan
 - 1) Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan;



- 2) Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi;
- 3) Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi:
 - a) Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
 - b) Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;
 - c) Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi;
- 4) Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:
 - a) Aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
 - b) Harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.
- 5) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:
 - a) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - b) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - c) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan;
- 6) Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap;
- 7) Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:
 - a) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
 - b) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;
- 8) Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan;



- 9) Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:
 - a) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - b) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - c) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan;
- 10) Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
 - a) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - b) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 - c) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi;
- 11) Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal;
- 12) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan;
- 13) Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi;
- 14) Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi;
- 15) Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.



7.4.4.8 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

- a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah;
- b. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang;
- c. Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:
 - 1) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
 - 2) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
 - 3) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.
- d. Pelaporan keuangan untuk tujuan umum harus menyajikan kewajiban yang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal;
- e. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul;
- f. Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan;
- g. Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan;



- h. Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara pemerintah dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali pemerintah. Secara umum suatu kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran;
- i. Kejadian yang diakui Pemerintah adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah karena pemerintah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas nonpemerintah dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai pemerintah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan pemerintah atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut dan telah terjadinya transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran;
- j. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca;
- k. Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut;
- l. Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerintahan harus dipisahkan dengan kewajiban kepada unit non pemerintahan;
- m. Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan;
- n. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan;
- o. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan;
- p. Nilai nominal atas utang pemerintah yang tidak diperjualbelikan (*non-traded debt*) merupakan kewajiban entitas kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan;



- q. Utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi;
- r. Pada setiap tanggal neraca pos kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca;
- s. Selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan;
- t. Jumlah tunggakan atas pinjaman pemerintah harus disajikan dalam bentuk Daftar Umur (aging schedule) Kreditur pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan kewajiban.

7.4.4.9 Ekuitas

Akun Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Kotabaru, yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah kabupaten Kotabaru pada tanggal laporan. Saldo ekuitas dineraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas menunjukkan hak Pemerintah Daerah terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Hak pihak ketiga ini merupakan kewajiban yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah, meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya.

7.4.4.10 Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran.

a. Aktivitas Operasi

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

b. Aktivitas Investasi Nonkeuangan

Arus kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.



Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan terdiri atas:

- 1) Penjualan Aset Tetap yang tidak dipisahkan; dan
- 2) Penjualan Aset Lainnya yang tidak dipisahkan.

Arus keluar kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan terdiri dari :

- 1) Perolehan Aset Tetap; dan
- 2) Perolehan Aset Lainnya.

c. Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain:

- 1) Penerimaan Pinjaman;
- 2) Penerimaan Hasil Penjualan Surat Utang Negara;
- 3) Penerimaan dari Divestasi;
- 4) Penerimaan Kembali Pinjaman; dan
- 5) Pencairan Dana Cadangan.

Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain:

- 1) Penyertaan Modal Pemerintah;
- 2) Pembayaran Pokok Pinjaman;
- 3) Pemberian Pinjaman Jangka Panjang; dan
- 4) Pembentukan Dana Cadangan.

d. Aktivitas Non Anggaran

Arus kas dari aktivitas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas nonanggaran antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK). PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes.



Kebijakan Akuntansi Laporan Arus Kas

- a. Laporan Arus Kas harus disajikan dengan menggunakan metode langsung (*direct method*);
- b. Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi;
- c. Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan;
- d. Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi;
- e. Arus kas yang timbul dari aktivitas entitas pelaporan di luar negeri harus dijabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi;
- f. Arus kas dari transaksi penerimaan pendapatan bunga dan pengeluaran belanja untuk pembayaran bunga pinjaman serta penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan negara/daerah harus diungkapkan secara terpisah. Setiap akun yang terkait dengan transaksi tersebut harus diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi secara konsisten dari tahun ke tahun;
- g. Investasi pemerintah dalam perusahaan negara/daerah dan kemitraan dicatat dengan menggunakan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehannya;
- h. Entitas melaporkan pengeluaran investasi jangka panjang dalam perusahaan negara/daerah dan kemitraan dalam arus kas aktivitas pembiayaan;
- i. Arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan perusahaan negara/daerah dan unit operasional lainnya harus disajikan secara terpisah dalam aktivitas pembiayaan;
- j. Aset dan utang selain kas dan setara kas dari perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepaskan perlu diungkapkan hanya jika transaksi tersebut telah diakui sebelumnya sebagai aset atau utang oleh perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya;
- k. Transaksi investasi dan pembiayaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas. Transaksi tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
- l. Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di Neraca;



- m. Entitas pelaporan mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas. Hal ini dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

7.4.4.11 Koreksi kesalahan dan Perubahan Kebijakan Akuntansi

- a. Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui;
- b. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan;
- c. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan;
- d. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset, serta akun ekuitas dana yang terkait;
- e. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain;
- f. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas;
- g. Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah;
- h. Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan;
- i. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.



7.4.4.12 Prinsip-Prinsip Penyusunan Laporan Konsolidasian

Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, dengan atau tanpa mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian;

Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;

Dalam hal pengkonsolidasian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berbasis kas (sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan/SAP) dengan Laporan Keuangan BLU yang berbasis akrual (Standar Akuntansi Keuangan/SAK), sebelum dilakukan proses konsolidasi perlu dilakukan *mapping* terhadap Laporan Keuangan BLU yang bersangkutan dalam rangka menyesuaikan basis akuntansi BLU ke basis akuntansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Kebijakan Akuntansi Penyusunan Laporan Konsolidasian

- a. Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan;
- b. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya;
- c. Dalam proses konsolidasi selalu diikuti dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*). Namun demikian, apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Contoh akun timbal balik (*reciprocal accounts*) antara lain akun Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan yang belum dipertanggungjawabkan oleh Bendaharawan Pembayar sampai dengan akhir periode akuntansi;
- d. Laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) digabungkan dengan laporan keuangan SKPD yang secara organisatoris membawahnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran BLUD digabungkan secara bruto dengan Laporan Realisasi Anggaran SKPD yang secara organisatoris membawahnya;
 - 2) Neraca BLUD digabungkan kepada neraca SKPD yang secara organisatoris membawahnya.



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

7.5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

7.5.1.1 Pendapatan

Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Realisasi Pendapatan TA 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp1.438.559.208.141,26 dan Rp1.378.614.173.971,74. Pendapatan TA 2018 dan 2017 dikelompokkan sebagai berikut:

	Anggaran 2018	Realisasi 2018	Realisasi 2017
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Pendapatan Asli Daerah	142.163.331.891,00	131.884.059.671,26	118.011.275.041,74
Pendapatan Transfer	1.447.821.871.952,74	1.262.986.818.560,00	1.211.300.673.974,00
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	67.280.301.195,00	43.688.329.910,00	49.302.224.956,00
Jumlah	1.657.265.505.038,74	1.438.559.208.141,26	1.378.614.173.971,74

7.5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah	Anggaran 2018	Realisasi 2018	Realisasi 2017
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	142.163.331.891,00	131.884.059.671,26	118.011.275.041,74

PAD TA 2018 dianggarkan sebesar Rp142.163.331.891,00 dan terealisasi sebesar Rp131.884.059.671,26 atau 92,77% dari anggarannya sebesar Rp142.163.331.891,00. Realisasi pendapatan asli daerah TA 2018 meningkat sebesar Rp13.872.784.629,52 atau 11,76% jika dibandingkan dengan pendapatan asli daerah TA 2017 yang sebesar Rp118.011.275.041,74. Realisasi PAD TA 2018 dan 2017 memberikan kontribusi masing-masing sebesar 9,57% dan 8,56% terhadap total pendapatan. Kontribusi tersebut berasal dari:

No	Jenis Pendapatan Asli Daerah	Anggaran 2018	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Kenaikan/ Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)		
1	Pajak Daerah	53.728.862.762,00	63.436.269.358,00	42.882.279.669,00	20.553.989.689,00	47,93
2	Retribusi Daerah	6.027.475.060,00	5.085.736.912,00	4.974.832.392,00	110.904.520,00	2,23
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.100.000.000,00	12.609.153.948,00	11.041.338.802,00	1.567.815.146,00	14,20
4	Lain-lain PAD yang sah	70.306.994.069,00	50.752.899.453,26	59.112.824.178,74	(8.359.924.725,48)	(14,14)
	Jumlah	142.163.331.891,00	131.884.059.671,26	118.011.275.041,74	13.872.784.629,52	11,76

Rincian masing-masing pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

7.5.1.1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
		53.728.862.762,00	63.436.269.358,00	42.882.279.669,00

Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Kotabaru dikelola oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD).

Pendapatan Pajak Daerah TA 2018 terealisasi sebesar Rp63.436.269.358,00 atau 118,07% dari anggarannya sebesar Rp53.728.862.762,00. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2018 tersebut meningkat sebesar Rp20.553.989.689,00 atau 47,93% dari realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2017 sebesar Rp42.882.279.669,00. Rincian realisasi Pendapatan Pajak Daerah terdiri dari:

No	Objek Pendapatan Pajak Daerah	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Pajak Hotel					
a	Hotel	340.076.000,00	347.267.472,00	319.111.242,00	28.156.230,00	8,82
b	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggrahan/Hostel/Ru mah Kos	17.424.000,00	11.853.000,00	10.570.000,00	1.283.000,00	12,14
	Jumlah (1)	357.500.000,00	359.120.472,00	329.681.242,00	29.439.230,00	8,93
2	Pajak Restoran					
a	Restoran	4.428.000.000,00	5.566.372.485,00	5.204.922.637,00	361.449.848,00	6,94
b	Rumah Makan	54.600.000,00	93.282.800,00	97.410.525,00	(4.127.725,00)	(4,24)
c	Kafetaria	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-
d	Warung	17.400.000,00	24.212.000,00	24.150.000,00	62.000,00	0,26
	Jumlah (2)	4.500.200.000,00	5.684.067.285,00	5.326.483.162,00	357.584.123,00	6,71
3	Pajak Hiburan					
a	Tontonan Film/Bioskop	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-
b	Pagelaran Kesenian/Musik/ Tari/Busana	8.056.000,00	8.056.000,00	4.500.000,00	3.556.000,00	79,02
c	Diskotik, Karaoke, Klab Malam	136.973.500,00	149.259.897,00	204.615.139,00	(55.355.242,00)	(27,05)
d	Permainan Biliar	3.000.000,00	3.045.900,00	1.491.900,00	1.554.000,00	104,16
e	Permainan	4.500.000,00	6.477.000,00	3.054.900,00	3.422.100,00	112,02
f	Ketangkasan Pusat kebugaran	4.629.600,00	4.727.100,00	4.878.750,00	(151.650,00)	(3,11)
g	Pertandingan Olahraga	18.044.000,00	13.620.000,00	10.250.000,00	3.370.000,00	32,88
	Jumlah (3)	179.703.100,00	185.185.897,00	228.790.689,00	(43.604.792,00)	(19,06)
4	Pajak Reklame					
a	Reklame Papan/Bill Board/ Videotron/megatron	255.000.000,00	259.502.812,00	297.111.937,00	(37.609.125,00)	(12,66)
b	Reklame Kain	15.000.000,00	12.796.784,00	15.753.825,00	(2.957.041,00)	(18,77)
c	Reklame Suara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah (4)	270.000.000,00	272.299.596,00	312.865.762,00	(40.566.166,00)	(12,97)
5	Pajak Penerangan Jalan					
a	Pajak Penerangan Jalan PLN	7.500.000.000,00	8.750.948.159,00	7.387.159.821,00	1.363.788.338,00	18,46



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

No	Objek Pendapatan Pajak Daerah	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	(%)
	b Pajak Penerangan Jalan Non PLN	3.790.404.468,00	4.810.761.761,00	3.850.786.158,00	959.975.603,00	24,93
	Jumlah (5)	11.290.404.468,00	13.561.709.920,00	11.237.945.979,00	2.323.763.941,00	20,68
6	Pajak Parkir					
	a Pajak Parkir	5.350.000,00	27.339.300,00	0,00	27.339.300,00	-
	Jumlah (6)	5.350.000,00	27.339.300,00	0,00	27.339.300,00	-
7	Pajak Mineral Logam Bukan Logam dan Batuan					
	a Batu Kapur	14.323.945.250,00	15.902.544.588,00	15.843.681.992,00	58.862.596,00	0,37
	b Batu Gunung/ Kali	712.560.800,00	1.561.376.383,00	1.012.498.461,00	548.877.922,00	54,21
	c Pasir	1.313.452.700,00	1.977.850.871,00	1.752.578.087,00	225.272.784,00	12,85
	d Tanah Timbun/ Urug	971.716.500,00	988.827.499,00	1.152.485.601,00	(163.658.102,00)	(14,20)
	e Tanah Serap/ Laterit	767.828.256,00	1.103.638.802,00	836.064.180,00	267.574.622,00	32,00
	Jumlah (7)	18.089.503.506,00	21.534.238.143,00	20.597.308.321,00	936.929.822,00	4,55
8	Pajak Air Bawah Tanah					
	a Pajak Air Bawah tanah	20.300.000,00	20.319.846,00	17.291.414,00	3.028.432,00	17,51
	Jumlah (8)	20.300.000,00	20.319.846,00	17.291.414,00	3.028.432,00	17,51
9	Pajak Sarang Burung Walet					
	a Pajak Sarang Burung Walet	36.000.000,00	46.250.900,00	0,00	46.250.900,00	-
	Jumlah (9)	36.000.000,00	46.250.900,00	0,00	46.250.900,00	-
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan					
	a Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan	1.074.873.599,00	903.532.190,00	968.660.372,00	(65.128.182,00)	(6,72)
	b Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan	687.303.691,00	879.837.754,00	919.606.825,00	(39.769.071,00)	(4,32)
	Jumlah (10)	1.762.177.290,00	1.783.369.944,00	1.888.267.197,00	(104.897.253,00)	(5,56)
11	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					
	a BPHTB - Pemindahan Hak	291.898.633,00	268.018.175,00	320.620.100,00	(52.601.925,00)	(16,41)
	b BPHTB - Pemberian Hak Baru	16.925.825.765,00	19.694.349.880,00	2.623.025.803,00	17.071.324.077,00	650,83
	Jumlah (11)	17.217.724.398,00	19.962.368.055,00	2.943.645.903,00	17.018.722.152,00	578,15
	Jumlah Total (1 s.d. 11)	53.728.862.762,00	63.436.269.358,00	42.882.279.669,00	20.553.989.689,00	47,93

Pemungutan Pajak Daerah menerapkan mekanisme penetapan oleh aparat pajak (*official assessment*) dan melalui mekanisme perhitungan sendiri (*self assessment*). Pajak yang dipungut dengan pendekatan *official assessment* meliputi Pajak Reklame, pajak Air bawah tanah, dan Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan, sedangkan sisanya menerapkan mekanisme *self assessment*.

7.5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
	6.027.475.060,00	5.085.736.912,00	4.974.832.392,00

Pendapatan Retribusi Daerah TA 2018 terealisasi sebesar Rp5.085.736.912,00 atau 84,38% dari anggarannya sebesar Rp6.027.475.060,00. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah tersebut meningkat sebesar Rp110.904.520,00 atau 2,23% dari realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2017 sebesar Rp4.974.832.392,00. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

No	Objek Pendapatan Retribusi Daerah	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Retribusi Jasa Umum					
a	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	129.600.000,00	341.074.923,00	229.073.980,00	112.000.943,00	48,89
b	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	284.800.000,00	156.973.000,00	230.220.500,00	(73.247.500,00)	(31,82)
c	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	175.000.000,00	216.074.000,00	176.192.000,00	39.882.000,00	22,64
d	Retribusi Pelayanan Pasar–Pelataran	10.000.000,00	3.000.000,00	9.000.000,00	(6.000.000,00)	(66,67)
e	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	309.000.000,00	388.478.165,00	324.208.624,00	64.269.541,00	19,82
f	Retribusi PKB – Mobil Bus - Bus	10.000.000,00	9.622.500,00	13.465.000,00	(3.842.500,00)	(28,54)
g	Retribusi PKB – Mobil Barang/ Beban - Truck	80.000.000,00	79.337.500,00	213.220.500,00	(133.883.000,00)	(62,79)
h	Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3	500.000,00	217.500,00	520.000,00	(302.500,00)	(58,17)
i	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Penyediaan Peta Dasar (Garis)	82.000.000,00	18.150.000,00	22.200.000,00	(4.050.000,00)	(18,24)
j	Retribusi Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	100.000.000,00	104.361.380,00	0,00	104.361.380,00	-
Jumlah (1)		1.180.900.000,00	1.317.288.968,00	1.218.100.604,00	99.188.364,00	8,14
2	Retribusi Jasa Usaha					
a	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah & Bangunan	400.416.000,00	228.458.048,00	177.511.548,00	50.946.500,00	28,70
b	Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah - Kendaraan Bermotor	455.000.000,00	208.295.000,00	104.980.000,00	103.315.000,00	98,41
c	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan	3.950.000,00	159.224.300,00	104.209.500,00	55.014.800,00	52,79
d	Retribusi Pasar Grosir / Pertokoan	1.583.569.060,00	1.675.932.771,00	1.588.943.390,00	86.989.381,00	5,47
e	Retribusi Fasilitas Pasar/Pertokoan yg Dikontrakkan	0,00	0,00	0,00	0,00	-
f	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	5.100.000,00	384.000,00	900.000,00	(516.000,00)	(57,33)
g	Retribusi Tempat Jasa Pelelangan	0,00	0,00	0,00	0,00	-
h	Retribusi Terminal – Tempat Kegiatan Usaha	0,00	0,00	396.000,00	(396.000,00)	-
i	Retribusi Tempat Khusus Parkir	237.900.000,00	180.953.000,00	158.340.000,00	22.613.000,00	14,28
j	Retribusi Tempat Penginapan/Villa	25.000.000,00	0,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	-
k	Retribusi Tempat Rekreasi	181.790.000,00	212.181.500,00	170.608.500,00	41.573.000,00	24,37
l	Retribusi Tempat Pariwisata	188.350.000,00	118.124.000,00	151.766.000,00	(33.642.000,00)	(22,17)
m	Retribusi Tempat Olahraga	10.000.000,00	0,00	200.000,00	(200.000,00)	-



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

No	Objek Pendapatan Retribusi Daerah	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	(%)
	n Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	397.000.000,00	35.240.000,00	184.060.000,00	(148.820.000,00)	(80,85)
Jumlah (2)		3.488.075.060,00	2.818.792.619,00	2.642.914.938,00	175.877.681,00	6,65
3	Retribusi Perizinan Tertentu					
	a Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.335.000.000,00	923.773.000,00	735.368.000,00	188.405.000,00	25,62
	b Retribusi Izin Gangguan Tempat Usaha/Keg. Kepada Orang Pribadi (HO)	0,00	0,00	358.979.250,00	(358.979.250,00)	-
	c Retribusi Izin Trayek kepada Orang Pribadi	1.000.000,00	0,00	800.000,00	(800.000,00)	-
	d Retribusi Izin Trayek kepada Badan	15.000.000,00	21.800.000,00	16.600.000,00	5.200.000,00	31,33
	e Retribusi Penggunaan Ruas Jalan Tertentu	7.500.000,00	4.082.325,00	2.069.600,00	2.012.725,00	97,25
Jumlah (3)		1.358.500.000,00	949.655.325,00	1.113.816.850,00	(164.161.525,00)	(14,74)
Jumlah Total (1 s.d 3)		6.027.475.060,00	5.085.736.912,00	4.974.832.392,00	110.904.520,00	2,23

7.5.1.1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
		12.100.000.000,00	12.609.153.948,00	11.041.338.802,00

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2018 sebesar Rp12.609.153.948,00 atau 104,21% dari anggarannya sebesar Rp12.100.000.000,00. Realisasi pada TA 2018 meningkat sebesar Rp1.567.815.146,00 atau 14,20% dari realisasi pendapatan TA 2017 sebesar Rp11.041.338.802,00.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA. 2018 sebesar Rp12.609.153.948,00 berasal dari pembagian laba Bank Kalsel sebesar Rp12.481.102.458,00 dan pembagian laba dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebesar Rp128.051.490,00, jumlah prosentase pembagian deviden tahun 2017 ini berdasarkan Surat dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pulau Laut Utara Nomor 019/PD.BPR-PLU/II/2018 tanggal 27 Februari 2018.

7.5.1.1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
		70.306.994.069,00	50.752.899.453,26	59.112.824.178,74

Lain-lain PAD yang Sah TA 2018 terealisasi sebesar Rp50.752.899.453,26 atau 72,19% dari anggarannya sebesar Rp70.306.994.069,00. Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2018 menurun sebesar Rp8.359.924.725,48 atau 14,14% dari realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2017 sebesar Rp59.112.824.178,74.



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

Rincian Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Kabupaten Kotabaru terdiri dari:

No	Objek Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan					
	a. Penjualan Hasil Peternakan	50.000.000,00	92.100.000,00	54.150.000,00	37.950.000,00	70,08
	Jumlah (1)	50.000.000,00	92.100.000,00	54.150.000,00	37.950.000,00	70,08
2	Penerimaan Jasa Giro					
	a. Jasa Giro Kas Daerah	5.378.581.813,00	2.320.854.485,00	6.536.591.449,24	(4.215.736.964,24)	(64,49)
	b. Jasa Giro Pemegang Kas	219.500.000,00	87.961.962,00	67.548.109,00	20.413.853,00	30,22
	Jumlah (2)	5.598.081.813,00	2.408.816.447,00	6.604.139.558,24	(4.195.323.111,24)	63,53
3	Penerimaan Bunga Deposito					
	Rekening Deposito pada Bank BPD Kalsel Cabang Kotabaru	2.967.000.000,00	0,00	5.874.657.526,00	(5.874.657.526,00)	-
	Jumlah (3)	2.967.000.000,00	0,00	5.874.657.526,00	(5.874.657.526,00)	-
4	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah					
	Kerugian Uang Daerah	7.000.000.000,00	2.285.366.733,15	1.603.852.669,50	681.514.063,65	42,49
	Jumlah (4)	7.000.000.000,00	2.285.366.733,15	1.603.852.669,50	681.514.063,65	42,49
5	Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan					
	a. Bidang Pendidikan	0,00	0,00	499.702,00	(499.702,00)	-
	b. Bidang Kesehatan	0,00	0,00	24.118.080,00	(24.118.080,00)	-
	c. Bidang Pekerjaan Umum	500.000.000,00	774.788.017,00	1.590.543.919,00	(815.755.902)	(51,29)
	Jumlah (5)	500.000.000,00	774.788.017,00	1.615.161.701,00	(840.373.684,00)	(52,03)
6	Denda Pajak					
	a. Pendapatan Denda Pajak Restoran	5.000.000,00	9.923.094,00	4.290.959,00	5.632.135,00	131,26
	b. Pendapatan Denda Pajak Reklame	0,00	0,00	270.000,00	(270.000,00)	-
	c. Pendapatan Denda PBB Pedesaan dan Perkotaan	0,00	71.142.773,00	139.659.889,00	(68.517.116,00)	(49,06)
	d. Pendapatan Denda Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	16.000.000,00	25.850.182,59	117.577.190,00	(91.727.007,41)	(78,01)
	Jumlah (6)	21.000.000,00	106.916.049,59	261.798.038,00	(154.881.988,41)	(59,16)
7	Pendapatan Denda Retribusi					
	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	0,00	172..800,00	0,00	172..800,00	-
	Jumlah (7)	0,00	172..800,00	0,00	172..800,00	-
8	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan					
	Hasil Eksekusi Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan	2.500.000.000,00	1.207.610.748,80	884.202.000,00	323.408.748,80	36,58
	Jumlah (8)	2.500.000.000,00	1.207.610.748,80	884.202.000,00	323.408.748,80	36,58
9	Pendapatan dari pengembalian					
	a. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	165.919.923,00	169.144.594,00	193.896.912,00	(24.752.318,00)	(12,77)
	b. Pendapatan dari Pengembalian dari Uang Muka	1.400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-
	c. Lain-lain Pengembalian	160.000.000,00	233.057.479,00	168.188.285,00	64.869.194,00	38,57
	Jumlah (9)	1.725.919.923,00	402.202.073,00	362.085.197,00	40.116.876,00	11,08
10	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum					
	Lumpsum Payment	847.246.209,00	0,00	264.630.444,00	(264.630.444,00)	-
	Jumlah (10)	847.246.209,00	0,00	264.630.444,00	(264.630.444,00)	-



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

11	Pendapatan BLUD					
	a. Pendapatan Jasa layanan Umum BLUD	39.460.092.776,00	35.693.197.695,00	34.496.828.512,00	1.196.369.183,00	3,47
	b. Lain-Lain BLUD	737.653.348,00	716.749.341,72	640.508.860,00	76.240.481,72	11,90
	Jumlah (11)	40.197.746.124,00	36.409.947.036,72	35.137.337.372,00	1.272.609.664,72	3,62
12	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya					
	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	1.500.000.000,00	942.258.142,00	518.175.869,00	424.082.273,00	81,84
	Jumlah (12)	1.500.000.000,00	942.258.142,00	518.175.869,00	424.082.273,00	81,84
13	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)					
	a. Pendapatan Dana Kapitasi JKN	7.000.000.000,00	5.678.966.406,00	5.735.333.804,00	(56.367.398,00)	(0,98)
	b. Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN	400.000.000,00	443.755.000,00	197.300.000,00	246.455.000,00	124,91
	Jumlah (13)	7.400.000.000,00	6.122.721.406,00	5.932.633.804,00	190.087.602,00	3,20
	Jumlah Total (1 s.d. 13)	70.306.994.069,00	50.752.899.453,26	59.112.824.178,74	(8.359.924.725,48)	(14,14)

7.5.1.1.2 Pendapatan Transfer	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
	1.447.821.871.952,74	1.262.986.818.560,00	1.211.300.673.974,00

Pendapatan Transfer TA 2018 terealisasi sebesar Rp1.262.986.818.560,00 atau 87,23% dari anggaran TA 2018 sebesar Rp1.447.821.871.952,74. Realisasi Pendapatan Transfer tersebut meningkat sebesar Rp51.686.144.586,00 atau 4,27% dari Pendapatan Transfer TA 2017 sebesar Rp1.211.300.673.974,00. Rincian Pendapatan Transfer TA 2018 dan 2017 sebagai berikut:

No	Jenis Pendapatan Transfer	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Transfer Pemerintah Pusat –Dana Perimbangan	1.129.890.852.874,39	1.004.540.072.270,00	951.257.673.795,00	53.282.398.475,00	5,60
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	144.947.050.000,00	144.947.050.000,00	160.077.727.200,00	(15.130.677.200,00)	(9,45)
3	Transfer Pemerintah Provinsi	172.983.969.078,35	113.499.696.290,00	99.965.272.979,00	13.534.423.311,00	13,54
	Jumlah Pendapatan Transfer	1.447.821.871.952,74	1.262.986.818.560,00	1.211.300.673.974,00	51.686.144.586,00	4,27

Penjelasan masing-masing pendapatan transfer adalah sebagai berikut :

7.5.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
	1.129.890.852.874,39	1.004.540.072.270,00	951.257.673.795,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan TA 2018 terealisasi sebesar Rp1.004.540.072.270,00 atau 88,91% dari anggarannya sebesar Rp1.129.890.852.874,39. Realisasi Dana Perimbangan tersebut meningkat



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

sebesar Rp53.282.398.475,00 atau 5,60% dari realisasi Dana Perimbangan TA 2017 sebesar Rp951.257.673.795,00. Realisasi pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan terdiri dari:

No	Objek Pendapatan Bagi Hasil	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Dana Bagi Hasil Pajak	47.072.802.000,00	49.189.299.562,00	58.112.914.380,00	(8.923.614.818,00)	(15,36)
2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	285.801.825.874,39	174.922.522.213,00	156.124.882.485,00	18.797.639.728,00	12,04
3	Dana Alokasi Umum	612.929.409.000,00	612.929.409.000,00	597.207.951.000,00	15.721.458.000,00	2,63
4	Dana Alokasi Khusus	184.086.816.000,00	167.498.841.495,00	139.811.925.930,00	27.686.915.565,00	19,80
	Jumlah	1.129.890.852.874,39	1.004.540.072.270,00	951.257.673.795,00	53.282.398.475,00	5,60

Penjelasan masing-masing pendapatan dana bagi hasil adalah sebagai berikut:

7.5.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
	47.072.802.000,00	49.189.299.562,00	58.112.914.380,00

Dana Bagi Hasil Pajak TA 2018 terealisasi sebesar Rp49.189.299.562,00 atau 104,50% dari anggarannya sebesar Rp47.072.802.000,00. Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2018 menurun sebesar Rp8.923.614.818,00 atau 15,36% dari realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2017 sebesar Rp58.112.914.380,00. Rincian Dana Bagi Hasil Pajak terdiri dari:

No	Rincian Bagi Hasil Pajak	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Dana Bagi Hasil dari PPh 25 dan PPh 29	18.139.092.000,00	13.013.615.181,00	12.895.848.226,00	117.766.955,00	0,91
2	Dana Bagi Hasil PBB sektor Pertambangan	3.389.229.000,00	3.059.679.529,00	15.682.628.275,00	(12.622.948.746,00)	(80,49)
3	Dana Bagi Hasil PBB sektor Perkebunan	10.867.442.000,00	13.612.786.372,00	8.803.616.800,00	4.809.169.572,00	54,63
4	Dana Bagi Hasil PBB sektor Perhutanan	379.203.000,00	820.547.351,00	431.462.900,00	389.084.451,00	90,18
5	Dana Bagi Hasil PBB sektor Bagi Rata	3.412.397.000,00	3.235.257.970,00	2.853.871.879,00	381.386.091,00	13,36
6	Dana Bagi Hasil PBB sektor Pertambangan (Non Minyak Bumi dan Gas Bumi)	10.885.439.000,00	15.447.413.159,00	17.445.486.300,00	(1.998.073.141,00)	(11,45)
	Jumlah	47.072.802.000,00	49.189.299.562,00	58.112.914.380,00	(8.923.614.818,00)	(15,36)

7.5.1.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)
	285.801.825.874,39	174.922.522.213,00	156.124.882.485,00

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) TA 2018 terealisasi sebesar Rp174.922.522.213,00 atau 61,20% dari anggarannya sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

Rp285.801.825.874,39. Realisasi tersebut meningkat sebesar Rp18.797.639.728,00 atau 12,04% dari realisasi Dana Bagi Hasil SDA TA 2017 sebesar Rp156.124.882.485,00. Rincian Dana Bagi Hasil SDA terdiri dari:

No	Rincian Bagi Hasil SDA	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	101.832.000,00	30.549.600,00	36.209.320,00	(5.659.720,00)	(15,63)
2	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-rent)	8.405.568.000,00	6.307.833.973,00	3.134.922.242,00	3.172.911.731,00	101,21
3	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalti)	276.257.969.874,39	167.640.866.942,00	152.219.027.111,00	15.421.839.831,00	10,13
4	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	943.027.000,00	701.234.591,00	447.937.200,00	253.297.391,00	56,55
5	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	93.429.000,00	242.037.107,00	286.786.612,00	(44.749.505,00)	(15,60)
Jumlah		285.801.825.874,39	174.922.522.213,00	156.124.882.485,00	18.797.639.728,00	12,04

7.5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
	612.929.409.000,00	612.929.409.000,00	597.207.951.000,00

Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2018 terealisasi sebesar Rp612.929.409.000,00 atau 100% dari anggarannya sebesar Rp612.929.409.000,00. Realisasi DAU TA 2018 meningkat sebesar Rp15.721.458.000,00 atau 2,63% dari realisasi DAU TA 2017 sebesar Rp597.207.951.000,00.

7.5.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
	184.086.816.000,00	167.498.841.495,00	139.811.925.930,00

Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2018 terealisasi sebesar Rp167.498.841.495,00 atau 90,99% dari anggarannya sebesar Rp184.086.816.000,00. Realisasi DAK TA 2018 meningkat sebesar Rp27.686.915.565,00 atau 19,80% dari realisasi DAK TA 2017 sebesar Rp139.811.925.930,00. Realisasi DAK terdiri dari:

No	Rincian DAK	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	(%)
DAK Fisik Reguler						
1	DAK Bidang Pendidikan	7.877.000.000,00	7.102.650.000,00	3.975.000.000,00	3.127.650.000,00	78,68
2	DAK Bidang Kesehatan dan KB	11.650.000.000,00	12.412.334.996,00	6.078.534.220,00	6.333.800.776,00	104,20
3	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum	5.572.000.000,00	4.915.183.886,00	0,00	4.915.183.886,00	0,00
4	DAK Bidang Kedaulatan Pangan	3.756.000.000,00	3.556.391.300,00	2.775.980.000,00	780.411.300,00	28,11
5	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	1.840.000.000,00	1.603.735.010,00	1.908.124.057,00	(304.389.047,00)	(15,95)
6	DAK Bidang Sarana Prasarana Perdagangan	3.258.000.000,00	2.505.886.227,00	0,00	2.505.886.227,00	-
7	DAK Bidang Pariwisata	1.420.464.000,00	1.144.939.507,00	0,00	1.144.939.507,00	-
8	DAK Bidang Kehutanan	0,00	0,00	19.326.637.000,00	(19.326.637.000,00)	-
DAK Fisik Infrastruktur Publik Daerah (IPD)						



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

No	Rincian DAK	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	(%)
DAK Fisik Reguler						
1	DAK Bidang Transportasi	21.474.000.000,00	20.122.681.933,00	10.228.555.000,00	9.894.126.933,00	96,73
2	Dak Bidang Infrastruktur Perumahan, Air Minum, dan Sanitasi	0,00	0,00	7.205.867.000,00	(7.205.867.000,00)	(100)
3	DAK IPD Bidang Kesehatan	31.487.000.000,00	27.121.422.656,00	5.545.038.288,00	21.576.384.368,00	389,11
4	DAK IPD Bidang Irigasi	3.677.000.000,00	2.721.295.832,00	1.799.634.000,00	921.661.832,00	51,21
DAK Non Fisik						
1	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	6.198.600.000,00	6.097.800.000,00	4.267.200.000,00	1.830.600.000,00	(42,90)
2	Tunjangan Profesi Guru (TPG)	53.148.305.000,00	52.080.714.625,00	50.233.030.265,00	1.847.684.360,00	3,68
3	Tambahan Penghasilan Guru (TAMSI)	1.953.000.000,00	1.276.837.500,00	2.055.692.500,00	(778.855.000,00)	(37,89)
4	Tunjangan Khusus Guru (TKG)	4.766.132.000,00	4.766.132.000,00	4.357.713.600,00	408.418.400,00	9,37
5	Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional KB	24.996.089.000,00	19.138.199.553,00	19.126.987.000,00	11.212.553,00	0,06
6	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.013.226.000,00	932.636.470,00	927.933.000,00	4.703.470,00	0,51
Jumlah		184.086.816.000,00	167.498.841.495,00	139.811.925.930,00	27.686.915.565,00	19,80

7.5.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
	144.947.050.000,00	144.947.050.000,00	160.077.727.200,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya TA 2018 sebesar Rp144.947.050.000,00 atau 100% dari anggarannya sebesar Rp144.947.050.000,00. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA. 2017 sebesar Rp160.077.727.200,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Rincian Dana Penyesuaian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Alokasi Dana Desa	144.947.050.000,00	144.947.050.000,00	152.577.727.200,00	(7.630.677.200,00)	(5,00)
2	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	7.500.000.000,00	(7.500.000.000,00)	-
Jumlah		144.947.050.000,00	144.947.050.000,00	160.077.727.200,00	(15.130.677.200,00)	(9,45)

7.5.1.1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
	172.983.969.078,35	113.499.696.290,00	99.965.272.979,00



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

Transfer Pemerintah Provinsi TA 2018 terealisasi sebesar Rp113.499.696.290,00 atau 65,61% dari anggarannya sebesar Rp172.983.969.078,35. Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi TA 2018 meningkat sebesar Rp13.534.423.311,00 atau 13,54% dari realisasi Transfer Pemerintah Provinsi TA 2017 sebesar Rp99.965.272.979,00. Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi terdiri dari:

7.5.1.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Anggaran 2018	Realisasi 2018	Realisasi 2017
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	172.983.969.078,35	113.499.696.290,00	99.965.272.979,00

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2018 terealisasi sebesar Rp113.499.696.290,00 atau 65,61% dari anggarannya sebesar Rp172.983.969.078,35. Realisasi tersebut meningkat 13,54% jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan TA 2017 sebesar Rp99.965.272.979,00. Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi terdiri dari:

No	Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	9.009.178.884,58	7.999.776.243,00	5.208.480.010,00	2.791.296.233,00	53,59
2	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	11.675.183.269,93	9.575.817.835,00	8.974.509.391,00	601.308.444,00	6,70
3	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	140.211.530.122,98	83.913.416.605,00	73.382.421.754,00	10.530.994.851,00	14,35
4	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	93.028.248,72	135.530.726,00	107.940.225,00	27.590.501,00	25,56
5	Bagi Hasil dari Pajak Rokok/Tembakau	11.995.048.552,14	11.875.154.881,00	12.291.921.599,00	(416.766.718,00)	(3,39)
Jumlah		172.983.969.078,35	113.499.696.290,00	99.965.272.979,00	13.534.423.311,00	13,54

7.5.1.1.2.3.2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Anggaran 2018	Realisasi 2018	Realisasi 2017
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00	0,00

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Tahun 2018 tidak ada realisasi dan anggarannya.

7.5.1.1.2.4 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Anggaran 2018	Realisasi 2018	Realisasi 2017
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	67.280.301.195,00	43.688.329.910,00	49.302.224.956,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2018 terealisasi sebesar Rp43.688.329.910,00 atau 64,93% dari anggarannya sebesar Rp67.280.301.195,00. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2018 menurun sebesar 11,39% dari pendapatan TA 2017 sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

Rp49.302.224.956,00. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari:

7.5.1.1.2.4.1	Pendapatan Hibah	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
		67.280.301.195,00	43.688.329.910,00	49.302.224.956,00

Realisasi pendapatan Hibah TA 2018 sebesar Rp43.688.329.910,00 atau 64,93% dari anggarannya sebesar Rp67.280.301.195,00. Pendapatan Hibah TA.2018 terdiri dari :

No	Rincian Pendapatan Hibah	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah					
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	56.437.200.000,00	43.688.329.910,00	48.851.681.912,00	(5.163.352.002,00)	(10,57)
	Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri					
1	Sumbangan Pihak Ketiga Sektor Kehutanan dan Perkebunan	5.790.346.195,00	0,00	425.727.044,00	(425.727.044,00)	-
2	Sumbangan Pihak Ketiga Sektor Kelautan dan Perikanan	2.012.755.000,00	0,00	4.816.000,00	(4.816.000,00)	-
3	Jasa Kepelabuhan Dalam Wilayah Kabupaten Kotabaru	3.040.000.000,00	0,00	20.000.000,00	(20.000.000,00)	-
	Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri					
1	Pendapatan Hibah dari perorangan	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JUMLAH	67.280.301.195,00	43.688.329.910,00	49.302.224.956,00	(5.613.895.046,00)	(11,39)

7.5.1.1.2.4. Lainnya	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
	0,00	0,00	0,00

Pendapatan Lainnya TA 2018 tidak ada realisasi dan anggarannya.



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

7.5.1.2 Belanja

Belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Transfer. Realisasi Belanja TA 2018 sebesar Rp1.443.309.296.653,70 atau mencapai 86,32% dari anggaran belanja TA 2018 sebesar Rp1.671.991.421.356,00. Realisasi belanja tersebut menurun sebesar Rp156.823.534.934,28 atau 9,80% dari realisasi belanja TA 2017 sebesar Rp1.600.132.831.587,98. Kelompok Belanja dan Transfer TA 2018 dan 2017 sebagai berikut:

No	Kelompok Belanja	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Belanja Operasi	1.219.832.854.781,00	1.054.980.538.777,70	1.177.205.509.952,98	(122.224.971.175,28)	(10,38)
2	Belanja Modal	299.159.217.208,00	241.071.155.602,00	264.060.180.268,00	(22.989.024.666,00)	(8,71)
3	Belanja Tak Terduga	2.000.000.000,00	270.759.948,00	0,00	270.759.948,00	-
4	Transfer	150.999.349.367,00	146.986.842.326,00	158.867.141.367,00	(11.880.299.041,00)	(7,48)
Jumlah Belanja		1.671.991.421.356,00	1.443.309.296.653,70	1.600.132.831.587,98	(156.823.534.934,28)	(9,80)

Adapun rincian dari masing-masing kelompok belanja adalah sebagai berikut:

7.5.1.2.1 Belanja Operasi	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
	1.219.832.854.781,00	1.054.980.538.777,70	1.177.205.509.952,98

Belanja Operasi TA 2018 terealisasi sebesar Rp1.054.980.538.777,70 atau mencapai 86,49% dari anggarannya sebesar Rp1.219.832.854.781,00. Realisasi Belanja Operasi TA 2018 tersebut menurun sebesar Rp122.224.971.175,28 atau 10,38% dari realisasi Belanja Operasi TA 2017 terealisasi sebesar Rp1.177.205.509.952,98. Realisasi Belanja Operasi Tahun 2018 dan 2017 terdiri dari:

No	Jenis Belanja	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Belanja Pegawai	542.821.477.739,00	478.150.269.130,00	467.891.658.224,00	10.258.610.906,00	2,19
2	Belanja Barang	552.334.604.142,00	477.256.973.270,70	502.102.023.515,60	(24.845.050.244,90)	(4,95)
3	Belanja Hibah	39.600.472.500,00	33.669.823.942,00	90.021.549.862,38	(56.351.725.290,38)	(62,60)
4	Belanja Bantuan Sosial	1.900.000.000,00	860.000.000,00	1.900.000.000,00	(1.040.000.000,00)	(54,74)
5	Belanja Bantuan Keuangan	83.176.300.400,00	65.043.472.435,00	115.290.278.351,00	(50.246.805.916,00)	(43,58)
Jumlah		1.219.832.854.781,00	1.054.980.538.777,70	1.177.205.509.952,98	(122.224.971.175,28)	(10,38)

Penjelasan masing-masing jenis Belanja Operasi adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

7.5.1.2.1.1 Belanja Pegawai	Anggaran 2018	Realisasi 2018	Realisasi 2017
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	542.821.477.739,00	478.150.269.130,00	467.891.658.224,00

Belanja Pegawai TA 2018 terealisasi sebesar Rp478.150.269.130,00 atau 88,09% dari anggarannya sebesar Rp542.821.477.739,00. Realisasi Belanja Pegawai tersebut meningkat sebesar Rp10.258.610.906,00 atau 2,19% dari realisasi Belanja Pegawai TA 2017 terealisasi sebesar Rp467.891.658.224,00. Realisasi Belanja Pegawai TA 2018 dan 2017 terdiri dari:

No	Objek Belanja	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Gaji dan tunjangan	330.337.556.590,00	277.007.705.698,00	276.612.226.938,00	395.478.760,00	0,14
2	Tambahan Penghasilan PNS	201.136.560.930,00	190.083.754.500,00	184.095.613.021,00	5.988.141.479,00	3,25
3	Penerimaan lainnya DPRD dan Kepala Daerah dan Wakil	8.359.740.828,00	8.282.500.000,00	5.205.820.000,00	3.076.680.000,00	59,10
4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	2.686.443.138,00	2.660.010.479,00	1.871.058.437,00	788.952.042,00	42,17
5	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	301.176.253,00	116.298.453,00	106.939.828,00	9.358.625,00	8,75
Jumlah		542.821.477.739,00	478.150.269.130,00	467.891.658.224,00	10.258.610.906,00	2,19

7.5.1.2.1.2 Belanja Barang	Anggaran 2018	Realisasi 2018	Realisasi 2017
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	552.334.604.142,00	477.256.973.270,70	502.102.023.515,60

Belanja Barang TA 2018 terealisasi sebesar Rp477.256.973.270,70 atau 86,41% dari anggarannya sebesar Rp552.334.604.142,00 yang didalamnya tidak termasuk belanja hibah barang. Realisasi Belanja Barang TA 2018 menurun sebesar Rp24.845.050.244,90 atau 4,95% dari realisasi Belanja Barang TA 2017 sebesar Rp502.102.023.515,60. Realisasi Belanja Barang TA 2018 dan 2017 terdiri dari:

No	Objek Belanja	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Belanja Bahan Pakai Habis	35.638.448.846,00	31.288.910.393,00	30.742.191.050,00	546.719.343,00	1,78
2	Belanja Bahan/Material	8.575.665.725,00	6.643.684.241,00	11.335.698.889,00	(4.692.014.648,00)	(41,39)
3	Belanja Jasa Kantor	97.128.244.578,00	80.661.095.321,70	81.572.557.696,60	(911.462.374,90)	(1,12)
4	Belanja Premi Asuransi	106.252.000,00	106.041.600,00	22.000.000,00	84.041.600,00	382,01
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.602.754.411,00	3.573.309.656,00	3.856.700.980,00	(283.391.324,00)	(7,35)
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.322.632.019,00	8.935.396.156,00	8.641.301.137,00	294.095.019,00	3,40
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.722.851.735,00	1.624.966.401,00	1.740.690.990,00	(115.724.589,00)	(6,65)
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	178.650.000,00	107.550.000,00	165.860.000,00	(58.310.000,00)	(35,16)
9	Belanja Sewa Alat Berat	0,00	0,00	18.000.000,00	(18.000.000,00)	-



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

No	Objek Belanja	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.562.655.000,00	1.389.725.000,00	1.099.459.000,00	290.266.000,00	26,40
11	Belanja Makanan & Minuman	31.942.826.995,00	26.854.469.374,00	26.016.392.992,00	838.076.382,00	3,22
12	Belanja Pakaian Dinas & Atributnya	2.458.150.000,00	2.264.820.500,00	1.650.772.050,00	614.048.450,00	37,20
13	Belanja Pakaian Kerja	1.114.255.000,00	1.050.430.750,00	1.122.071.000,00	(71.640.250,00)	(6,38)
14	Belanja Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	3.058.797.750,00	2.891.063.870,00	2.295.362.050,00	595.701.820,00	25,95
15	Belanja Perjalanan Dinas	140.739.549.599,00	122.985.899.920,00	148.930.195.829,00	(25.944.295.909,00)	(17,42)
16	Belanja Pemulangan Pegawai	44.700.000,00	3.100.000,00	5.174.000,00	(2.074.000,00)	(40,09)
17	Belanja Pemeliharaan	15.601.072.849,00	13.165.963.667,00	22.585.075.112,00	(9.419.111.445,00)	(41,71)
18	Belanja Jasa Konsultansi	2.117.282.000,00	2.063.636.500,00	7.607.848.300,00	(5.544.211.800,00)	(72,87)
19	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	177.500.000,00	(177.500.000,00)	-
20	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	982.204.791,00	976.456.150,00	504.235.246,00	472.220.904,00	93,65
21	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	1.503.982.000,00	1.339.181.299,00	5.720.094.816,00	(4.380.913.517,00)	(76,59)
22	Honorarium PNS	78.267.516.580,00	72.267.336.610,00	65.467.287.400,00	6.800.049.210,00	10,39
23	Honorarium Non PNS	59.670.297.800,00	55.754.314.900,00	49.427.550.900,00	6.326.764.000,00	12,80
24	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.371.565.000,00	4.285.190.000,00	1.074.025.000,00	3.211.165.000,00	298,98
25	Belanja Barang Jasa BLUD	50.539.249.464,00	37.005.449.962,00	29.612.121.378,00	7.393.328.548,00	24,97
26	Belanja Beasiswa	0,00	0,00	705.000.000,00	(705.000.000,00)	-
27	Belanja Pemeliharaan Kesehatan	85.000.000,00	18.981.000,00	6.857.700,00	12.123.300,00	176,78
Jumlah		552.334.604.142,00	477.256.973.270,70	502.102.023.515,60	(24.845.050.244,90)	(4,95)

7.5.1.2.1.3 Belanja Subsidi

Anggaran 2018
(Rp)

0,00

Realisasi 2018
(Rp)

0,00

Realisasi 2017
(Rp)

0,00

Belanja Subsidi TA 2018 tidak ada realisasi dan anggarannya.



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

7.5.1.2.1.4 Belanja Hibah

Anggaran 2018	Realisasi 2018	Realisasi 2017
(Rp)	(Rp)	(Rp)
39.600.472.500,00	33.669.823.942,00	90.021.549.862,38

Belanja Hibah TA 2018 terealisasi sebesar Rp33.669.823.942,00 atau 85,02% dari anggarannya sebesar Rp39.600.472.500,00. Realisasi Belanja Hibah TA 2018 menurun sebesar Rp56.351.725.920,38 atau 62,60% dari realisasi Belanja Hibah TA 2017 terealisasi sebesar Rp90.021.549.862,38. Realisasi Belanja Hibah TA 2018 dan 2017 terdiri dari:

No	Objek Belanja	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Badan/Lembaga/Organisasi Swasta :					
	a. Badan/ lembaga/organisasi swasta Bidang Keagamaan	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	-
	b. Badan/ lembaga/organisasi swasta Bidang Pendidikan, Penelitian & Ponpes	5.478.600.000,00	4.255.800.000,00	4.054.800.000,00	201.000.000,00	4,96
	c. Badan/Lembaga/Organisasi Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	-
	d. Badan/ lembaga/organisasi Pemelihara Ketertiban & Keamanan Masyarakat	750.000.000,00	750.000.000,00	650.000.000,00	100.000.000,00	15,38
2	Kelompok/Anggota Masyarakat :					
	a. Kelompok/Anggota Masyarakat Bidang Keagamaan	3.570.000.000,00	2.750.000.000,00	10.608.402.000,00	(7.858.402.000,00)	(74,08)
3	Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga:					
	a. Barang yang diserahkan kepada Masyarakat	18.654.102.500,00	15.497.221.942,00	45.677.728.362,38	(30.180.506.420,38)	(66,07)
	b. Barang yang diserahkan kepada pihak ketiga	9.547.770.000,00	8.816.802.000,00	28.430.619.500,00	(19.613.817.500,00)	(68,99)
Jumlah		39.600.472.500,00	33.669.823.942,00	90.021.549.862,38	(56.351.725.920,38)	(62,60)

7.5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Anggaran 2018	Realisasi 2018	Realisasi 2017
(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.900.000.000,00	860.000.000,00	1.900.000.000,00

Belanja Bantuan Sosial TA 2018 terealisasi sebesar Rp860.000.000,00 atau 45,26% dari anggarannya sebesar Rp1.900.000.000,00. Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2017 terealisasi sebesar Rp1.900.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

No	Objek Belanja	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Kelompok Masyarakat :					
	Kelompok Masyarakat Lainnya	1.900.000.000,00	860.000.000,00	1.900.000.000,00	(1.040.000.000,00)	(54,74)
2	Anggota Masyarakat :					
	PPKD	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Jumlah		1.900.000.000,00	860.000.000,00	1.900.000.000,00	(1.040.000.000,00)	(54,74)

7.5.1.2.1.6 Belanja Bantuan Keuangan	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
	83.176.300.400,00	65.043.472.435,00	115.290.278.351,00

Belanja Bantuan Keuangan TA 2018 terealisasi sebesar Rp65.043.472.435,00 atau 78,20% dari anggarannya sebesar Rp83.176.300.400,00. Belanja Bantuan Keuangan TA 2017 terealisasi sebesar Rp115.290.278.351,00. Rincian Transfer Bantuan Keuangan TA 2018 dan 2017 terdiri dari:

No	Objek Belanja	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) APBD	83.176.300.400,00	65.043.472.435,00	115.290.278.351,00	(50.246.805.916,00)	(43,58)
2	Bantuan Keuangan Program Gerakan Pembangunan Rakyat (GAPURA) SAIJAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Jumlah		83.176.300.400,00	65.043.472.435,00	115.290.278.351,00	(50.246.805.916,00)	(43,58)

Pada TA 2018, bantuan keuangan ke desa dianggarkan dan direalisasikan pada akun transfer – bantuan keuangan ke desa terealisasi ke 21 Kecamatan yaitu sebanyak 202 desa.

7.5.1.2.2 Belanja Modal	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
	299.159.217.208,00	241.071.155.602,00	264.060.180.268,00

Realisasi Belanja Modal TA 2018 sebesar Rp241.071.155.602,00 atau mencapai 80,58% dari anggarannya sebesar Rp299.159.217.208,00. Realisasi Belanja Modal TA 2018 menurun sebesar Rp22.989.024.666,00 atau 8,71% dari realisasi Belanja Modal TA 2017 sebesar Rp264.060.180.268,00. Realisasi Belanja Modal TA 2018 dan 2017 terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

No	Jenis Belanja Modal	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Belanja Tanah	10.859.070.734,00	3.698.615.090,00	5.560.393.576,00	(1.861.778.486,00)	(33,48)
2	Belanja Peralatan dan Mesin	51.815.046.870,00	47.460.710.276,00	38.261.883.371,00	9.198.826.905,00	24,04
3	Belanja Gedung dan Bangunan	70.106.282.104,00	56.604.535.798,00	78.051.649.553,00	(21.447.113.755,00)	(27,48)
4	Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan	151.815.077.081,00	123.073.464.474,00	128.559.784.579,00	(5.486.320.105,00)	(4,27)
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	9.668.570.910,00	6.939.660.447,00	10.274.826.351,00	(3.335.165.904,00)	(32,46)
6	Belanja Aset Lainnya	1.395.169.500,00	1.336.327.000,00	1.377.470.000,00	(41.143.000,00)	(2,99)
7	Belanja Modal BLUD	3.500.000.009,00	1.957.842.517,00	1.974.172.838,00	(16.330.321,00)	(0,83)
Jumlah		299.159.217.208,00	241.071.155.602,00	264.060.180.268,00	(22.989.024.666,00)	(8,71)

Rincian masing-masing adalah sebagai berikut:

7.5.1.2.2.1 Belanja Tanah	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
	10.859.070.734,00	3.698.615.090,00	5.560.393.576,00

Realisasi Belanja Tanah TA 2018 sebesar Rp3.698.615.090,00 atau mencapai 34,06% dari anggarannya sebesar Rp10.859.070.734,00. Realisasi Belanja Tanah TA 2018 menurun sebesar Rp1.861.778.486,00 atau 33,48% dari Realisasi Belanja Tanah TA 2017 sebesar Rp5.560.393.576,00. Realisasi Belanja Tanah TA 2018 dan 2017 terdiri dari:

No	Objek Belanja Modal Tanah	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Bangunan Gedung	10.859.070.734,00	3.698.615.090,00	3.322.800.951,00	375.814.139,00	11,31
2	Belanja modal Pengadaan tanah untuk Bangunan Bukan Gedung	0,00	0,00	2.237.592.625,00	(2.237.592.625,00)	-
Jumlah		10.859.070.734,00	3.698.615.090,00	5.560.393.576,00	(1.861.778.486,00)	(33,48)

7.5.1.2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
	51.815.046.870,00	47.460.710.276,00	38.261.883.371,00

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2018 terealisasi sebesar Rp47.460.710.276,00 atau 91,60% dari anggarannya sebesar Rp51.815.046.870,00. Realisasi tersebut meningkat sebesar Rp9.198.826.905,00 atau 24,04% dari realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2017 terealisasi sebesar Rp38.261.883.371,00. Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

No	Objek BelanjaModal Peralatan dan Mesin	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Alat-alat besar darat	0,00	0,00	1.702.919.265,00	(1.702.919.265,00)	-
2	Alat-alat bantu	155.275.000,00	155.225.000,00	7.000.000,00	148.225.000,00	2.117,50
3	Alat-alat angkutan kendaraan darat bermotor	4.846.451.400,00	4.605.025.515,00	13.490.807.673,00	(8.885.782.158,00)	(65,87)
4	Alat-alat angkutan kendaraan darat tidak bermotor	0,00	0,00	7.440.000,00	(7.440.000,00)	-
5	Alat-alat angkut apung bermotor	595.771.000,00	570.397.000,00	569.247.600,00	1.149.400,00	0,20
6	Alat-alat bengkel bermesin	0,00	0,00	471.380.000,00	(471.380.000,00)	-
7	Alat-alat bengkel tak bermesin	20.000.000,00	19.910.000,00	0,00	19.910.000,00	-
8	Alat-alat Ukur	1.354.281.000,00	1.133.478.068,00	227.234.800,00	906.243.268,00	398,81
9	Alat-alat pengolahan pertanian dan peternakan	258.750.000,00	247.232.500,00	542.441.000,00	(295.208.500,00)	(54,42)
10	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan	234.799.000,00	224.776.000,00	345.887.500,00	(121.111.500,00)	(35,01)
11	Alat kantor	1.678.969.900,00	1.622.109.850,00	1.464.132.600,00	157.977.250,00	10,79
12	Alat Rumah Tangga	5.604.165.370,00	4.460.098.525,00	4.718.902.930,00	(258.804.405,00)	(5,48)
13	Komputer	3.103.876.400,00	2.836.873.095,00	5.386.641.235,00	(2.549.768.140,00)	(47,34)
14	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	478.548.000,00	403.571.750,00	790.157.550,00	(386.585.800,00)	(48,93)
15	Alat-alat studio	1.009.695.900,00	837.434.806,00	771.795.800,00	65.639.006,00	8,50
16	Alat-alat komunikasi	291.487.000,00	279.115.000,00	308.813.900,00	(29.698.900,00)	(9,62)
17	Peralatan Pemancar	0,00	0,0	1.593.900,00	(1.593.900,00)	-
18	Alat-alat kedokteran	28.035.076.000,00	26.485.014.128,00	5.218.743.061,00	21.266.271.067,00	407,50
19	Alat Kesehatan	31.826.500,00	31.781.000,00	54.188.000,00	(22.407.000,00)	(41,35)
20	Unit-unit laboratorium	2.875.094.400,00	2.324.671.539,00	810.140.057,00	1.514.531.482,00	186,95
21	Alat Peraga/Praktek Sekolah	480.180.000,00	464.423.000,00	966.982.000,00	(502.559.000,00)	(51,97)
22	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	600.000.000,00	599.876.000,00	0,00	599.876.000,00	-
23	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	0,00	0,00	14.437.500,00	(14.437.500,00)	-
24	Alat Laboratorium Hidrodinamika	121.500.000,00	120.649.500,00	198.500.000,00	(77.850.500,00)	(39,22)
25	Alat Keamanan dan perlindungan	39.300.000,00	39.048.000,00	192.497.000,00	(153.449.000,00)	(79,72)
Jumlah		51.815.046.870,00	47.460.710.276,00	38.261.883.371,00	9.198.826.905,00	24,04



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

7.5.1.2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
	70.106.282.104,00	56.604.535.798,00	78.051.649.553,00

Belanja Gedung dan Bangunan TA 2018 terealisasi sebesar Rp56.604.535.798,00 atau 80,74% dari anggarannya sebesar Rp70.106.282.104,00. Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2018 menurun sebesar Rp21.447.113.755,00 atau 27,48% dari realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2017 terealisasi sebesar Rp78.051.649.553,00. Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2018 dan 2017 terdiri dari:

No	Objek Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	63.950.100.787,00	54.023.485.593,00	75.515.338.053,00	(21.491.852.460,00)	(28,46)
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	777.593.055,00	771.648.053,00	379.131.000,00	392.517.053,00	103,53
3	Bangunan Bersejarah	15.500.000,00	15.400.000,00	0,00	15.400.000,00	-
4	Bangunan Tugu Peringatan	4.923.673.262,00	1.443.817.652,00	27.800.000,00	1.416.017.652,00	5.093,59
5	Bangunan Rambu-Rambu	439.415.000,00	350.184.500,00	2.129.380.500,00	(1.779.196.000,00)	(83,55)
Jumlah		70.106.282.104,00	56.604.535.798,00	78.051.649.553,00	(21.447.113.755,00)	(27,48)

7.5.1.2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
	151.815.077.081,00	123.073.464.474,00	128.559.784.579,00

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2018 terealisasi sebesar Rp123.073.464.474,00 atau 81,07% dari anggarannya sebesar Rp151.815.077.081,00. Realisasi TA 2018 tersebut menurun sebesar Rp5.486.320.105,00 atau 4,27% dari realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2017 terealisasi sebesar Rp128.559.784.579,00. Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2018 dan 2017 terdiri dari:

No	Objek Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Jalan	102.361.888.516,00	78.841.903.689,00	59.537.603.439,00	19.304.300.250,00	32,42
2	Jembatan	27.169.334.101,00	26.246.867.551,00	28.128.939.172,00	(1.882.071.621,00)	(6,69)
3	Bangunan Air Irigasi	205.000.000,00	100.738.000,00	313.251.500,00	(212.513.500,00)	(67,84)
4	Bangunan Air Pasang Surut	7.411.319.448,00	5.669.781.856,00	4.117.416.790,00	1.552.365.066,00	37,70
5	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA	887.556.000,00	353.451.421,00	5.291.228.473,00	(4.937.777.052,00)	(93,32)
6	Bangunan Air Bersih/Baku	710.000.000,00	29.007.500,00	3.139.184.525,00	(3.110.177.025,00)	(99,08)
7	Bangunan Air	5.769.172.016,00	5.369.186.282,00	1.816.490.964,00	3.552.695.318,00	195,58
8	Instalasi Air Minum/Air Bersih	4.030.861.000,00	3.456.518.892,00	15.605.354.456,00	(12.148.835.564,00)	(77,85)
9	Instalasi Air Kotor	1.800.000.000,00	1.640.430.583,00	3.653.734.160,00	(2.013.303.577,00)	(55,10)



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

No	Objek Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
10	Instalasi Pengolahan Sampah	70.000.000,00	69.740.000,00	0,00	69.740.000,00	-
11	Instalansi Pembangkit Listrik	31.146.000,00	0,00	194.669.000,00	(194.669.000,00)	-
12	Instalasi Gardu Listrik	0,00	0,00	2.991.600,00	(2.991.600,00)	-
13	Jaringan Listrik	1.368.800.000,00	1.295.838.700,00	6.758.920.500,00	(5.463.081.800,00)	(80,83)
Jumlah		151.815.077.081,00	123.073.464.474,00	128.559.784.579,00	(5.486.320.105,00)	(4,27)

7.5.1.2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
	9.668.570.910,00	6.939.660.447,00	10.274.826.351,00

Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2018 terealisasi sebesar Rp6.939.660.447,00 atau 71,78% dari anggarannya sebesar Rp9.668.570.910,00. Realisasi TA 2018 tersebut menurun sebesar Rp3.335.165.904,00 atau 32,46% dari realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2017 terealisasi sebesar Rp10.274.826.351,00. Rincian Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2018 dan 2017 terdiri dari:

No	Objek Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Buku	8.071.387.900,00	5.426.961.651,00	7.269.813.696,00	(1.842.852.045,00)	(25,35)
2	Terbitan	791.410.000,00	707.057.000,00	1.150.866.000,00	(443.809.000,00)	(38,56)
3	Barang-barang Perpustakaan	712.689.010,00	712.588.199,00	989.475.055,00	(276.886.856,00)	(27,98)
4	Alat Olah Raga Lainnya	93.084.000,00	93.053.597,00	80.051.000,00	13.002.597,00	16,24
5	Tanaman	0,00	0,00	59.750.000,00	(59.750.000,00)	-
6	Aset Tetap Renovasi	0,00	0,00	724.870.600,00	(724.870.600,00)	-
Jumlah		9.668.570.910,00	6.939.660.447,00	10.274.826.351,00	(3.335.165.904,00)	(32,46)

7.5.1.2.2.6 Belanja Aset Lainnya	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
	1.395.169.500,00	1.336.327.000,00	1.377.470.000,00

Belanja Aset Lainnya TA 2018 terealisasi sebesar Rp1.336.327.000,00 atau 95,78% dari anggarannya sebesar Rp1.395.169.500,00. Realisasi Belanja Aset Lainnya TA 2017 terealisasi sebesar Rp1.377.470.000,00. Rincian Belanja Aset Lainnya TA 2018 dan 2017 terdiri dari:

No	Objek Belanja Modal Aset Lainnya	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2	Penelitian/Kajian/Survey	1.395.169.500,00	1.336.327.000,00	1.047.000.000,00	289.327.000,00	27,63
3	Pra Desain	0,00	0,00	330.470.000,00	(330.470.000,00)	-
Jumlah		1.395.169.500,00	1.336.327.000,00	1.377.470.000,00	(41.143.000,00)	(2,99)



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

7.5.1.2.2.7	Belanja Modal BLUD	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
		3.500.000.009,00	1.957.842.517,00	1.974.172.838,00

Belanja Modal BLUD TA 2018 terealisasi sebesar Rp1.957.842.517,00 atau 55,94% dari anggarannya sebesar Rp3.500.000.009,00. Realisasi Belanja Modal BLUD TA 2018 menurun sebesar Rp16.330.321,00 atau 0,83% dari realisasi TA 2017 sebesar Rp1.974.172.838,00.

7.5.1.3.1	Belanja Tak Terduga	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
		2.000.000.000,00	270.759.948,00	0,00

Belanja Tak Terduga TA 2018 terealisasi sebesar Rp270.759.948,00 atau 13,54% dari anggarannya sebesar Rp2.000.000.000,00. Belanja Tak Terduga TA 2017 tidak terealisasi.

7.5.1.4	Transfer	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
		150.999.349.367,00	146.986.842.326,00	158.867.141.367,00

Transfer TA 2018 terealisasi sebesar Rp146.986.842.326,00 atau 97,34% dari anggarannya sebesar Rp150.999.349.367,00. Realisasi Transfer TA 2018 menurun sebesar Rp11.880.299.041,00 atau 7,48% dari realisasi TA 2017 terealisasi sebesar Rp158.867.141.367,00. Realisasi Transfer TA 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

7.5.1.4.1	Transfer Bagi Hasil ke Kab/Kota/Desa	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
		5.350.000.000,00	1.337.492.959,00	5.349.972.000,00

Transfer Bagi Hasil TA 2018 terealisasi sebesar Rp1.337.492.959,00 atau 25% dari anggarannya sebesar Rp5.350.000.000,00. Realisasi Transfer Bagi Hasil TA 2018 menurun sebesar Rp4.012.479.041,00 atau 75% dari realisasi TA 2017 terealisasi sebesar Rp5.349.972.000,00. Transfer Bagi Hasil TA 2018 dan 2017 terdiri dari:

7.5.1.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
		3.250.000.000,00	812.493.000,00	3.249.972.000,00

Bagi Hasil Pajak TA 2018 terealisasi sebesar Rp812.493.000,00 atau 25% dari anggarannya sebesar Rp3.250.000.000,00. Realisasi Bagi Hasil Pajak TA 2018 menurun sebesar Rp2.437.479.000,00 atau 75% dari realisasi Bagi Hasil Pajak TA 2017 terealisasi sebesar Rp3.249.972.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

7.5.1.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	Anggaran 2018	Realisasi 2018	Realisasi 2017
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
		0,00	0,00	0,00

Bagi Hasil Retribusi TA 2018 tidak dianggarkan dan terealisasi. Realisasi Bagi Hasil Retribusi TA 2017 sebesar Rp0,00.

7.5.1.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	Anggaran 2018	Realisasi 2018	Realisasi 2017
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
		2.100.000.000,00	524.999.959,00	2.100.000.000,00

Bagi Hasil Pendapatan Lainnya TA 2018 terealisasi sebesar Rp524.999.959,00 atau 25% dari anggarannya sebesar Rp2.100.000.000,00. Bagi Hasil Pendapatan Lainnya TA 2017 terealisasi sebesar Rp2.100.000.000,00.

7.5.1.4.2	Transfer Bantuan Keuangan	Anggaran 2018	Realisasi 2018	Realisasi 2017
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
		145.649.349.367,00	145.649.349.367,00	153.517.169.367,00

Transfer Bantuan Keuangan TA 2018 terealisasi sebesar Rp145.649.349.367,00 atau 100% dari anggarannya Rp145.649.349.367,00. Transfer Bantuan Keuangan TA 2018 menurun sebesar Rp7.867.820.000,00 atau 5,13% dari realisasi Transfer Bantuan Keuangan TA 2017 terealisasi sebesar Rp153.517.169.367,00. Transfer Bantuan Keuangan TA 2018 dan TA 2017 terdiri dari :

7.5.1.4.2.1	Bantuan Keuangan ke Pemda Lainnya	Anggaran 2018	Realisasi 2018	Realisasi 2017
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
		144.947.050.000,00	144.947.050.000,00	152.814.870.000,00

Transfer Bantuan Keuangan TA 2018 terealisasi sebesar Rp144.947.050.000,00 atau 100% dari anggarannya Rp144.947.050.000,00. Transfer Bantuan Keuangan TA 2018 menurun sebesar Rp7.867.820.000,00 atau 5,15% dari realisasi Transfer Bantuan Keuangan TA 2017 sebesar Rp152.814.870.000,00. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan TA 2018 dan TA 2017 terdiri dari :

No	Rincian Belanja	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Bantuan keuangan kepada Desa dan Kelurahan	144.947.050.000,00	144.947.050.000,00	152.814.870.000,00	(7.867.820.000,00)	(5,15)
	Jumlah	144.947.050.000,00	144.947.050.000,00	152.814.870.000,00	(7.867.820.000,00)	(5,15)



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

7.5.1.4.2.2	Bantuan Keuangan Lainnya	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
		702.299.367,00	702.299.367,00	702.299.367,00

Transfer Bantuan Keuangan Lainnya TA 2018 terealisasi sebesar Rp702.299.367,00 atau 100% dari anggarannya Rp702.299.367,00. Transfer Bantuan Keuangan Lainnya TA 2017 terealisasi sebesar Rp702.299.367,00. Realisasi tersebut merupakan bantuan keuangan kepada partai politik pemenang Pemilu tahun 2014 sebanyak 11 partai.

7.5.1.3 Pembiayaan

Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Realisasi Pembiayaan Netto TA 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp15.128.274.817,26 dan Rp242.244.573.933,50. Rincian realisasi Pembiayaan Netto TA 2018 dan 2017 sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
- Penerimaan Pembiayaan	22.050.916.317,26	22.453.274.817,26	251.964.573.933,50	(229.511.299.116,24)	(91,09)
- Pengeluaran Pembiayaan	(7.325.000.000,00)	(7.325.000.000,00)	(9.720.000.000,00)	2.395.000.000,00	(24,64)
Pembiayaan Netto	14.725.916.317,26	15.128.274.817,26	242.244.573.933,50	(227.116.299.116,24)	(93,75)

Uraian penerimaan dan pengeluaran pembiayaan adalah sebagai berikut:

7.5.1.3.1	Penerimaan Pembiayaan	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
		22.050.916.317,26	22.453.274.817,26	251.964.573.933,50

Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2018 dan 2017 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Penggunaan SILPA	20.725.916.317,26	20.725.916.317,26	250.880.548.933,50	(230.154.632.616,24)	(91,74)
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Dana Talangan	1.325.000.000,00	1.727.358.500,00	1.084.025.000,00	643.333.500,00	59,35
	Jumlah	22.050.916.317,26	22.453.274.817,26	251.964.573.933,50	(229.511.299.116,24)	(91,09)

Realisasi Penggunaan SILPA TA 2018 sebesar Rp20.725.916.317,26 dan TA 2017 sebesar Rp250.880.548.933,50.

Realisasi Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Dana Talangan TA 2018 sebesar Rp1.727.358.500,00 dan TA 2017 sebesar Rp1.084.025.000,00 merupakan pengembalian pinjaman Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP).

7.5.1.3.2	Pengeluaran Pembiayaan	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
		7.325.000.000,00	7.325.000.000,00	9.720.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

Pengeluaran Pembiayaan TA 2018 terealisasi sebesar Rp7.325.000.000,00 atau 100% dari anggarannya sebesar Rp7.325.000.000,00. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2018 menurun sebesar Rp2.395.000.000,00 atau 24,64% dari realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2017 sebesar Rp9.720.000.000,00. Rincian Pengeluaran Pembiayaan TA 2018 dan 2017 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	8.000.000.000,00	(2.000.000.000,00)	25,00
2	Pemberian Pinjaman Daerah-Dana Talangan kepada Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP)	1.325.000.000,00	1.325.000.000,00	1.720.000.000,00	(395.000.000,00)	22,97
Jumlah		7.325.000.000,00	7,325,000,000,00	9.720.000.000,00	2.395.000.000,00	24,64

Realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah TA 2018 sebesar Rp6.000.000.000,00 merupakan tambahan penyertaan modal pada PDAM.

Penambahan penyertaan modal untuk PDAM berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2018 dengan SP2D Nomor 1068/SP2D/LS/03/PPKD/2018 tanggal 25 April 2018 yang merupakan dana talangan karena merupakan hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum yang diterima Pemerintah daerah tanggal 21 Desember 2018.

Realisasi Pemberian Pinjaman Daerah TA 2017 sebesar Rp1.325.000.000,00 merupakan realisasi pemberian pinjaman dana talangan kepada kelompok Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) di wilayah Kabupaten Kotabaru berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188.45/179/KUM/2018 tanggal tentang Penerima Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan dan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan masyarakat untuk Pengendalian harga Gabah/Beras Tingkat Petani di Kabupaten Kotabaru tahun anggaran 2018 dengan rincian:

No	Kecamatan	Nama LUEP	Nama Ketua	Nama Desa/Kelurahan	Besarnya (Rp) Realisasi
1	Pulau Laut Timur	Hasil Perjuangan	Hamdan	Teluk Mesjid	180.000.000,00
2	Pulau Laut Timur	Sumber Rejeki	Safuruddin	Sungai Limau	200.000.000,00
3	Pamukan Selatan	Sari Mulya Tani	Kasman	Talusi	200.000.000,00
4	Pamukan Selatan	Agri Jaya	Ibramsyah	Gunung Calang	200.000.000,00
5	Pamukan Selatan	Tani Sejahtera	Warja	Gunung Calang	200.000.000,00
6	Pulau Laut Timur	Pemula Jaya	Antung Muhammad	Langkang Lama	170.000.000,00
7	Kelumpang Selatan	Pemula Asih	Suli Sarwono	Bumi asih	100.000.000,00
8	Pulau Laut Tengah	Sipatuo	Samsia	Salino	75.000.000,00
Jumlah					1.325.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

7.5.1.3.3 SiLPA Tahun Berjalan	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
	0,00	10.378.186.304,82	20.725.916.317,26

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp10.378.186.304,82 dan Rp20.725.916.317,26 dengan rincian sebagai berikut:

	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
Pendapatan	1.657.265.505.038,74	1.438.559.208.141,26	1.378.614.173.971,74
Belanja	1.671.991.421.356,00	1.443.309.296.653,70	1.600.132.831.587,98
Surplus/ (Defisit)	(14.725.916.317,26)	(4.750.088.512,44)	(221.518.657.616,24)
Penerimaan Pembiayaan	22.050.916.317,26	22.453.274.817,26	251.964.573.933,50
Pengeluaran Pembiayaan	7.325.000.000,00	7.325.000.000,00	9.720.000.000,00
Pembiayaan Netto	14.725.916.317,26	15.128.274.817,26	242.244.573.933,50
SiLPA Tahun Berjalan	0,00	10.378.186.304,82	20.725.916.317,26

Pada realisasi SiLPA tahun berjalan terdapat transaksi sebesar Rp10.378.186.304,82 masih terdapat kas di bendahara pengeluaran yang dikoreksi ke aset lainnya yaitu atas kas di bendahara pengeluaran pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air tahun 2017 sebesar Rp177.915.413,00 yang belum disetor ke kas daerah sampai dengan 31 Desember 2018 dan telah terdapat Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak.



7.5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

7.5.2.1 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan SAL tahun 2018 dan 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut:

7.5.2.1.1 Saldo Anggaran Lebih Awal	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
	20.725.916.317,26	250.880.548.933,50

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi SiLPA tahun anggaran sebelumnya, Saldo Anggaran Lebih Awal per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp20.725.916.317,26 dan Rp250.880.548.933,50 dengan rincian sebagai berikut :

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
Saldo Kas di Kas Daerah	1.237.264.619,87	235.390.491.212,51
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	458.012.913,00	30.000.000,00
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan	104.740.679,00	1.800.000,00
Saldo Kas di FKTP	3.194.557.983,30	3.548.943.527,90
Saldo Kas di BLUD	14.991.703.349,09	11.909.314.193,09
Saldo Kas di BOS	3.787.642.540,00	0,00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	(3.100.685.979,00)	0,00
Kelebihan Debet oleh Bank	52.680.212,00	0,00
Jumlah	20.725.916.317,26	250.880.548.933,50

7.5.2.1.2 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
	20.725.916.317,26	250.880.548.933,50

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tahun 2018 dan 2017 sebesar Rp20.725.916.317,26 dan Rp250.880.548.933,50 merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2017 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2018 sebesar Rp20.725.916.317,26.



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

7.5.2.1.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 31 Desember 2018 31 Desember 2017
(SILPA) Tahun Berjalan (Rp) (Rp)

10.378.186.304,82 20.725.916.317,26

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp10.378.186.304,82 dan Rp20.725.916.317,26 dapat diuraikan sebagai berikut:

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
- Defisit Anggaran	(4.750.088.512,44)	(221.518.657.616,24)
- Pembiayaan Netto	15.128.274.817,26	242.244.573.933,50
Silpa Tahun Berjalan	10.378.186.304,82	20.725.916.317,26

7.5.2.1.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan 31 Desember 2018 31 Desember 2017
Tahun Sebelumnya (Rp) (Rp)

0,00 0,00

Tidak ada koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, baik di tahun 2018 maupun tahun 2017.

7.5.2.1.5 Lain-lain 31 Desember 2018 31 Desember 2017
(Rp) (Rp)
(0,00) (0,00)

Tahun 2018 tidak terdapat transaksi yang mempengaruhi Saldo Anggaran Lebih baik di tahun 2018 maupun tahun 2017.

7.5.2.1.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir 31 Desember 2018 31 Desember 2017
(Rp) (Rp)
10.378.186.304,82 20.725.916.317,26

Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp10.378.186.304,82 dan Rp20.725.916.317,26 dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
Saldo Anggaran Lebih Awal	20.725.916.317,26	250.880.548.933,50
Penggunaan Saldo Anggaran Lebih	20.725.916.317,26	(250.880.548.933,50)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	10.378.186.304,82	20.725.916.317,26
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
Lain-lain	0,00	0,00
Jumlah	10.378.186.304,82	20.725.916.317,26

Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp10.378.186.304,82 dan Rp20.725.916.317,26 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
Saldo Kas di Kas Daerah	3.369.986.702,41	1.237.264.619,87
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	1.000.000,00	458.012.913,00
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan	14.864.306,00	104.740.679,00
Saldo Kas di BLUD	616.547.906,81	14.991.703.349,09
Saldo Kas di FKTP	2.841.173.453,60	3.194.557.983,30
Saldo Kas di Bendahara BOS	3.424.179.156,00	3.787.642.540,00
Utang PFK yg belum disetor	(67.480.633,00)	(3.100.685.979,00)
Koreksi Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran tahun lalu	177.915.413,00	0,00
Kelebihan Debet oleh Bank	0,00	52.680.212,00
Jumlah	10.378.186.304,82	20.725.916.317,26

Saldo akhir kas di Bendahara Penerimaan TA 2018 sebesar Rp14.864.306,00 dan TA 2017 Rp104.740.679,00 diakui sebagai bagian dari Saldo Anggaran Lebih Akhir TA 2018 dan TA 2017, karena Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kotabaru mengatur bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima baik langsung oleh BUD maupun pendapatan yang diterima melalui bendahara penerimaan.

Saldo akhir kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.000.000,00 pada Sekretariat KPU sedangkan koreksi Saldo kas di Bendahara Pengeluaran tahun 2017 sebesar Rp177.915.413,00 adalah sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air yang belum disetor sampai dengan 31 Desember 2018, sehingga masih tercatat di Silpa tahun 2017. Karena Sisa kas tersebut sudah diterbitkan SKTJM dengan jangka waktu 2 tahun sehingga sisa kas di bendahara pengeluaran Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air direklasifikasi ke aset lainnya di tahun 2017.



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

7.5.3 NERACA

7.5.3.1 Aset

7.5.3.1.1 Aset Lancar

7.5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
	3.369.986.702,41	1.237.264.619,87

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp3.369.986.702,41 dan Rp1.237.264.619,87. Saldo Kas Daerah per 31 Desember 2018 berada pada Rekening Bank Kalsel Cabang Kotabaru, Bank BRI Cabang Kotabaru, dan Deposito pada Bank Kalsel Cabang Kotabaru. Saldo Kas di Kas Daerah terdiri dari:

Nama Rekening	Nomor Rekening	31 Des 2018 (Rp)	31 Des 2017 (Rp)
Kas di Bank			
Bank Kalsel Cabang Kotabaru			
-Rekening Pendapatan Asli Daerah	03.00.03.00008.3	0,00	0,00
-Rekening Dana Alokasi Umum	03.00.03.00005.5	1.606.202.896,17	353.605.345,63
-Rekening Dana Bagi Hasil	03.00.03.00009.4	0,00	0,00
BRI Cabang Kotabaru	012701000631-30-4	1.763.783.806,24	883.659.274,24
Jumlah Kas di Bank		3.369.986.702,41	1.237.264.619,87
Setara Kas			
Bank Kalsel Cabang Kotabaru			
-Deposito	03.04.01.01437.7	0,00	0,00
-Deposito	03.04.01.01438.0	0,00	0,00
-Deposito	03.04.01.01439.7	0,00	0,00
-Deposito	03.04.01.01459.1	0,00	0,00
-Deposito	03.04.01.01460.3	0,00	0,00
Jumlah Setara Kas		0,00	0,00
Jumlah Kas		3.369.986.702,41	1.237.264.619,87

Dalam saldo kas di kas daerah terdapat saldo utang PFK tahun 2017 sebesar Rp67.480.633,00 atas SP2D tahun 2017, yang telah disetor kas pada tanggal 13 Maret 2019.



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

Pada tanggal 27 Desember 2018 Bendahara Umum Daerah melalui Sekretaris Daerah menarik dana dari Rumah Sakit Umum Daerah (Badan Layanan Umum Daerah) sebesar Rp11.000.000.000,00 dan dana tersebut sudah dilakukan pemindahbukuan dari rekening 003.00.03.00005.5 atas nama Kas Umum Daerah ke rekening 003.00.04.000839.1 atas nama Kas bendahara Penerima BLUD RSUD pada rekening Bank KalSel Cabang Kotabaru tanggal 20 Pebruari 2019 berdasarkan SuratKepala BPKAD Nomor 950/97/BPKAD/2019 perihal Permohonan pemindahbukuan tanggal 14 Pebruari 2019.

7.5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
	1.000.000,00	280.097.500,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 dan Rp280.097.500,00.

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 dengan rincian:

No	SKPD	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	97.500,00
2	Dinas Pemuda dan Olahraga	0,00	30.000.000,00
3	Sekretariat Daerah	0,00	250.000.000,00
4	Sekretariat KPU	1.000.000,00	0,00
Jumlah		1.000.000,00	280.097.500,00

Kas di Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum sudah disetor ke kas daerah tanggal 3 Januari 2019. Pada Dinas Kesehatan terdapat saldo kas di rekening Koran bank sebesar Rp10.899,00, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan sebesar Rp289.864,00, Kecamatan Pulau Sembilan sebesar Rp50,00 dan pada Kecamatan Pamukan Barat sebesar Rp800,00. Saldo kas tersebut merupakan uang Bendahara Pengeluaran yang pada saat pembayaran kepada pihak ketiga menggunakan uang Bendahara pribadi.

7.5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
	14.864.306,00	104.740.679,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2018 Rp14.864.306,00 dan per 31 Desember 2017 Rp104.740.679,00 dengan rincian:

No	SKPD	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	10.464.306,00	66.070.944,00
2	Dinas Lingkungan Hidup	4.400.000,00	6.988.000,00
3	Dinas Perhubungan	0,00	6.924.000,00
4	Dinas Perikanan	0,00	826.000,00
5	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	0,00	11.818.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

6	Dinas Perdagangan	0,00	3.140.000,00
7	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	0,00	8.973.235,00
Jumlah		14.864.306,00	104.740.679,00

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2018 adalah Penerimaan pada Dinas Kesehatan yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Pemakaian Kekayaan Daerah pada FKTP yang telah disetor ke kas daerah tanggal 4 dan 8 Januari 2019, pada Dinas Lingkungan Hidup yaitu Retribusi Parkir dan Retribusi Tempat Priwisata yang disetorkan ke kas daerah tanggal 2 Januari 2019.

7.5.3.1.1.4	Kas di BLUD	31 Desember 2018	31 Desember 2017
		(Rp)	(Rp)
		616.547.906,81	14.991.703.349,09

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp616.547.906,81 dan Rp14.991.703.349,09. Tahun 2015 RSUD Kotabaru berubah status menjadi BLUD sehingga saldo kasnya disajikan terpisah dengan saldo kas di kas daerah karena pendapatannya tidak disetorkan ke kas daerah.

7.5.3.1.1.5	Kas di FKTP	31 Desember 2018	31 Desember 2017
		(Rp)	(Rp)
		2.841.173.453,60	3.194.557.983,30

Saldo Kas di FKTP per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp2.841.173.453,60 dan Rp3.194.557.983,30, telah sesuai dengan laporan Bendahara FKTP yang disampaikan ke Dinas Kesehatan per 31 Desember 2018. Rincian saldo kas di FKTP sebagai berikut :

Saldo Awal	: Rp3.194.557.983,30
Pendapatan	: <u>Rp5.678.966.406,00</u> (+)
Total Pendapatan	: Rp8.873.524.389,30
Total Belanja	: <u>Rp6.032.350.935,70</u> (-)
Saldo kas	: Rp2.841.173.453,60

Saldo akhir berdasarkan saldo bank dan tunai yaitu sebesar Rp2.841.173.453,60 (Rp2.487.593.112,10 + Rp353.580.341,50), sehingga tidak terdapat selisih.

Rincian pada Lampiran 1.

7.5.3.1.1.6	Kas di Bendahara BOS	31 Desember 2018	31 Desember 2017
		(Rp)	(Rp)
		3.424.179.156,00	3.787.642.540,00

Saldo Kas di Bendahara BOS untuk tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp3.424.179.156,00 dan Rp3.787.642.540,00. Untuk saldo Kas tahun 2017 menjadi saldo awal tahun 2018 di sekolah. Pada tahun 2018 pendapatan dan belanja hibah BOS sudah dianggarkan di APBD Perubahan yang sesuai dengan



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

Surat Pengesahan Hibah Langsung melalui pengesahan BUD yang diajukan oleh Dinas Pendidikan.

Saldo akhir BOS pusat sebesar Rp3.424.179.156,00 merupakan sisa dana BOS pusat pada 279 Sekolah Negeri (SD dan SMP). Rincian Sisa Kas di Bendahara BOS sebagai berikut:

Saldo Awal	: Rp3.787.642.540,00
Pendapatan	: <u>Rp37.688.329.910,00 (+)</u>
Total Pendapatan	: Rp41.475.972.450,00
Total Belanja	: <u>Rp38.051.793.294,00 (-)</u>
Saldo kas	: Rp3.424.179.156,00

Saldo akhir berdasarkan saldo bank dan tunai yaitu sebesar Rp3.424.179.156,00 yang didalamnya masih terdapat pendapatan bunga bank atau giro sebesar Rp20.091.305,00 dari jumlah yang seharusnya Rp3.404.087.851,00

Rincian pada Lampiran 2.

7.5.3.1.1.7	Kas Lain-lain	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
		<u>0,00</u>	<u>68.100.152,00</u>

Saldo Kas Lain-lain per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp68.100.152,00

Untuk tahun 2018 saldo kas BOS pendamping yang melalui SP2D LS seharusnya sudah di pertanggungjawabkan sampai dengan 31 Desember 2018, karena kas BOS pendamping bukan merupakan bagian dari Silpa.

Namun per 31 Desember 2018 terdapat saldo akhir kas BOS pendamping yang masih ada di kas bank maupun tunai sebesar Rp143.705.461,00 terdiri dari kas akhir BOS Pendamping yang masih ada di SD Rp136.819.648,00 dan sebesar Rp6.885.813,00 adalah saldo akhir BOS pendamping yang masih ada di SMP.

7.5.3.1.1.8	Piutang Pajak Daerah	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
		<u>16.389.916.022,63</u>	<u>15.267.193.804,26</u>

Akun Piutang Pajak menggambarkan hak Pemerintah Daerah dari pajak Daerah yang sampai dengan 31 Desember 2017 belum diterima pendapatannya. Piutang pajak tersebut terdiri dari:

No	Piutang Pajak Daerah	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1	Piutang PBB - P2	16.188.952.887,00	15.050.260.782,00
2	Piutang Galian C Mineral Bukan Logam dan Batuan	200.963.135,63	216.933.022,26
Jumlah		16.389.916.022,63	15.267.193.804,26



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

Kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Kotabaru mengatur mengenai penyisihan piutang pajak sebagai berikut:

- Umur piutang < 1 tahun disisihkan sebesar 0,5%
- Umur piutang 1 – 2 tahun disisihkan sebesar 10%
- Umur piutang 2 – 5 tahun disisihkan sebesar 50%
- Umur piutang > 5 tahun disisihkan sebesar 100%

- a. Piutang PBB - P2 tahun 2018 dan 2017 sebesar Rp16.188.952.887,00 dan Rp15.050.260.782,00 merupakan pengalihan dari KPP Pratama Batulicin tahun 2013 dan sebelumnya serta piutang PBB-P2 berdasarkan ketentuan pajak yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru mulai tahun 2014 serta Wajib Pajak Baru Tahun 2017. Rincian mutasi piutang PBB tahun 2018 dan penyisihannya sebagaimana berikut:

No	Umur Piutang	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	< 1 Tahun	0,00	2.922.062.049,00	1.630.910.854,00	1.291.151.195,00
2	1 - 2 Tahun	1.222.028.862,00	0,00	48.577.555,00	1.173.451.307,00
3	2 – 5 Tahun	2.820.131.639,00	0,00	28.167.960,00	2.791.963.679,00
4	> 5 Tahun	11.008.100.281,00	0,00	75.713.575,00	10.932.386.706,00
Jumlah		15.050.260.782,00	2.922.062.049,00	1.783.369.944,00	16.188.952.887,00

Penyisihan piutang berdasarkan kelompok umur piutang sebagai berikut:

No	Umur Piutang	Saldo Piutang	Penyisihan	Piutang Netto
1	< 1 Tahun	1.291.151.195,00	6.455.755,98	1.284.695.439,02
2	1 - 2 Tahun	1.173.451.307,00	117.345.130,70	1.056.106.176,30
3	2 – 5 Tahun	2.791.963.679,00	1.395.981.839,50	1.395.981.839,50
4	> 5 Tahun	10.932.386.706,00	10.932.386.706,00	0,00
Jumlah		16.188.952.887,00	12.452.169.432,18	3.736.783.454,82

- b. Piutang Pajak Galian C Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun 2018 dan 2017 sebesar Rp200.963.135,63 dan Rp216.933.022,26 merupakan tagihan berdasarkan ketentuan pajak daerah yang masih belum dibayar sampai dengan 31 Desember 2018. Rincian mutasi piutang pajak galian C mineral bukan logam tahun 2018 dan penyisihannya sebagaimana berikut:

No	Umur Piutang	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	< 1 Tahun	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1 - 2 Tahun	142.621.156,59	0,00	15.969.886,63	126.651.269,96
3	2 – 5 Tahun	1.046.312,00	0,00	0,00	1.046.312,00
4	> 5 Tahun	73.265.553,67	0,00	0,00	73.265.553,67
Jumlah		216.933.022,26	0,00	15.969.886,63	200.963.135,63



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

Penyisihan piutang berdasarkan kelompok umur piutang sebagai berikut:

No	Umur Piutang	Saldo Piutang	Penyisihan	Piutang Netto
1	< 1 Tahun	0,00	0,00	0,00
2	1 - 2 Tahun	126.651.269,96	12.665.127,00	113.986.142,96
3	2 – 5 Tahun	1.046.312,00	523.156,00	523.156,00
4	> 5 Tahun	73.265.553,67	73.265.553,67	0,00
Jumlah		200.963.135,63	86.453.836,67	114.509.298,96

Pelimpahan dari KPP Pratama berjumlah 105.111 NOP, dari jumlah tersebut telah dilakukan validasi dengan bantuan petugas pendata, RT dan Kepala Desa diseluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Kotabaru, akan tetapi hasil data validasi tersebut yang baru masuk ke Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebanyak 79.379 NOP.

Validasi Piutang PBB P2 yang dilaksanakan di tahun 2017 dari 79.379 NOP yang masuk sampai akhir tahun 2017 telah diverifikasi oleh TIM dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebanyak 29.543 NOP. Dari 29.543 NOP tersebut yang masuk dalam kategori 1, 2 dan 3 sebanyak 7.564 NOP direncanakan akan dihapuskan sesuai draf Surat Keputusan Penghapusan Piutang pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan, untuk Kategori 4 yang akan ditagih sebanyak 21.979 NOP.

Hasil validasi data PBB P2 yang telah masuk sampai akhir tahun 2017 tersisa sebanyak 49.836 NOP dan tahun 2018 telah dianggarkan kembali untuk diverifikasi oleh Tim dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah ke Validan datanya.

7.5.3.1.1.9 Piutang Retribusi Daerah

**31 Desember 2018
(Rp)**

**31 Desember 2017
(Rp)**

550.738.398,00

579.846.202,00

Akun Piutang Retribusi merupakan hak Pemerintah Daerah dari pengenaan retribusi daerah yang sampai 31 Desember 2018 belum diterima pembayarannya. Saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp550.738.398,00 dan Rp579.846.202,00 terdiri dari:

SKPD	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
Dinas Pendapatan Daerah	0,00	360.000,00
Dinas Perdagangan	550.738.398,00	579.486.202,00
k Jumlah	550.738.398,00	579.846.202,00

e

Kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Kotabaru mengatur mengenai penyisihan piutang retribusi sebagai berikut:

- Umur piutang 0 – 3 bulan disisihkan sebesar 0,5%
- Umur piutang 3 – 6 bulan disisihkan sebesar 10%
- Umur piutang 6 – 12 bulan disisihkan sebesar 50%



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

- Umur piutang > 12 bulan disisihkan sebesar 100%
- a. Piutang Retribusi pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah adalah Piutang Retribusi Sewa Rumah Dinas sebesar Rp360.000,00 di tahun 2017 yang sudah disetor ke kas daerah tanggal 4 Januari 2018
- b. Piutang Retribusi pada Dinas Perdagangan per 31 Desember 2018 sebesar Rp550.738.398,00 merupakan piutang retribusi pasar grosir/pertokoan. Rincian mutasi piutang retribusi pasar tahun 2017 dan penyisihannya sebagaimana berikut:

No	Umur Piutang	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	0 – 3 bulan	0,00	18.480.375,00	13.700.325,00	4.780.050,00
2	3 – 6 bulan	0,00	18.147.900,00	6.532.650,00	11.615.250,00
3	6 – 12 bulan	0,00	65.821.025,00	10.210.900,00	55.610.125,00
4	> 12 bulan	579.486.202,00	0,00	100.753.229,00	478.732.973,00
Jumlah		579.486.202,00	102.449.300,00	131.197.104,00	550.738.398,00

Penyisihan piutang retribusi pasar per 31 Desember 2017 berdasarkan berdasarkan kelompok umur piutang sebagai berikut:

No	Umur Piutang	Saldo Piutang	Penyisihan	Piutang Netto
1	0 – 3 bulan	4.780.050,00	23.900,25	4.756.149,75
2	3 – 6 bulan	11.615.250,00	1.161.525,00	10.453.725,00
3	6 – 12 bulan	55.610.125,00	27.805.062,50	27.805.062,50
4	> 12 bulan	478.732.973,00	478.732.973,00	0,00
Jumlah		550.738.398,00	507.723.460,75	43.014.937,25

7.5.3.1.1.10 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

**31 Desember 2018
(Rp)**

**31 Desember 2017
(Rp)**

9.125.023.553,67

11.842.886.439,26

Piutang lain-lain PAD yang sah tahun 2018 sebesar Rp9.125.023.553,67 terdiri dari:

- Piutang BLUD Rp8.996.272.802,00
- Piutang Denda Pajak Rp73.006.640,69
- Piutang Denda Retribusi Rp43.574.310,98
- Hasil Penjualan BMD Rp12.169.800,00

Jumlah

Rp9.125.023.553,67

Piutang BLUD sebesar Rp8.996.272.802,00 merupakan piutang atas jasa pelayanan yang sampai dengan 31 Desember 2018 belum diterima oleh BLUD. Piutang BLUD tahun 2018 merupakan tagihan kepada pihak ketiga dari bulan Januari – Desember 2018. Piutang BLUD disisihkan mengikuti mekanisme



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

penyisihan piutang retribusi daerah. Rincian mutasi piutang BLUD Tahun 2018 dan penyisihannya sebagaimana berikut:

No	Umur Piutang	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	0 – 3 bulan	0,00	8.571.139.216,00	0,00	8.571.139.216,00
2	3 – 6 bulan	0,00	118.263.497,00	0,00	118.263.497,00
3	6 – 12 bulan	0,00	112.426.940,00	0,00	112.426.940,00
4	> 12 bulan	11.739.035.679,00	0,00	11.544.592.530,00	194.443.149,00
Jumlah		11.739.035.679,00	8.801.829.653,00	11.544.592.530,00	8.996.272.802,00

Penyisihan piutang BLUD pasar berdasarkan berdasarkan kelompok umur piutang sebagai berikut:

No	Umur Piutang	Saldo Piutang	Penyisihan	Piutang Netto
1	0 – 3 bulan	8.571.139.216,00	42.855.696,08	8.528.283.519,92
2	3 – 6 bulan	118.263.497,00	11.826.349,70	106.437.147,30
3	6 – 12 bulan	112.426.940,00	56.213.470,00	56.213.470,00
4	> 12 bulan	194.443.149,00	194.443.149,00	0,00
Jumlah		8.996.272.802,00	305.338.664,78	8.690.934.137,22

Piutang denda pajak sebesar Rp73.006.640,69 merupakan denda pajak Mineral Bukan Logam atas keterlambatan pembayaran oleh wajib pajak yang sampai dengan 31 Desember 2018 belum diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru, untuk PBB P2 tidak ada piutang denda pajak tahun 2018.

Rincian Mutasi Piutang Denda Pajak tahun 2018 dan penyisihannya sebagaimana berikut:

No	Umur Piutang	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	< 1 Tahun	0,00	31.939.786,59	31.939.786,59	0,00
2	1 - 2 Tahun	14.262.145,04	31.422.617,41	3.833.490,00	41.851.272,45
3	2 – 5 Tahun	251.144,88	0,00	0,00	251.144,88
4	> 5 Tahun	30.904.223,36	0,00	0,00	30.904.223,36
Jumlah		45.417.513,28	63.362.404,00	35.773.276,59	73.006.640,69

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kotabaru mengatur penyisihan piutang denda pajak dengan perhitungan sama dengan penyisihan piutang pajak.

Rincian penyisihan denda pajak Mineral Bukan Logam sebagai berikut:

No	Umur Piutang	Saldo Piutang	Penyisihan	Piutang Netto
1	< 1 Tahun	0,00	0,00	0,00
2	1 - 2 Tahun	41.851.272,45	4.185.127,25	37.666.145,21
3	2 – 5 Tahun	251.144,88	125.572,44	125.572,44
4	> 5 Tahun	30.904.223,36	30.904.223,36	0,00
Jumlah		73.006.640,69	35.214.923,05	37.791.717,65



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

Piutang denda retribusi sebesar Rp43.574.310,98 terdiri dari:

- Piutang denda retribusi sewa rumah dinas Rp 0,00
- Piutang denda retribusi pasar Rp43.574.310,98

Jumlah Rp43.574.310,98

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kotabaru mengatur penyisihan piutang denda retribusi sama dengan perhitungan penyisihan piutang retribusi.

Piutang denda retribusi sewa rumah dinas merupakan piutang sejak tahun 2011 sudah disetor ke kas daerah tanggal 4 Januari 2019.

No	Umur Piutang	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	0 – 3 bulan	0,00	369.607,50	274.006,50	95.601,00
2	3 – 6 bulan	0,00	363.058,00	130.653,00	232.405,00
3	6 – 12 bulan	0,00	1.316.420,50	204.218,00	1.112.202,50
4	> 12 bulan	46.090.645,98	0,00	3.956.543,50	42.134.102,48
Jumlah		46.090.645,98	2.049.086,00	4.565.421,00	43.574.310,98

Rincian penyisihan denda piutang retribusi pasar dan sewa rumah dinas sebagai berikut:

No	Umur Piutang	Saldo Piutang	Penyisihan	Piutang Netto
1	0 – 3 bulan	95.601,00	478,01	95.122,99
2	3 – 6 bulan	232.405,00	23.240,50	209.164,50
3	6 – 12 bulan	1.112.202,50	556.101,25	556.101,25
4	> 12 bulan	42.134.102,48	42.134.102,48	0,00
Jumlah		43.574.310,98	42.713.922,24	860.388,74

Piutang hasil penjualan BMD sebesar Rp12.169.800,00 merupakan piutang atas penjualan barang milik daerah pada tahun 2010. Kebijakan Akuntansi mengatur mengenai penyisihan piutang hasil penjualan BMD sama dengan perhitungan retribusi daerah sehingga atas piutang tersebut telah disisihkan tahun 2015 sebesar Rp12.169.800,00 (100%).

Piutang Klaim Jaminan Pelaksanaan pada tahun 2016 sebesar Rp3.049.734.050,00 dikeluarkan dari Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada tahun 2016 berikut dengan penyisihannya dilakukan koreksi karena tidak tepat diklasifikasikan sebagai piutang. Hal ini didasarkan Buletin Teknis Nomor 20 tentang Kerugian Daerah/Negara yang menyatakan bahwa pengakuan atas Piutang di neraca pada saat terbitnya Surat Keputusan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan pejabat yang berwenang.

Tahun 2018 tidak ada pengembalian piutang klaim jaminan pelaksanaan.



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

7.5.3.1.1.11 Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
	49.768.252.852,07	28.055.468.603,64

Akun Piutang Dana Bagi Hasil merupakan hak Pemerintah Daerah dari dana Bagi Hasil Provinsi Triwulan III dan IV yang sampai 31 Desember 2018 belum diterima oleh Pemerintah Daerah, Piutang Dana Bagi Hasil diakui berdasarkan Peraturan Gubernur yang dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam peraturan tersebut. Secara umum unsure utama piutang karena didasarkan atas ketentuan ini adalah pendapatan. Oleh karena itu setiap tagihan oleh Pemerintah wajib ada keputusan Gubernur, maka jumlah piutang yang menjadi hak Pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan penagihan yang bersangkutan.

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
PBB-KB	41.652.748.823,28	21.386.608.933,45
PKB dan BBNKB	5.499.867.022,82	4.314.928.797,29
Pajak Air Permukaan	21.013.077,45	36.730.178,58
Pajak Rokok	2.594.623.928,52	2.317.200.694,32
Jumlah	49.768.252.852,07	28.055.468.603,64

Rincian Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi sebesar Rp49.768.252.852,07 berdasarkan:

1. Peraturan Gubernur Nomor 090 Tahun 2018 tentang Bagi hasil Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor bulan Juli sampai dengan September 2018 sebesar Rp8.900.000.000,00 yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru tanggal 30 Januari 2019
2. Peraturan Gubernur Nomor 08 Tahun 2019 tentang Bagi hasil Penerimaan Pajak Rokok bulan Oktober sampai dengan Nopember 2018 sebesar Rp2.594.623.928,52 yang telah diterima pembayarannya oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru tanggal 20 Pebruari 2019
3. Gubernur Nomor 22 Tahun 2019 tentang Bagi hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB bulan Oktober sampai dengan Nopember 2018 sebesar Rp5.499.867.022,80 yang telah diterima pembayarannya oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru tanggal 1 April 2019
4. Gubernur Nomor 23 Tahun 2019 tentang Bagi hasil Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor bulan Oktober sampai dengan Nopember 2018 sebesar Rp32.752.748.823,28 yang telah diterima pembayarannya oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru tanggal 1 April 2019
5. Gubernur Nomor 24 Tahun 2019 tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Air Permukaan bulan Oktober sampai dengan Nopember 2018 sebesar Rp21.013.077,45 yang telah diterima pembayarannya oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru tanggal 1 April 2019



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

7.5.3.1.1.12 Piutang Bagi Hasil Pemerintah Pusat

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)

	58.647.095.017,00	57.323.633.677,00
--	--------------------------	--------------------------

Piutang transfer pemerintah pusat sebesar Rp58.647.095.017,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :

No.	Jenis	Kurang Bayar	Lebih Bayar	Saldo Piutang Per 31-Des-2018
1.	pph pasal 21 dan 25	833.085.652,00	112.657.085,00	720.428.567,00
2.	pbb bagian daerah	5.883.269.972,00	730.329.504,00	5.152.940.468,00
3.	pbb upah pungut	253.936.547,00	24.344.500,00	229.592.047,00
4.	PBB Bagi Rata	576.399.155,00	0,00	576.399.155,00
5.	DBH Kehutanan (PSDH)	111.617.854,00	0,00	111.617.854,00
6.	DBH Kehutanan (DR)	33.832.798,00	0,00	33.832.798,00
7.	DBH minerba (landrent)	12.753.797.505,00	187.174.211,00	12.566.623.294,00
8.	DBH minerba (royalti)	39.755.032.597,00	244.190.391,00	39.510.842.206,00
9.	perikanan	99.184.671,00	0,00	99.184.671,00
10.	minyak 15%	0,00	11.430.892,00	(11.430.892,00)
11.	minyak 0,5%	0,00	342.935.151,00	(342.935.151,00)
	JUMLAH	60.300.156.751,00	1.653.061.734,00	58.647.095.017,00

7.5.3.1.1.13 Piutang TP/TGR

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)

	4.978.853.000,00	4.978.853.000,00
--	-------------------------	-------------------------

Piutang Tuntutan Perbendaharaan /Tuntutan Ganti Rugi diakui berdasarkan hasil Keputusan Perkara Pidana Tipikor Nomor 52/PID.SUS-TPK/2015/PN.Bjm tanggal 9 Mei 2016 an. Selamat, SH, M. Hum sebesar Rp4.978.853.000,00 atas Kasus dana BOS BOMM tahun 2012 – 2013. Berdasarkan hasil keputusan tersebut Piutang TP/TGR dilakukan penyisihannya selama 12 bulan.Penyisihan dihitung berdasarkan Kebijakan Akuntansi disamakan dengan perhitungan penyisihan piutang retribusi, dengan umur piutang 12 bulan disisihkan 100% sebesar Rp4.978.853.000,00. Sampai dengan Laporan Keuangan ini belum ada informasi mengenai lelang terkait sitaan.

Adapun aset yang disita yang nantinya akan dilelang dan hasilnya akan disetorkan ke kas daerah sebagai pelunasan piutang antara lain:



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

1. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian tanah seluas 10 (sepuluh) Ha yang terletak di Munggu Alung Kelurahan bangkal Kecamatan Banjarbaru Selatan dengan harga per M² (Rp50.000,00) dengan jumlah sebesar Rp5.000.000.000 yang menerima H. Muhtarum.
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (SPORADIK) An. Muhtarum dengan luas tanah 9.840 M² yang terletak di Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru
3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (SPORADIK) An. Muhtarum dengan luas tanah 8.813 M² yang terletak di Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru
4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (SPORADIK) An. Muhtarum dengan luas tanah 16.977,5 M² yang terletak di Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru
6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (SPORADIK) an. Rizal Anwari, ST dengan luas tanah 11.590 M² yang terletak di Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru
7. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (SPORADIK) an. Rizal Anwari, ST dengan luas tanah 11.590 M² yang terletak di Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru
8. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (SPORADIK) an. Rizal Anwari, ST dengan luas tanah 11.590 M² yang terletak di Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru
9. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (SPORADIK) an. Rizal Anwari, ST dengan luas tanah 15.500 M² yang terletak di Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru
- 10.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (SPORADIK) an. Rizal Anwari, ST dengan luas tanah 16.530 M² yang terletak di Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru

Nilai Piutang Tuntutan Perbendaharaan /Tuntutan Ganti Rugi masih disajikan sama dengan tahun 2017 karena belum ada penyetoran ke kas daerah.

7.5.3.1.1.14	Piutang Lainnya	31 Desember 2018	31 Desember 2017
		(Rp)	(Rp)
		732.758.606,46	1.269.856.951,46
	Piutang lainnya sebesar Rp732.758.606,46 terdiri dari:		
	- Piutang LUEP (pokok)		Rp702.850.000,00
	- Piutang LUEP (denda)		Rp 500.000,00
	- Piutang kelebihan pembayaran pajak		<u>Rp 29.408.606,46</u>
	Jumlah		Rp732.758.606,46



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

Piutang Pemberian Dana Talangan merupakan piutang kepada penerima Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) untuk pengendalian harga gabah/beras tingkat petani di Kabupaten Kotabaru. Saldo piutang DPM-LUEP sampai dengan tahun 2018 sebesar Rp702.850.000,00 yang terdiri dari sisa tunggakan dana talangan:

- Tahun 2008	Rp 7.850.000,00
- Tahun 2015	Rp 45.000.000,00
- Tahun 2016	Rp210.000.000,00
- Tahun 2017	Rp 45.000.000,00
- Tahun 2018	<u>Rp395.000.000,00</u>
Jumlah	Rp702.850.000,00

Rincian piutang tersebut sebagai berikut:

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
- Saldo Awal	1.119.850.000,00	482.850.000,00
- Koreksi Saldo Awal	(15.000.000,00)	0,00
- Pemberian Dana Talangan	1.325.000.000,00	1.720.000.000,00
- Pengembalian Dana Talangan	(1.727.000.000,00)	(1.083.000.000,00)
Saldo akhir	702.850.000,00	1.119.850.000,00

Rincian Mutasi Piutang Lainnya tahun 2018 dan penyisihannya sebagaimana berikut:

No	Umur Piutang	Saldo Awal	Koreksi Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
				Tambah	Kurang	
1	0 – 3 bulan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3 – 6 bulan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	6 – 12 bulan	0,00	0,00	1.325.000.000,00	930.000.000,00	395.000.000,00
4	> 12 bulan	1.119.850.000,00	15.000.000,00	0,00	797.000.000,00	307.850.000,00
Jumlah		1.119.850.000,00	15.000.000,00	1.325.000.000,00	1.727.000.000,00	702.850.000,00

No	Umur Piutang	Saldo Piutang	Penyisihan	Piutang Netto
1	0 – 3 bulan	0,00	0,00	0,00
2	3 – 6 bulan	0,00	0,00	0,00
3	6 – 12 bulan	395.000.000,00	197.500.000,00	197.500.000,00
4	> 12 bulan	307.850.000,00	307.850.000,00	0,00
Jumlah		702.850.000,00	505.350.000,00	197.500.000,00

Piutang lainnya sampai dengan tahun 2017 sudah disisihkan sebesar Rp425.000,00 (100%) karena umur piutangnya sudah lebih dari 1 tahun.



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

Saldo Piutang atas Keterlambatan Pelunasan Dana Talangan per 31 Desember 2018 sebesar Rp500.000,00 merupakan sisa tagihan denda keterlambatan pembayaran dana talangan Tahun 2010 sebesar Rp250.000,00 denda keterlambatan pembayaran dana talangan Tahun 2016 sebesar Rp175.000,00 dan tahun 2017 sebesar Rp75.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
- Saldo Awal	437.500,00	1.250.000,00
- Denda Keterlambatan	421.000,00	212.500,00
- Pembayaran Denda Keterlambatan oleh debitur	(358.500,00)	(1.025.000,00)
Saldo akhir	500.000,00	437.500,00

Saldo Piutang denda LUEP sebesar Rp500.000,00 disisihkan (100%) pada tahun 2018

Piutang kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp29.408.606,46 merupakan kelebihan setoran pajak pusat (PPh) dan PPN oleh BUD yang sampai tahun 2018 belum dikompensasi maupun restitusi dengan rincian:

- Kelebihan setor tahun 2014 sebesar Rp110.270,00
- Kelebihan setor tahun 2015 sebesar Rp28.440.722,00
- Kelebihan setor tahun 2016 sebesar Rp857.614,46

Untuk piutang kelebihan pajak tahun 2014 - 2016 dilakukan penyisihan (100%) Rp29.408.606,46 (100%).

Untuk kelebihan setor pajak tahun 2017 sebesar Rp61.803.527,00 telah dikembalikan ke kas daerah tanggal 4 Januari 2018 berdasarkan Surat dari BPKAD Nomor 950/08/BPKAD tanggal 4 Januari 2018 dan untuk kelebihan pajak sebesar Rp5.677.106,00 atas SP2D yang belum cair akan dilakukan kompensasi pada kegiatan dan SKPD yang sama pada saat pembayaran di tahun 2018.

Untuk kelebihan debet yang dilakukan oleh Bank KalSel sebesar Rp52.680.212,00 sudah dikembalikan ke kas daerah tanggal 4 Januari 2018.

7.5.3.1.1.15 Persediaan

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
	19.021.967.392,26	17.968.973.815,15

Persediaan merupakan pos untuk mencatat aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Kotabaru dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual kembali dan/atau diserahkan dalam rangka untuk pelayanan kepada masyarakat dalam waktu satu tahun. Saldo Persediaan per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp19.021.967.392,26 dan



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

Rp17.968.973.815,15. Saldo Persediaan per 31 desember 2018 meningkat sebesar Rp1.052.993.557,11 atau 5,86% dari saldo Persediaan per 31 Desember 2017.

Saldo persediaan ini merupakan hasil stock opname yang dilakukan oleh pengurus barang yang berada pada SKPD berdasarkan surat pernyataan cek fisik persediaan yang dibuat para pengurus barang SKPD. Rincian saldo Persediaan TA. 2018 dan TA. 2017 per SKPD dapat dilihat pada **lampiran 2**.

Rincian Saldo Persediaan TA. 2018 & 2017

No	Jenis Persediaan	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1	ATK	236.507.107,00	209.557.346,56
2	Alat Listrik dan Elektronik	34.749.920,00	27.925.500,00
3	Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya (Cukai, Karcis)	60.023.000,00	25.245.000,00
4	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	144.645.767,40	150.897.500,00
5	Logo, Plakat, Vandel dan Sejenisnya	36.900.000,00	56.700.000,00
6	Barang Cetak (KTP, AKTE)	402.568.044,10	264.078.000,00
7	Suku Cadang	0,00	70.000.000,00
8	Bahan/Bibit Tanaman	59.850.000,00	213.340.520,00
9	Obat/Alkes Habis Pakai	10.385.385.199,76	6.590.703.056,59
10	Bahan Kimia	1.835.635.582,00	667.457.142,00
11	Bahan Pelatihan	550.000,00	2.170.500,00
12	Perlengkapan Lapangan	476.000,00	13.737.400,00
13	Barang yg diserahkan kpd Masyarakat (Hibah)	5.824.676.772,00	9.677.161.850,00
Jumlah		19.021.967.392,26	17.968.973.815,15

Untuk barang yang diserahkan kepada masyarakat masih diakui sebagai persediaan karena belum diserahkan kepada penerima hibah.

Pada Rumah Sakit Umum Kotabaru (BLUD) terdapat persediaan

7.5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

7.5.3.1.2.1 Investasi Non Permanen

7.5.3.1.2.1.1 Investasi Non Permanen Lainnya

31 Desember 2018
(Rp)

0,00

31 Desember 2017
(Rp)

0,00

Tidak ada Saldo Inventasi Non Permanen Lainnya per 31 Desember 2018 dan 2017.

7.5.3.1.2.2 Investasi Permanen

31 Desember 2018
(Rp)

145.522.045.193,60

31 Desember 2017
(Rp)

109.887.527.159,95



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

Saldo Investasi Permanen sebesar Rp145.522.045.193,60 merupakan saldo nilai investasi Pemerintah Kabupaten Kotabaru pada BUMD sampai dengan 31 Desember 2018 dengan rincian sebagai berikut:

7.5.3.1.2.1.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
	145.522.045.193,60	109.887.527.159,95

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah merupakan investasi Pemerintah Kabupaten Kotabaru pada Perusahaan Daerah/BUMD dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
1. Bank Kalsel	88.186.782.474,00	88.186.782.474,00
2. BPR Pulau Laut Utara	3.821.667.215,58	4.098.300.842,47
3. Perusahaan Daerah Air Minum Kotabaru	53.140.867.887,02	17.229.716.226,48
4. PT. Multi Usaha Pratama Saijaan (MUPS)	372.727.617,00	372.727.617,00
Jumlah	145.522.045.193,60	109.887.527.159,95

Penjelasan dari masing-masing saldo penyertaan modal sebagai berikut:

1. Penyertaan Modal pada Bank Kalsel

Kepemilikan Pemerintah Kabupaten Kotabaru pada PT. Bank Kalsel dicatat dengan Metode Biaya (*Cost Method*) karena kepemilikan Pemerintah Kabupaten Kotabaru pada PT. Bank Kalsel per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar 6,88% dan 7,53%. Saldo nilai investasi per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp88.186.782.474,00, dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
- Akumulasi modal disetor s.d. 31 Desember	88.186.782.474,00	88.186.782.474,00
- Penyetoran modal tahun berjalan	0,00	0,00
Saldo nilai investasi	88.186.782.474,00	88.186.782.474,00

Tidak ada penyetoran modal TA 2018 dan Bank KalSel Cabang Kotabaru, berdasarkan Laporan Keuangan Audited tahun 2018 terdapat 352.747 lembar saham dengan nilai resifis 32.474.

2. Penyertaan Modal pada BPR Pulau Laut Utara

Saldo Penyertaan Modal pada BPR Pulau Laut Utara per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp3.821.667.215,58 dan Rp4.098.300.842,47, dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
- Akumulasi modal disetor s.d. 31 Desember	4.098.300.842,47	1.842.197.862,43
- Koreksi Saldo Awal	(486.489.869,03)	0,00
- Penyetoran modal tahun berjalan	0,00	2.000.000.000,00
- Bagian Laba/Rugi tahun berjalan	209.856.242,14	256.102.980,04
Saldo nilai investasi	3.821.667.215,58	4.098.300.842,47

BPR Pulau Laut Utara menyatakan prosentase kepemilikan 70% pada tahun 2018 sehingga perhitungan bagian laba sebesar Rp209.856.242,14 dengan menggunakan metode ekuitas karena kepemilikan lebih dari 20%.

3. Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kotabaru (PDAM)

Kepemilikan Pemerintah Kabupaten Kotabaru pada PDAM per 31 Desember 2018 sebesar 87,14%. Pada Tahun 2018 PDAM Kotabaru mengalami kerugian, dengan bagian rugi Pemerintah Kotabaru sebesar Rp6.358.414.715,92. Penilaian saldo penyertaan modal pada PDAM Kotabaru menggunakan metode ekuitas berdasarkan pada Laporan Keuangan PDAM Tahun 2018 (audited).

Berdasarkan perhitungan dengan Metode Ekuitas (*Equity Method*), saldo nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kotabaru per 31 Desember 2018 sebesar Rp53.140.867.887,02 dikoreksi karena Laporan Keuangan PDAM kurang menyajikan saldo penyertaan modal, sehingga Saldo Penyertaan ditambah sebesar Rp36.269.566.376,46, dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
- Saldo awal tahun	17.229.716.226,48	18.814.044.504,56
- Koreksi Saldo Awal	36.269.566.376,46	(1.981.681.547,49)
- Penyetoran modal tahun berjalan	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00
- Bagian Laba/(Rugi) PDAM tahun berjalan	(6.358.414.715,92)	(5.602.646.730,59)
- Saldo akhir	53.140.867.887,02	17.229.716.226,48

4. Penyertaan Modal pada PT. Multi Usaha Pratama Saijaan (PT. MUPS)

Kepemilikan Pemerintah Kabupaten Kotabaru pada PT. Multi Usaha Pratama Saijaan (PT. MUPS) adalah sebesar 100%. Penilaian saldo penyertaan modal pada PT. MUPS menggunakan metode ekuitas berdasarkan pada laporan keuangan PT. MUPS Tahun 2015 (*unaudited*) Berdasarkan perhitungan dengan *Equity Methode*, saldo nilai penyertaan modal per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp372.727.617,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
- Saldo awal tahun	372.727.617,00	372.727.617,00
- Penyetoran modal tahun berjalan	0,00	0,00
- Bagian Laba/Rugi tahun berjalan	0,00	0,00
Jumlah	372.727.617,00	372.727.617,00

PT MUPS sampai dengan Laporan Keuangan ini terbit belum menyampaikan Laporan Keuangan Tahun 2017 dan berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Nomor 500/757/SETDA perihal PT. MUPS tidak operasional tanggal 26 April 2018 yang menyatakan tidak ada melakukan kegiatan operasional lagi dan tidak melaporkan kondisi keuangannya.

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
7.5.3.1.3 Aset Tetap	2.499.783.268.895,82	2.502.277.567.530,33

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Saldo aset tetap 31 Desember 2018 dan 2017 berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap:	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
- Tanah	354.573.101.211,19	350.205.722.121,19
- Peralatan dan Mesin	398.402.698.719,42	386.966.107.965,58
- Gedung dan Bangunan	996.164.969.715,78	943.115.371.728,19
- Jalan, Irigasi & Jaringan	2.423.140.239.358,54	2.288.474.792.491,56
- Aset Tetap Lainnya	33.280.404.166,82	26.339.655.526,82
- Konstruksi Dlm Pengerjaan	266.567.801.937,06	283.073.339.994,11
- Akumulasi Penyusutan	(1.972.345.946.212,99)	(1.775.897.422.297,12)
Jumlah	2.499.783.268.895,82	2.502.277.567.530,33

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
7.5.3.1.3.1 Tanah	354.573.101.211,19	350.205.722.121,19

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2018 sebesar Rp354.573.101.211,19 meningkat sebesar Rp4.367.379.090,00 atau 1,25% dari saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2017 sebesar Rp350.205.722.121,19. Rincian Mutasi aset tanah dapat dijelaskan sebagai berikut:

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
Saldo awal	350.205.722.121,19	342.650.255.040,01
Mutasi penambahan	4.385.879.090,00	9.612.036.576,00
Mutasi pengurangan	18.500.000,00	(2.056.569.494,82)
Saldo akhir	354.573.101.211,19	350.205.722.121,19



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

Saldo aset tetap tanah sebesar Rp354.573.101.211,19 terdiri dari saldo awal per 31 Desember 2017 sebesar Rp350.205.722.121,19.

Rincian Mutasi penambahan nilai Tanah Tahun 2018 dan 2017 yaitu:

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
- Belanja modal Tanah tahun berjalan	3.698.615.090,00	5.560.393.576,00
- Reklasifikasi Aset	0,00	2.283.369.500,00
- Penerimaan Hibah Aset Tetap	85.059.000,00	1.370.820.000,00
- Koreksi Aset	602.205.000,00	397.453.500,00
Jumlah	4.385.879.090,00	9.612.036.576,00

Penambahan Aset Tanah dari Belanja Modal Tanah TA 2018 sebesar Rp3.698.615.090,00 terdiri dari:

NO	SKPD	URAIAN	TOTAL
1	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	4.186.400,00
		Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	1.196.076.490,00
		Tanah Bangunan Pengairan	1.805.837.000,00
		Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan	687.265.200,00
2	Dinas Perikanan	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	5.250.000,00
JUMLAH			3.698.615.090,00

Penambahan dari Hibah pada Sekretariat Daerah sebesar Rp85.059.000,00 berupa Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan merupakan hibah dari PT. SILO berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor:178/SILO/DIR-HNY/X/2016 032/10-BA/BPKAD tanggal 21 Oktober 2016 dan NPHD Nomor 032/09-BA/BPKAD 177/SILO/DIR-HNY/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016.

Penambahan berdasarkan koreksi aset pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebesar Rp602.205.000,00 berupa aset tanah yang belum dinilai yaitu Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja/ Jasa dilakukan penilaian sesuai NJOP berdasarkan surat pernyataan aset pada tanggal 16 September 2015 dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru yang menyatakan Bidang tanah tersebut diperoleh dengan cara Penguasaan Tanah Negara Sejak tahun 1976 dan telah menjadi aset Pemerintah Kabupaten Kotabaru sebagaimana terdaftar dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kotabaru Registrasi nomor : 01, kode Barang : 01.01.11.04.01, tanggal 01 Juli 2015, yang selama ini tidak ada masalah atau sengketa dengan pihak lain dan belum pernah dimohonkan sertifikat hak atas tanah.



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

Rincian Mutasi Pengurangan nilai Tanah Tahun 2018 dan 2017 yaitu:

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
- Penghapusan	0,00	1.356.716.000,00
- Temuan BPK RI	18.500.000,00	5.000.000,00
- Reklasifikasi Aset	0,00	694.853.494,82
Jumlah	18.500.000,00	2.056.569.494,82

Pengurangan nilai aset dari hasil temuan BPK RI Provinsi Kalimantan Selatan pada Sekretariat Daerah yang disetor ke kas daerah sebesar Rp18.500.000,00 rekening aset Tanah Kuburan dengan STS Nomor 067/STS/BPKAD/2018 tanggal 23 April 2018 dan Nomor 171/STS/BPKAD/2018 tanggal 9 November 2018.

Rincian aset tetap tanah per SKPD pada **Lampiran 3**.

Permasalahan terkait aset tanah milik pemerintah Kabupaten Kotabaru sebanyak 34 persil tanah masih dalam proses penyelesaian, diantaranya sudah dilakukan rapat Koordinasi dan mediasi dengan instansi terkait untuk pengumpulan data, meninjau lapangan untuk legalitas dan kejelasan lokasi. Selain itu, aset tanah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kotabaru sebanyak 587 persil yang tercatat per 31 Desember 2018 yaitu 239 persil tanah yang bersertifikat, 79 persil tanah bersertifikat (dalam buku), 242 persil tanah yang bersegel, 31 persil tanah yang masih dalam bentuk berita acara ganti rugi tanah dan 75 persil tanah yang masih dalam proses pembuatan dokumen.

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
7.5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin	398,402,698,719.42	386.966.107.965,58

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 sebesar Rp398.402.698.719,42 meningkat sebesar Rp11.436.590.753,84 atau 2,96% dari saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2017 sebesar Rp386.966.107.965,58. Rincian mutasi aset peralatan dan mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
- Saldo awal	386.966.107.965,58	349.566.516.319,52
- Mutasi penambahan	50.065.858.751,92	54.870.329.832,33
- Mutasi pengurangan	(38.629.267.998,08)	(17.470.738.186,27)
- Saldo akhir	398.402.698.719,42	386.966.107.965,58

Rincian Mutasi penambahan nilai Peralatan dan Mesin Tahun 2018 dan 2017 yaitu:



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
- Belanja modal peralatan dan mesin tahun berjalan	47.615.250.392,00	37.997.599.559,00
- Belanja Modal BOS	791.299.936,00	1.288.562.800,00
- Honorarium barang dan jasa yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap	182.179.923,92	230.573.856,29
- Penerimaan Hibah Aset Tetap	1.036.260.500,00	5.582.589.500,00
- Reklasifikasi Peralatan dan Mesin	430.868.000,00	8.793.685.847,00
- Koreksi Aset	10.000.000,00	977.318.270,04
Jumlah	50.065.858.751,92	54.870.329.832,33

Penambahan saldo aset tetap peralatan dan mesin dari Belanja Modal BOS sebesar Rp791.299.936,00 merupakan pembelian aset peralatan dan mesin pada 279 SD/SMP yang bersumber dari dana BOS Pusat.

Penambahan dari honorarium barang dan jasa yang dikapitalisasi ke aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp182.179.923,92 dengan rincian :

NO	SKPD	URAIAN	TOTAL
1	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	Alat Ukur Universal	520.000,00
		Alat Kantor Lainnya	470.000,00
2	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	336.372,55
		Peralatan Studio Video dan Film	133.627,45
3	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	1.143.382,00
		Meubilair	1.102.693,00
		Alat Pendingin	1.046.214,00
		Alat Dapur	45.565,00
		Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	653.036,00
		Alat Pemadam Kebakaran	7.337.061,00
		Personal Komputer	1.880.024,00
		Peralatan Mini Komputer	284.715,00
		Alat Komunikasi Radio HF/FM	307.310,00
4	Dinas Sosial	Alat Pendingin	586.260,21
		Alat Dapur	72.172,18
		Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	294.240,45
		Personal Komputer	8.938.247,64
		Peralatan Personal Komputer	1.138.099,92
		Meja Kerja Pejabat	619.015,25
		Kursi Kerja Pejabat	371.964,35



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

NO	SKPD	URAIAN	TOTAL
5	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Alat-alat Bantu Electric Generating Set	12.055.569,00
		Personal Komputer	417.441,89
		Peralatan Personal Komputer	111.666,88
		Meja Kerja Pejabat	234.430,11
		Kursi Kerja Pejabat	140.892,51
6	Dinas Ketahanan Pangan	Peralatan Studio Visual	13.030.000,00
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meubilair	1.029.999,90
		Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.030.000,00
		Personal Komputer	657.155,00
		Peralatan Mini Komputer	89.637,00
		Peralatan Personal Komputer	35.745,00
		Perlatan Jaringan	889.951,00
		Peralatan Studio Visual	45.330,00
		Peralatan Studio Video dan Film	247.463,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Alat Pendingin	1.080.000,00
		Peralatan Personal Komputer	1.080.000,00
		Meja Rapat Pejabat	1.080.000,00
		Kursi Rapat Pejabat	1.080.000,00
		Peralatan Studio Visual	1.080.000,00
		Peralatan Studio Video dan Film	1.080.000,00
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	Peralatan Studio Visual	11.160.000,00
10	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian	Alat Pendingin	10.281.296,00
		Personal Komputer	3.518.704,00
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Alat Kantor Lainnya	6.181.729,88
		Alat Pendingin	1.783.065,26
		Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.995.204,86
12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Personal Komputer	563.625,88
		Peralatan Personal Komputer	171.073,12
		Peralatan Studio Visual	863.174,00
13	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Mesin Hitung/Jumlah	1.011.339,56
		Alat Penyimpanan Perlengkapan	3.840.503,25



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

NO	SKPD	URAIAN	TOTAL
		Kantor	
		Alat Kantor Lainnya	2.864.283,42
		Meja Kerja Pejabat	959.583,33
		Lemari dan Arsip Pejabat	4.284.290,44
14	Sekretariat KPU	Alat Pendingin	802.685,00
15	Kecamatan Pulau Laut Utara	Meubilair	682.060,00
		Alat Pendingin	356.174,50
		Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	298.993,00
		Personal Komputer	762.702,80
		Peralatan Personal Komputer	83.930,85
		Meja Kerja Pejabat	684.732,00
		Kursi Kerja Pejabat	386.854,00
		Lemari dan Arsip Pejabat	427.804,70
		Alat Komunikasi Telephone	300.551,78
16	Kecamatan Pulau Laut Timur	Alat Ukur universal	300.000,00
		Personal Komputer	1.650.000,00
		Peralatan Personal Komputer	1.110.000,00
		Lemari dan Arsip Pejabat	180.000,00
17	Kecamatan Pulau Laut Barat	Peralatan Mini Komputer	940.000,00
18	Kecamatan Pulau Laut Kepulauan	Personal Komputer	90.040,00
		Meja Kerja Pejabat	56.195,00
		Kursi Kerja Pejabat	45.020,00
19	Kecamatan Kelumpang Hulu	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	500.000,00
		Alat Pendingin	400.000,00
		Personal Komputer	1.500.000,00
		Peralatan Personal Komputer	600.000,00
		Peralatan Studio Video dan Film	300.000,00
20	Kecamatan Pamukan Utara	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	140.702,68
		Personal Komputer	359.297,32
21	Inspektorat	Peralatan Ukur, Gip & Feting	114.000,00
		Alat Ukur universal	80.000,00
		Meubilair	177.500,00
		Alat Pembersih	28.000,00
		Alat Pendingin	103.500,00
		Personal Komputer	152.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

NO	SKPD	URAIAN	TOTAL
		Peralatan Personal Komputer	162.500,00
		Peralatan Jaringan	184.000,00
		Meja Kerja Pejabat	25.000,00
		Kursi Kerja Pejabat	50.000,00
		Lemari dan Arsip Pejabat	56.000,00
		Peralatan Studio Visual	44.000,00
		Peralatan Studio Video dan Film	114.000,00
		Peralatan Pemetaan Ukur	381.000,00
		Alat Laboratorium Kimia Air	36.000,00
		Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	346.000,00
		Alat Laboratorium Pertanian B	26.000,00
		Alat Bantu Kemanan	80.000,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Meubilair	10.238.710,00
		Personal Komputer	3.561.290,00
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	13.800.000,00
24	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	5.200.000,00
		Personal Komputer	208.000,00
		Peralatan Personal Komputer	3.848.000,00
		Lemari dan Arsip Pejabat	3.120.000,00
		Peralatan Studio Visual	104.000,00
25	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	563.182,00
		Alat Kantor Lainnya	6.176.929,00
		Alat Pendingin	564.437,00
		Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	7.839,00
		Alat Pemadam Kebakaran	53.308,00
		Personal Komputer	1.589.863,00
		Peralatan Personal Komputer	1.420.695,00
		Meja Kerja Pejabat	109.438,00
		Kursi Kerja Pejabat	243.335,00
		TOTAL	182.179.923,92



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

Penambahan saldo aset tetap peralatan dan mesin hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pusat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp1.036.260.500,00 terdiri dari:

NO	URAIAN	NILAI	KETERANGAN
1	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	53.174.000,00	BAST Barang Milik Negara nomor : BA.735/BNPB/01/2018 tanggal 30 Januari 2018
2	Alat Angkut Apung Tak Bermotor Khusus	297.566.500,00	
3	Perkakas Pabrik Es	54.450.000,00	
4	Alat Kantor Lainnya	631.070.000,00	
	JUMLAH	1.036.260.500,00	

Penambahan dari reklasifikasi sebesar Rp430.868.000,00 dengan rincian :

NO	SKPD	REKLASIFIKASI			
		SEBELUM		SESUDAH	
		NILAI	URAIAN	NILAI	URAIAN
1	Satuan Polisi Pamong Praja	100.000.000,00	Aset Kondisi Rusak Berat	100.000.000,00	Kendaraan Bermotor Penumpang
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.590.000,00	Peralatan Personal Komputer	7.590.000,00	Peralatan Studio Visual
3	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	303.450.000,00	KDP Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	303.450.000,00	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
4	Kecamatan Pamukan Selatan	950.000,00	Alat – Alat Bantu Pompa	950.000,00	Alat Kantor Lainnya
		3.900.000,00	Alat – Alat Pemeliharaan Tanaman	3.900.000,00	Alat Pembersih
		14.978.000,00	Meubelair	2.996.000,00	Meja Rapat Pejabat
				11.982.000,00	Kursi Rapat Pejabat
	TOTAL REKLASIFIKASI	430.868.000,00		430.868.000,00	

Penambahan dari koreksi sebesar Rp10.000.000,00 terdiri atas :

NO	SKPD	URAIAN	NILAI	KETERANGAN
1	Dinas Pemuda Olahraga	Meja Kerja Pejabat	4.000.000,00	Belanja barang jasa yang seharusnya belanja modal (asset)
2	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Meubelair	6.000.000,00	Penambahan asset Asrama Kotabaru
	TOTAL KOREKSI		10.000.000,00	

Rincian mutasi pengurangan nilai Peralatan dan Mesin Tahun 2018 dan 2017 yaitu :



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
- Ekstrakomptabel	620.859.106,26	456.835.514,93
- Hibah	180.000.000,00	203.164.000,00
- Koreksi Aset	1.044.893.186,02	15.103.129,00
- Reklasifikasi Aset	35.118.615.347,01	6.661.361.185,28
- Penghapusan aset tetap	1.664.900.358,79	10.134.274.357,06
Jumlah	38.629.267.998,08	17.470.738.186,27

Pengurangan nilai peralatan dan mesin atas asset yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap (ekstrakomptabel) sebesar Rp620.859.106,26 dengan rincian :

NO	SKPD	URAIAN	TOTAL
1	Dinas Kesehatan	Meubilair	11.042.578,00
		Alat Pendingin	2.310.000,00
		Alat Dapur	4.400.000,00
		Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	14.985.000,00
		Personal Komputer	700.000,00
		Alat Kedokteran Umum	126.332.687,34
		Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	80.978.788,80
		Alat Laboratorium Kimia	43.874.505,00
2	RSUD	Alat Kantor Lainnya	4.950.000,00
		Meubilair	1.430.000,00
		Alat Pendingin	63.288.500,00
		Alat Pemadam Kebakaran	4.290.000,00
		Peralatan Personal Komputer	5.940.000,00
		Alat Kedokteran Bedah	49.932.000,00
		Alat Kedokteran Gawat Darurat	32.975.000,00
3	BLUD	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	900.000,00
		Meubelair	69.430.357,56
4	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	Alat Ukur Lainnya	3.304.550,00
5	Dinas Komunikasi dan Informatika	Peralatan Personal Komputer	14.528.800,00
		Meja Kerja Pejabat	4.994.000,00
		Kursi Kerja Pejabat	3.740.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

6	Sekretariat Daerah	Meubilair	53.970.000,00
		Alat Pendingin	6.600.000,00
		Alat Pemadam Kebakaran	11.805.000,00
7	Sekretariat DPRD	Mesin Hitung/Jumlah	4.157.339,56
		TOTAL	620.859.106,26

Pengurangan nilai peralatan dan mesin atas hibah keluar pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berupa Kendaraan Bermotor Penumpang ke Pengurus Majelis Ta'Lim Dzikir dan Shalawat "Raudhah Al-Muhibbin" Kotabaru sebesar Rp180.000.000,00.

Pengurangan nilai peralatan dan mesin atas koreksi sebesar Rp1.044.893.186,02 terdiri dari koreksi lebih catat aset sebesar Rp443.074.602,00. Koreksi atas SP2D tidak cair tahun 2017 yang terealisasi TA. 2018 sedangkan pencatatan asetnya telah dilakukan pada TA. 2017 sebesar Rp595.094.000,00 dan koreksi atas aset yang berupa barang habis pakai sebesar Rp6.724.584,04 dengan rincian :

NO	SKPD	URAIAN	TOTAL	KETERANGAN
1	BLUD	Meubelair	650.000,00	Barang Habis Pakai
		Alat Dapur	175.928,00	Barang Habis Pakai
		Peralatan Mini Komputer	327.496,88	Barang Habis Pakai
		Peralatan Personal Komputer	485.384,14	Barang Habis Pakai
		Peralatan Jaringan	180.000,00	Barang Habis Pakai
		ALat Komunikasi Telephone	83.775,00	Barang Habis Pakai
		Alat Kedokteran Umum	752.000,00	Barang Habis Pakai
		Alat Kedokteran Bedah	100.000,00	Barang Habis Pakai
		Alat Kedokteran Poliklinik Set	45.000,00	Barang Habis Pakai
		Alat Kedokteran Gawat Darurat	75.000,00	Barang Habis Pakai
		Alat Kesehatan Perawatan	3.850.000,00	Barang Habis Pakai
2	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	90.000.000,00	Lebih catat aset
		Kendaraan Bermotor Khusus	433.735.000,00	SP2D tidak cair nomor 9218 nomor BAST : 03/BAST/602.1/01/SP/PP K/MOBIL-JENAZAH/APBD.P/TR-DCKTR/2017



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

3	Dinas Lingkungan Hidup	Alat Kantor Lainnya	161.359.000,00	SP2D tidak cair Kontrak : 602.1/PPK-TATLING/29.03/GENSET/DLH/2017 Tanggal 29 November 2017 Kegiatan Pengembangan sarana dan Prasarana ekowisata dan Tahura
4	Sekretariat DPRD	Kendaraan Bermotor Penumpang	340.074.602,00	Lebih catat aset
5	BPKAD	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	13.000.000,00	Lebih catat aset
JUMLAH			1.044.893.186,02	

Pengurangan aset karena reklasifikasi sebesar Rp35.118.615.347,01 terdiri atas reklasifikasi hasil sensus ke aset kondisi rusak berat sebesar Rp34.825.810.197,01 berdasarkan SK Penyusunan Laporan Sensus BMD Nomor:188.45/584/KUM/2018, reklasifikasi antar peralatan dan mesin Rp212.747.500,00 dan reklasifikasi dari peralatan dan mesin ke jalan irigasi jaringan sebesar Rp2.736.650,00 dengan rincian:

NO	SKPD	REKLASIFIKASI			
		SEBELUM		SESUDAH	
		NILAI	URAIAN	NILAI	URAIAN
1	Dinas Kesehatan	32.245.039.340,00		32.245.039.340,00	
		14.000.000,00	Electric Generating Set	32.245.039.340,00	Aset Kondisi Rusak Berat
		45.000.000,00	Kendaraan Bermotor Penumpang		
		368.228.000,00	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang		
		2.508.954.400,00	Kendaraan Bermotor Khusus		
		721.600.000,00	Kendaraan Bermotor Beroda Dua		
		99.500.000,00	Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang		
		8.998.856,00	Alat Ukur/Pembandingan		
		568.957.500,00	Alat Laboratorium		
		161.005.450,00	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor		
		3.870.000,00	Alat Kantor		



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

NO	SKPD	REKLASIFIKASI			
		SEBELUM		SESUDAH	
		NILAI	URAIAN	NILAI	URAIAN
			Lainnya		
		145.491.820,00	Meubelair		
		24.351.000,00	Alat Pendingin		
		1.275.000,00	Alat Dapur		
		118.144.600,00	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		
		14.960.000,00	Alat Pemadam Kebakaran		
		24.750.000,00	Komputer Unit/Jaringan		
		223.643.200,00	Personal Komputer		
		3.500.000,00	Peralatan Komputer Mainframe		
		34.645.600,00	Peralatan Mini Komputer		
		18.947.500,00	Peralatan Personal Komputer		
		97.907.000,00	Perlatan Jaringan		
		51.013.400,00	Meja Kerja Pejabat		
		14.626.500,00	Kursi Rapat Pejabat		
		2.476.363,00	Lemari dan Arsip Pejabat		
		30.905.000,00	Peralatan Studio Visual		
		1.819.221.438,00	Alat Kedokteran Umum		
		231.335.650,00	Alat Kedokteran Gigi		
		20.794.188.967,00	Alat Farmasi		
		371.770.000,00	Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan		
		2.572.409.596,00	Alat Kesehatan Perawatan		
		975.472.500,00	Alat Laboratorium Hidro Kimia		
		173.600.000,00	Alat Laboratorium Kimia		
		300.000,00	Photo and Film Equipment		



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

NO	SKPD	REKLASIFIKASI			
		SEBELUM		SESUDAH	
		NILAI	URAIAN	NILAI	URAIAN
2	BLUD	2.736.650,00		2.736.650,00	
		2.736.650,00	Peralatan Jaringan	2.736.650,00	Jaringan Telephone Diatas Tanah
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	90.732.300,00		90.732.300,00	
		29.975.000,00	Alat Reproduksi (Pengganda)	90.732.300,00	Aset Kondisi Rusak Berat
		1.925.000,00	Alat Kantor Lainnya		
		20.130.000,00	Meubilair		
		4.497.900,00	Alat Dapur		
		11.950.000,00	Server Komputer		
		11.155.400,00	Personal Komputer		
		9.900.000,00	Peralatan Personal Komputer		
		1.199.000,00	Alat Komunikasi Telephone		
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.590.000,00		7.590.000,00	
		7.590.000,00	Peralatan Personal Komputer	7.590.000,00	Peralatan Studio Visual
5	Dinas Ketahanan Pangan	226.764.770,83		226.764.770,83	
		2.300.000,00	Mesin Ketik	226.764.770,83	Aset Kondisi Rusak Berat
		10.450.000,00	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor		
		7.250.000,00	Alat Kantor Lainnya		
		11.330.000,00	Meubilair		
		6.783.232,18	Alat Rumah Tangga Lainnya		



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

NO	SKPD	REKLASIFIKASI			
		SEBELUM		SESUDAH	
		NILAI	URAIAN	NILAI	URAIAN
			(Home Use)		
		108.095.000,00	Personal Komputer		
		1.500.000,00	Peralatan Komputer Mainframe		
		370.000,00	Peralatan Mini Komputer		
		44.550.922,65	Peralatan Personal Komputer		
		9.500.000,00	Meja Kerja Pejabat		
		5.375.000,00	Kursi Kerja Pejabat		
		9.750.000,00	Peralatan Studio Visual		
		9.510.616,00	Alat Komunikasi Telephone		
6	Dinas Lingkungan Hidup	380.186.287,91		380.186.287,91	
		90.000.000,00	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	380.186.287,91	Aset Kondisi Rusak Berat
		30.866.505,00	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga		
		150.000,00	Alat Kantor Lainnya		
		65.467.428,77	Meubilair		
		9.762.500,00	Alat Pendingin		
		4.000.000,00	Alat Dapur		
		3.000.000,00	Alat Pemadam Kebakaran		
		78.480.000,00	Personal Komputer		
		2.779.854,14	Peralatan Mini Komputer		
		60.380.000,00	Peralatan Personal Komputer		
		10.300.000,00	Meja Kerja Pejabat		
		22.000.000,00	Peralatan Studio Visual		
		3.000.000,00	Alat Komunikasi Telephone		
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.035.753.258,62		1.035.753.258,62	



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

NO	SKPD	REKLASIFIKASI			
		SEBELUM		SESUDAH	
		NILAI	URAIAN	NILAI	URAIAN
		12.814.500,00	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	1.035.753.258,62	Aset Kondisi Rusak Berat
		234.282.967,00	Alat Kantor Lainnya		
		59.533.480,00	Meubilair		
		6.562.500,00	Alat Pendingin		
		7.300.000,00	Alat Dapur		
		18.250.000,00	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		
		207.176.947,00	Personal Komputer		
		19.940.938,00	Peralatan Komputer Mainframe		
		19.750.393,00	Peralatan Mini Komputer		
		203.394.647,62	Peralatan Personal Komputer		
		160.016.128,00	Peralatan Jaringan		
		2.970.000,00	Meja Kerja Pejabat		
		15.963.838,00	Kursi Kerja Pejabat		
		17.000.000,00	Peralatan Studio Visual		
		50.796.920,00	Alat Komunikasi Telephone		
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	274.930.683,02		274.930.683,02	
		24.350.000,00	Alat Kantor Lainnya	274.930.683,02	Aset Kondisi Rusak Berat
		13.485.000,00	Meubilair		
		255.000,00	Alat Pengukur Waktu		
		1.926.732,00	Alat Pendingin		
		1.000.000,00	Alat Dapur		
		22.250.000,00	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		
		182.085.090,00	Personal		



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

NO	SKPD	REKLASIFIKASI			
		SEBELUM		SESUDAH	
		NILAI	URAIAN	NILAI	URAIAN
			Komputer		
		1.980.000,00	Peralatan Mini Komputer		
		11.249.958,00	Peralatan Personal Komputer		
		549.606,00	Perlatan Jaringan		
		4.279.696,00	Meja Kerja Pejabat		
		3.119.601,02	Kursi Kerja Pejabat		
		8.400.000,00	Peralatan Studio Visual		
9	Dinas Perikanan	185.329.500,00		185.329.500,00	
		64.680.000,00	Alat Penyimpanan	64.680.000,00	Bangunan Gedung Gudang
		120.649.500,00	Peralatan Laboratorium Hidrodinamik a Cavitation Tunnel	120.649.500,00	Instalasi Air Kotor
10	Kecamatan Pulau Laut Tengah	163.789.100,00		163.789.100,00	
		4.000.000,00	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	163.789.100,00	Aset Kondisi Rusak Berat
		13.400.000,00	Alat Kantor Lainnya		
		24.614.000,00	Meubilair		
		900.000,00	Alat Pendingin		
		2.000.000,00	Alat Dapur		
		1.300.000,00	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		
		103.640.000,00	Personal Komputer		
		12.535.100,00	Peralatan Mini Komputer		
		1.400.000,00	Kursi Kerja Pejabat		
11	Kecamatan Pulau Laut Barat	85.915.400,00		85.915.400,00	
		17.952.000,00	Alat Ukur/Pemban ding	85.915.400,00	Aset Kondisi Rusak Berat
		2.860.000,00	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor		



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

NO	SKPD	REKLASIFIKASI			
		SEBELUM		SESUDAH	
		NILAI	URAIAN	NILAI	URAIAN
		4.752.000,00	Meubilair		
		750.000,00	Alat Dapur		
		1.500.000,00	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		
		30.725.000,00	Personal Komputer		
		1.800.000,00	Peralatan Mini Komputer		
		6.750.000,00	Peralatan Personal Komputer		
		4.976.400,00	Meja Kerja Pejabat		
		4.950.000,00	Peralatan Studio Video dan Film		
		8.900.000,00	Recorder Display		
12	Kecamatan Pulau Laut Kepulauan	77.321.000,00		77.321.000,00	
		7.000.000,00	Alat Ukur universal	77.321.000,00	Aset Kondisi Rusak Berat
		1.980.000,00	Mesin Ketik		
		3.498.000,00	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor		
		19.782.000,00	Meubilair		
		396.000,00	Alat Pengukur Waktu		
		1.584.000,00	Alat Pendingin		
		4.400.000,00	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		
		13.500.000,00	Personal Komputer		
		8.606.000,00	Peralatan Mini Komputer		
		7.470.000,00	Peralatan Personal Komputer		
		3.000.000,00	Meja Kerja Pejabat		
		6.105.000,00	Peralatan Studio Visual		
13	Kecamatan Pamukan Selatan	19.828.000,00		19.828.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

NO	SKPD	REKLASIFIKASI			
		SEBELUM		SESUDAH	
		NILAI	URAIAN	NILAI	URAIAN
		950.000,00	Alat – Alat Bantu Pompa	950.000,00	Alat Kantor Lainnya
		3.900.000,00	Alat – Alat Pemeliharaan Tanaman	3.900.000,00	Alat Pembersih
		14.978.000,00	Meubelair	2.996.000,00	Meja Rapat Pejabat
				11.982.000,00	Kursi Rapat Pejabat
14	Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar	34.579.619,86		34.579.619,86	
		3.243.484,65	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	34.579.619,86	Aset Kondisi Rusak Berat
		1.608.539,88	Meubilair		
		6.076.706,20	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		
		7.613.257,32	Personal Komputer		
		1.791.354,66	Peralatan Mini Komputer		
		3.354.624,90	Kursi Kerja Pejabat		
		3.801.908,25	Kursi Rapat Pejabat		
		7.089.744,00	Peralatan Studio Visual		
15	Inspektorat	63.803.183,00		63.803.183,00	
		6.600.000,00	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	63.803.183,00	Aset Kondisi Rusak Berat
		500.000,00	Alat Kantor Lainnya		
		3.400.000,00	Meubilair		
		420.000,00	Alat Pendingin		
		32.357.000,00	Personal Komputer		
		2.400.000,00	Peralatan Mini Komputer		
		11.976.183,00	Peralatan Personal Komputer		
		3.900.000,00	Alat Laboratorium Microbiologi		
		2.250.000,00	Alat Laboratorium Kimia		
16	Badan	224.316.253,77		224.316.253,77	



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

NO	SKPD	REKLASIFIKASI			
		SEBELUM		SESUDAH	
		NILAI	URAIAN	NILAI	URAIAN
	Pengelola Keuangan dan Aset Daerah				
		23.400.000,00	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	224.316.253,77	Aset Kondisi Rusak Berat
		5.940.000,00	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor		
		10.707.885,72	Alat Kantor Lainnya		
		54.344.117,10	Meubilair		
		16.407.000,00	Alat Pendingin		
		1.529.697,97	Alat Dapur		
		19.580.000,00	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		
		55.317.600,00	Personal Komputer		
		16.416.553,00	Peralatan Personal Komputer		
		15.640.000,00	Meja Kerja Pejabat		
		3.583.399,98	Kursi Kerja Pejabat		
		1.450.000,00	Peralatan Antena SHF/Parabola		
	TOTAL REKLASIFIKASI	35.118.615.347,01		35.118.615.347,01	

Pengurangan aset karena penghapusan sebesar Rp1.664.900.358,79 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 188.45/585/KUM/2018 Tanggal 12 November 2018 dengan rincian :

NO	SKPD	NILAI	KOREKSI KURANG	KETERANGAN
1	Rumah Sakit Umum Daerah	33.000.000,00		
		33.000.000,00	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Penghapusan sesuai data BMD
2	Satuan Polisi Pamong Paraja	23.000.000,00		
		23.000.000,00	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Penghapusan sesuai data BMD
3	Dinas Perhubungan	418.951.496,00		
		34.788.080,00	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	Penghapusan sesuai data BMD
		315.698,00	Alat Kantor Lainnya	Penghapusan sesuai data BMD



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

NO	SKPD	NILAI	KOREKSI KURANG	KETERANGAN
		3.946.220,00	Meubilair	Penghapusan sesuai data BMD
		3.452.000,00	Alat Pendingin	Penghapusan sesuai data BMD
		2.262.000,00	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Penghapusan sesuai data BMD
		17.100.000,00	Personal Komputer	Penghapusan sesuai data BMD
		9.450.000,00	Perlitan Jaringan	Penghapusan sesuai data BMD
		4.950.000,00	Kursi Kerja Pejabat	Penghapusan sesuai data BMD
		23.800.000,00	Peralatan Studio Visual	Penghapusan sesuai data BMD
		2.622.000,00	Alat Komunikasi Telephone	Penghapusan sesuai data BMD
		35.749.998,00	Glassware Plastic/Utensils	Penghapusan sesuai data BMD
		7.350.000,00	Recorder Display	Penghapusan sesuai data BMD
		273.165.500,00	Alat Laboratorium Kualitas Udara	Penghapusan sesuai data BMD
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	16.492.803,89		
		3.700.000,00	Meubilair	Penghapusan sesuai data BMD
		11.880.000,00	Personal Komputer	Penghapusan sesuai data BMD
		912.803,89	Peralatan Personal Komputer	Penghapusan sesuai data BMD
6	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	22.000.000,00		
		22.000.000,00	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Penghapusan sesuai data BMD
7	Dinas Perdagangan	90.000.000,00		
		90.000.000,00	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	Penghapusan sesuai data BMD
8	Sekretariat Daerah	398.375.811,00		
		398.375.811,00	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Penghapusan sesuai data BMD
9	Sekretariat DPRD	282.409.756,00		
		282.409.756,00	Kendaraan Bermotor Penumpang	Penghapusan sesuai data BMD
10	Sekretariat KPU	76.897.540,90		
		70.000.000,00	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Penghapusan sesuai data BMD



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

NO	SKPD	NILAI	KOREKSI KURANG	KETERANGAN
		6.897.540,90	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Penghapusan sesuai data BMD
11	Kecamatan Pulau Laut timur	16.846.602,00		
		236.602,00	Mesin Hitung/Jumlah	Penghapusan sesuai data BMD
		3.750.000,00	Meubilair	Penghapusan sesuai data BMD
		4.860.000,00	Alat Pendingin	Penghapusan sesuai data BMD
		3.135.000,00	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Penghapusan sesuai data BMD
		2.172.500,00	Peralatan Mini Komputer	Penghapusan sesuai data BMD
		2.692.500,00	Peralatan Personal Komputer	Penghapusan sesuai data BMD
12	Kecamatan Pulau Sebuku	41.012.600,00		
		8.638.600,00	Meubilair	Penghapusan sesuai data BMD
		5.970.000,00	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Penghapusan sesuai data BMD
		7.500.000,00	Personal Komputer	Penghapusan sesuai data BMD
		4.428.000,00	Peralatan Personal Komputer	Penghapusan sesuai data BMD
		2.486.000,00	Meja Kerja Pejabat	Penghapusan sesuai data BMD
		9.790.000,00	Peralatan Studio Visual	Penghapusan sesuai data BMD
		2.200.000,00	Recorder Display	Penghapusan sesuai data BMD
13	Kecamatan Kelumpang Selatan	9.500.000,00		
		9.500.000,00	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Penghapusan sesuai data BMD
14	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	192.201.249,00		
		7.500.000,00	Alat Ukur/Pembanding	Penghapusan sesuai data BMD
		1.550.000,00	Mesin Tik	Penghapusan sesuai data BMD
		23.161.749,00	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	Penghapusan sesuai data BMD
		61.347.000,00	Meubilair	Penghapusan sesuai data BMD
		24.000.000,00	Personal Komputer	Penghapusan sesuai data BMD
		43.170.000,00	Peralatan Mini Komputer	Penghapusan sesuai data BMD
		21.787.500,00	Meja Kerja Pejabat	Penghapusan sesuai data BMD
		8.985.000,00	Lemari dan Arsip Pejabat	Penghapusan sesuai data BMD



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

NO	SKPD	NILAI	KOREKSI KURANG	KETERANGAN
		700.000,00	Alat Komunikasi Telephone	Penghapusan sesuai data BMD
15	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	44.212.500,00		
		21.000.000,00	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Penghapusan sesuai data BMD
		8.962.500,00	Alat Pendingin	Penghapusan sesuai data BMD
		9.300.000,00	Personal Komputer	Penghapusan sesuai data BMD
		4.950.000,00	Peralatan Mini Komputer	Penghapusan sesuai data BMD
	TOTAL	1.664.900.358,79		

Rincian lihat Lampiran 4.

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
7.5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan	996.164.969.715,78	943.115.371.728,19

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap digunakan. Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 sebesar Rp996.164.969.715,78 meningkat sebesar Rp53.049.597.987,59 atau 5,62% dari saldo aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2017 sebesar Rp943.115.371.728,19. Rincian mutasi aset gedung dan bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
- Saldo awal	943.115.371.728,19	871.484.292.578,40
- Mutasi penambahan	71.645.706.717,46	149.964.627.478,79
- Mutasi pengurangan	(18.596.108.729,87)	(78.333.568.329,00)
- Saldo akhir	996.164.969.715,78	943.115.371.728,19

Mutasi penambahan nilai Gedung dan Bangunan Tahun 2018 dan 2017 terdiri dari:

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
- Belanja modal Gedung dan Bangunan tahun berjalan	57.217.593.098,00	78.709.119.403,00
- Honorarium barang dan jasa yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap	6.464.747,37	1.645.289,00
- Hibah Masuk	3.084.849.200,00	24.236.755.970,97
- Reklasifikasi aset	4.831.512.797,00	45.786.979.256,82
- Koreksi Aset	6.505.286.875,09	1.230.147.559,00
Jumlah	71.645.706.717,46	149.964.647.478,79



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

Penambahan dari honorarium barang dan jasa yang dikapitalisasi ke aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp6.464.747,37 dengan rincian :

NO	SKPD	URAIAN	TOTAL
1	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	Bangunan Gedung Kantor	520.000,00
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bangunan Gedung Kantor	1.030.000,00
3	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	Bangunan Gedung Kantor	2.160.000,00
4	Kecamatan Pulau Laut Utara	Bangunan Gedung Kantor	2.316.196,37
5	Kecamatan Pulau Laut Kepulauan	Bangunan Gedung Kantor	281.914,55
		Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	156.636,45
		JUMLAH	6.464.747,37

Penambahan Hibah Masuk sebesar Rp3.084.849.200,00 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian merupakan hibah Pusat dengan NPHD Nomor: 04/Prj/M.KUKM.1/I/2018 tanggal 17 Januari 2018.

Penambahan dari reklasifikasi aset sebesar Rp4.831.512.797,00 dengan rincian:

No	SKPD	Nilai	Reklasifikasi	
			Sebelum	Sesudah
1	Dinas Pendidikan	544.040.797,00	KDP Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
2	Dinas Kesehatan	217.977.000,00	Bangunan Kesehatan	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
3	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	89.033.000,00	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Bangunan Gudang Untuk Bengkel
		113.965.000,00	Rumah Negara Golongan III	Rumah Negara Golongan I
		220.850.000,00	Asrama	Mess/Wisma
4	Dinas Perikanan	64.680.000,00	Alat Penyimpanan	Bangunan Gudang
5	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.516.067.000,00	KDP Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar
6	Kecamatan Pulau Laut Tengah	64.900.000,00	Bangunan Gedung Kantor	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
Jumlah		4.831.512.797,00		

Penambahan dari koreksi aset sebesar Rp6.505.286.875,09 merupakan pengajuan SPM SKPD yang dikoreksi ke asetnya karena sudah ada Berita Acara Serah Terima, Koreksi kurang catat aset tahun 2017 dan belanja barang jasa yang seharusnya belanja modal (asset) dengan rincian :



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

NO	SKPD	URAIAN	TOTAL	KETERANGAN
1	Dinas Kesehatan	Bangunan Kesehatan	2.686.727.916,00	SP2D tidak cair tahun 2017
2	Dinas Pemadam Kebakaran	Bangunan Gedung Kantor	107.877.850,00	kapitalisasi
3	Dinas Perhubungan	Bangunan Gedung Kantor	146.745.000,00	kapitalisasi
4	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Tugu Pembangunan	3.439.982.109,00	SP2D tidak cair tahun 2017
5	Kecamatan Pamukan Utara	Bangunan Gedung Kantor	0,09	Kurang catat aset
		Bangunan Gedung Kantor	64.647.000,00	kapitalisasi
6	Inspektorat	Bangunan Gedung Kantor	59.307.000,00	kapitalisasi
		JUMLAH	6.505.286.875,09	

Mutasi pengurangan nilai Gedung dan Bangunan Tahun 2018 dan 2017 terdiri dari :

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
- Hibah	0,00	139.589.000,00
- Temuan BPK	150.867.789,87	0,00
- Reklasifikasi aset	8.303.057.104,00	28.147.946.566,00
- Koreksi Aset	2.859.272.086,00	59.963.000,00
- Penghapusan	7.282.911.750,00	49.986.069.763,00
- Jumlah	18.596.108.729,87	78.333.568.329,00

Pengurangan aset dari hasil temuan BPK RI Provinsi Kalimantan Selatan yang disetor ke kas daerah sebesar Rp150.867.789,87 dengan rincian :

NO	SKPD	URAIAN	TOTAL	KETERANGAN
1	Dinas Pendidikan	Gedung Tempat Pendidikan	38.660.815,00	071/STS/BPKAD/2018 23 Mei 2018 185/STS/BPKAD/2018 10 Desember 2018 186/STS/BPKAD/2018 10 Desember 2018
2	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Gedung Laboratorium	8.239.000,00	073/STS/BPKAD/2018 9 Mei 2018
3	Dinas Perikanan	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	3.500.000,00	122/STS/BPKAD/2018 24 Januari 2018
4	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	100.467.974,87	183/STS/BPKAD/2018 06 Desember 2018
		JUMLAH	150.867.789,87	



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

Pengurangan aset tetap gedung dan bangunan yang direklasifikasi sebesar Rp8.303.057.104,00 dengan rincian:

NO	SKPD	REKLASIFIKASI			
		SEBELUM		SESUDAH	
		NILAI	URAIAN	NILAI	URAIAN
1	Dinas Pendidikan	156.876.000,00		156.876.000,00	
		156.876.000,00	Gedung Tempat Pendidikan	57.236.000,00	KDP Gedung Tempat Pendidikan
				99.640.000,00	Aset Tetap Lainnya - Buku Umum
2	Dinas Kesehatan	939.768.980,00		939.768.980,00	
		939.768.980,00	Bangunan Kesehatan	217.977.000,00	Gedung Tempat Kerja Lainnya
				721.791.980,00	KDP Bangunan Kesehatan
3	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	4.142.265.624,00		4.142.265.624,00	
		4.142.265.624,00	Bangunan kesehatan	4.142.265.624,00	KDP Bangunan kesehatan
4	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	473.448.000,00		473.448.000,00	
		138.633.000,00	Gedung Tempat Pendidikan	49.600.000,00	KDP Gedung Tempat Pendidikan
				89.033.000,00	Gudang Untuk Bengkel
		113.965.000,00	Rumah Negara Golongan III	113.965.000,00	Rumah Negara Golongan I
		220.850.000,00	Asrama	220.850.000,00	Mess/Wisma
5	Dinas Lingkungan Hidup	2.031.700.000,00		2.031.700.000,00	
		2.007.420.000,00	Gedung Garasi Pool	1.983.282.000,00	KDP Gedung Garasi Pool
				24.138.000,00	Jalan Khusus
		24.280.000,00	Bangunan Kandang Hewan Ternak	24.280.000,00	KDP Bangunan Kandang Hewan Ternak
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	54.200.000,00		54.200.000,00	
		54.200.000,00	Rumah Negara Golongan I	54.200.000,00	Aset Kondisi Rusak Berat



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

NO	SKPD	REKLASIFIKASI			
		SEBELUM		SESUDAH	
		NILAI	URAIAN	NILAI	URAIAN
7	Dinas Perhubungan	10.582.000,00		10.582.000,00	
		10.582.000,00	Rambu Tidak Bersuar	10.582.000,00	KDP Rambu Tidak Bersuar
8	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	146.736.500,00		146.736.500,00	
		24.445.000,00	Gedung Tempat Pertemuan	18.370.000,00	Barang dan Jasa
				6.075.000,00	Jembatan Khusus
		33.764.000,00	Gedung Tempat Kerja Lainnya	30.764.000,00	Barang dan Jasa
				3.000.000,00	Jalan Khusus
		73.127.500,00	Mess/Wisma	73.127.500,00	Barang dan Jasa
		15.400.000,00	Makam Sejarah	15.400.000,00	Barang dan Jasa
9	Dinas Perdagangan	149.800.000,00		149.800.000,00	
		149.800.000,00	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar	89.800.000,00	KDP Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar
				60.000.000,00	Aset Tdak Berwujud- Penelitian Kajian
10	Kecamatan Pulau Laut Tengah	64.900.000,00		64.900.000,00	
		64.900.000,00	Bangunan Gedung Kantor	64.900.000,00	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
11	Kecamatan Pulau Laut Kepulauan	53.564.000,00		53.564.000,00	
		53.564.000,00	Bangunan Gedung Kantor	53.564.000,00	Aset Kondisi Rusak Berat
12	Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar	14.950.000,00		14.950.000,00	
		14.950.000,00	Rumah Negara Golongan I	14.950.000,00	Jalan Irigasi Jaringan - Jaringan Transmisi
13	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	64.266.000,00		64.266.000,00	
		64.266.000,00	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	64.266.000,00	Aset Kondisi Rusak Berat
	TOTAL REKLASIFIKASI	8.303.057.104,00		8.303.057.104,00	



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

Pengurangan aset atas koreksi berupa pembayaran SP2D tidak cair tahun 2017 sebesar Rp2.859.272.086,00 yang terealisasi TA. 2018 sedangkan pencatatan asetnya telah dilakukan pada TA. 2017 dan pencatatan ekstrakomptbel yang bersumber dari Dana DAK dengan rincian :

NO	SKPD	URAIAN	TOTAL	KETERANGAN
1	Dinas Pendidikan	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	722.471.659,00	BAST nomor 230/BAST/DIKDAS/DISDIK/2017 BAST nomor 231/BAST/DIKDAS/DISDIK/2017 BAST 229/BAST/DIKDAS/DISDIK/2017 BAST nomor 229/BAST/DIKDAS/DISDIK/2017
		Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	767.475.000,00	Ekstrakomptbel dari Dana DAK
2	Dinas Kesehatan	Bangunan Kesehatan	488.661.600,00	9409/SP2D/LS/02/DINKES/2017 9410/SP2D/LS/02/DINKES/2017
3	BLUD	Bangunan Gedung Kantor	1.556.500,00	Bahan Habis Pakai
4	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	860.113.027,00	BAST nomor BAST/03/W-LAS/BLK-DKT/2017
5	Dinas Perikanan	Bangunan Gedung Kantor	18.994.300,00	BAST nomor:04/BAST/SPK-086/PARKIR/UMPEG/DP/2017
		JUMLAH	2.859.272.086,00	

Penghapusan aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp7.282.911.750,00 pada Dinas Perdagangan rekening aset Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar berdasarkan SK Bupati Kotabaru Nomor:188.45/641/KUM/2018.

Rincian lihat **Lampiran 5**.

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
7.5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan	<u>2.423.140.239.358,54</u>	<u>2.288.474.792.491,56</u>

Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencakup aset jalan dan jembatan, aset irigasi, dan aset jaringan yang dibangun dan dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru serta dalam kondisi siap digunakan. Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.423.140.239.358,54 meningkat sebesar Rp134.665.446.866,98 atau 5,88% dari saldo aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2017 sebesar Rp2.288.474.792.491,56. Rincian mutasi aset Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dijelaskan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

Rincian mutasi aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2018 dan 2017 sebagai berikut:

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
- Saldo awal	2.288.474.792.491,56	2.181.767.344.980,38
- Mutasi penambahan	156.471.090.323,00	150.145.463.046,00
- Mutasi pengurangan	(21.805.643.456,02)	(43.438.015.534,82)
- Saldo akhir	2.423.140.239.358,54	2.288.474.792.491,56

Mutasi penambahan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2018 dan 2017 terdiri dari:

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
- Belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun berjalan	123.270.881.474,00	128.559.784.579,00
- Koreksi Aset	15.819.704.441,00	3.782.830.800,00
- Kapitalisasi Honorarium	2.700.194,00	1.000.000,00
- Reklasifikasi aset	17.377.804.214,00	13.001.838.242,00
- Hibah	0,00	4.800.009.425,00
Jumlah	156.471.090.323,00	150.145.463.046,00

Penambahan saldo aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp15.819.704.441,00 berupa pengajuan SPM SKPD namun SP2Dnya belum cair di tahun 2018 sehingga dilakukan koreksi ke asetnya berdasarkan Berita Acara Serah Terima sampai dengan tanggal 31 desember 2018 dengan rincian sebagai berikut :

No	SKPD	Nilai	Koreksi Penambahan	Keterangan
1	DBM & SDA	15.252.186.441,00	Jalan Kabupaten	Surat Perintah Membayar (SPM)
		97.350.000,00	Jembatan Kabupaten	SPM 0299/SPM/LS/02/DBM&SDA/2018 BASTNomor:04/BAST/15.24/PRC/MER ANTIDBM&SDA/2018
		99.000.000,00	Bangunan Pembawa Irigasi	SPM 0244/SPM/LS/02/DBM&SDA/2018 BASTNomor:04/BAST/PRC/24.20-MG/ DBM&SDA/2018 SPM 0245/SPM/LS/02/DBM&SDA/2018 BASTNomor: BASTNomor:04/BAST/PRC/24.20-TS/ DBM&SDA/2018
2	DCKTR	371.168.000,00	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	SPM 0259/SPM/LS/02/DCKTR/2018 BASTNomor:03/BAST/SPK/BKTAWAS/ SPAM/2018 SPM 0260/SPM/LS/02/DCKTR/2018 BASTNomor:03/BAST/SPK/BKKAPORI T/SPAM/2018 SPM 0264/SPM/LS/02/DCKTR/2018 BASTNomor:03/BAST/SPK/PPIKSRP UDI/SPAM/2018
JUMLAH		15.819.704.441,00		



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

Penambahan Kapitalisasi sebesar Rp2.700.194,00 dari honorarium tim pengadaan barang dan jasa yang dikapitalisasi ke aset Instalasi Air Bersih/ Air Baku Lainnya pada Kecamatan Pulau Laut kepulauan sebesar Rp450.194,00 dan Jaringan Distribusi pada Kecamatan Sungai Durian sebesar Rp2.250.000,00.

Penambahan dari reklasifikasi aset sebesar Rp17.377.804.214,00 merupakan reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan ke aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp17.043.677.988,00 dan Reklasifikasi antar rekening aset Peralatan Mesin, Gedung Bangunan ke Jalan Irigasi Jaringan sebesar Rp331.389.576,00 terdiri dari:

No	SKPD	Nilai	Reklasifikasi	
			Sebelum	Sesudah
1	BLUD	2.736.650,00	Peralatan Jaringan (Peralatan dan Mesin)	Jaringan Telephone (Jalan Irigasi dan Jaringan)
2	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	10.700.745.222,00	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan Kabupaten	Jalan Daerah Kabupaten/Kota
		162.577.076,00	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan Desa	Jalan Desa
		2.436.998.629,00	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan Kabupaten	Jembatan Kabupaten/Kota
		648.532.963,00	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan Desa	Jembatan Desa
		3.051.834.598,00	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pembuang Pasang Surut	Bangunan Pembuang Pasang Surut
		162.577.076,00	Jalan Desa	Jalan Kabupaten
3	Dinas Lingkungan Hidup	24.138.000,00	Gedung dan Bangunan - Gedung garasi pool	jalan irigasi jaringan - jalan khusus
4	Dinas Perhubungan	42.989.500,00	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Tawar	Bangunan Air Tawar
5	Dinas Perikanan	120.649.500,00	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Cavitation Tunnel	Instalasi Air Kotor
6	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.000.000,00	Gedung dan bangunan - gedung tempat kerja lainnya	Jalan khusus
		6.075.000,00	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Jembatan khusus
7	Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar	14.950.000,00	Gedung dan bangunan- Rumah Negara golongan I	Jaringan Transmisi
JUMLAH		17.377.804.214,00		

Mutasi pengurangan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2018 dan 2017 terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
- Koreksi (temuan BPK)	787.961.133,02	485.855.934,82
- Reklasifikasi aset	3.810.360.556,00	38.111.783.455,00
- Penghapusan	0,00	4.172.562.145,00
- Koreksi Aset	17.207.321.767,00	241.389.000,00
- Hibah	0,00	426.425.000,00
Jumlah	21.805.643.456,02	43.438.015.534,82

Pengurangan saldo aset tetap jalan irigasi dan jaringan dari koreksi temuan BPK sebesar Rp787.961.133,02 pada Dinas Bina Marga dan Sumber daya Air sebesar Rp768.767.033,70 rekening aset Jalan Daerah Kabupaten/ Kota dan pada Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp19.194.099,32 rekening aset Jalan Khusus.

Pengurangan saldo aset tetap jalan irigasi dan jaringan dari reklasifikasi aset sebesar Rp3.810.360.556,00 merupakan reklasifikasi aset Jalan Irigasi Jaringan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp2.508.555.980,00. Reklasifikasi ke barang dan jasa sebesar Rp1.115.089.500,00 dan reklasifikasi antar rekening aset Jalan Irigasi Jaringan sebesar Rp186.715.076,00 dengan rincian :

NO	SKPD	REKLASIFIKASI			
		SEBELUM		SESUDAH	
		NILAI	URAIAN	NILAI	URAIAN
1	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	2.155.081.635,00		2.155.081.635,00	
		1.470.374.000,00	Jalan Daerah Kabupaten/Kota	1.470.374.000,00	KDP Jalan Daerah Kabupaten/Kota
		162.577.076,00	Jalan Desa	162.577.076,00	Jalan Daerah Kabupaten/Kota
		355.248.059,00	Jembatan Kabupaten/Kota	355.248.059,00	KDP Jembatan Kabupaten/Kota
		137.875.000,00	Bangunan Pembawa Irigasi	137.875.000,00	KDP Bangunan Pembawa Irigasi
		29.007.500,00	Waduk Air Bersih/Air Baku	29.007.500,00	KDP Waduk Air Bersih/Air Baku
2	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	1.113.967.000,00		1.113.967.000,00	
		94.915.000,00	Jalan Desa	94.915.000,00	KDP Jalan Desa
		1.019.052.000,00	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	986.502.000,00	Barang dan Jasa



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

NO	SKPD	REKLASIFIKASI			
		SEBELUM		SESUDAH	
		NILAI	URAIAN	NILAI	URAIAN
				32.550.000,00	KDP Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
3	Dinas Lingkungan Hidup	93.878.000,00		93.878.000,00	
		24.138.000,00	Jalan Khusus	24.138.000,00	KDP Jalan Khusus
		69.740.000,00	Instalasi Pengolahan Sampah Organik	69.740.000,00	KDP Instalasi Pengolahan Sampah Organik
4	Dinas Perhubungan	209.791.000,00		209.791.000,00	
		209.791.000,00	Bangunan Air Tawar	209.791.000,00	KDP Bangunan Air Tawar
5	Dinas Perikanan	109.055.421,00		109.055.421,00	
		109.055.421,00	Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai	109.055.421,00	KDP Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai
6	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	128.587.500,00		128.587.500,00	
		128.587.500,00	Bangunan Air Tawar	128.587.500,00	Barang dan Jasa
	TOTAL REKLASIFIKASI	3.810.360.556,00		3.810.360.556,00	

Pengurangan aset atas koreksi sebesar Rp17.207.321.767,00 merupakan koreksi atas SP2D tidak cair tahun 2017 yang terealisasi TA. 2018 sedangkan pencatatan asetnya telah dilakukan pada TA. 2017 dan Bahan Habis Pakai dengan rincian :



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

NO	SKPD	URAIAN	TOTAL	KETERANGAN
1	BLUD	Instalasi Air Bersih/ Air Baku Lainnya	1.331.000,00	Bahan Habis Pakai
2	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	Jalan Daerah Kabupaten/Kota	4.383.724.391,00	BAST No.06/BAST/15.29/STS/BID.JLN/2017 tgl 22 Desember 2017 Rp.3.194.844.000,- & Rp.235.835.800,- BAST No.06/BAST/15.27/SS/BID.JLN/2017 tanggal 21 desember 2017 SP2D tidak cair Rp.136.577.466,- BAP No.02/BAP/TERMIN2/15.27/KPKU/BID.JLN /2017, tgl 20 Des 2017
		Jembatan Kabupaten/Kota	11.073.885.726,00	
		Jembatan Desa	224.243.450,00	
3	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	337.500.000,00	
		Bangunan air tawar	1.186.637.200,00	
JUMLAH			17.207.321.767,00	

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD pada **Lampiran 6**.

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
7.5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya	33.280.404.166,82	26.339.655.526,82

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Kotabaru dan dalam kondisi siap digunakan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp33.280.404.166,82 meningkat sebesar Rp6.940.748.640,00 atau 26,35% dari saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2017 sebesar Rp26.339.655.526,82.

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 dan 2017 sebagai berikut:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
- Saldo awal	26.339.655.526,82	15.992.960.795,81
- Mutasi penambahan	7.046.057.710,00	12.788.756.737,01
- Mutasi pengurangan	(105.309.070,00)	(2.442.062.006,00)
Saldo akhir	33.280.404.166,82	26.339.655.526,82

Mutasi penambahan nilai Aset Tetap Lainnya Tahun 2018 dan 2017 terdiri dari :



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
- Belanja Modal	1.792.284.321,00	3.079.022.655,00
- Kapitalisasi Honorarium	3.185.098,00	0,00
- Belanja Modal BOS	5.150.948.291,00	7.195.803.696,00
- Reklasifikasi aset	99.640.000,00	2.513.930.386,00
Jumlah	7.046.057.710,00	12.788.756.737,00

Penambahan Kapitalisasi sebesar Rp3.185.000,00 dari honorarium tim pengadaan barang dan jasa yang dikapitalisasi ke aset Buku Umum sebesar Rp1.480.000,00 dan Buku Ilmu Bahasa sebesar Rp1.634.124,00 pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dan Buku Umum sebesar Rp70.974,00 pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah.

Penambahan saldo aset tetap lainnya dari Belanja Modal BOS sebesar Rp5.150.948.291,00 merupakan pembelian aset tetap lainnya berupa buku umum.

Penambahan reklasifikasi aset sebesar Rp99.640.000,00 merupakan reklasifikasi dari Gedung Bangunan - Gedung Tempat Pendidikan ke Aset Tetap Lainnya berupa Buku Umum.

Mutasi pengurangan nilai Aset Tetap Lainnya Tahun 2018 dan Tahun 2017 terdiri dari :

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
- Penghapusan	0,00	418.709.350,00
- Reklasifikasi aset	103.847.500,00	2.023.352.656,00
- Koreksi aset	1.461.570,00	0,00
Jumlah	105.309.070,00	2.442.062.006,00

Pengurangan saldo aset tetap lainnya yang asetnya direklasifikasi sebesar Rp103.847.500,00 terdiri dari:

No	SKPD	Nilai	Reklasifikasi	
			Sebelum	Sesudah
1	Dinas Kesehatan	9.512.500,00	Buku Umum	Aset Kondisi Rusak Berat
2	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan	91.410.000,00	Terbitan Buku Laporan	Aset Lainnya – Penelitian/ Kajian
3	Dinas Lingkungan Hidup	2.925.000,00	Buku Ilmu Sosial	Aset Kondisi Rusak Berat
JUMLAH		103.847.500,00		

Pengurangan saldo aset tetap lainnya dari koreksi aset sebesar Rp1.461.570,00 merupakan koreksi bahan habis pakai pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Rincian aset tetap lainnya per SKPD pada **Lampiran 7**.



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
7.5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	266.567.801.937,06	283.073.339.994,11

KDP mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Saldo Konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp266.567.801.937,06 menurun sebesar Rp16.505.538.057,05 atau 5,83% dari saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2017 sebesar Rp283.073.339.994,11.

Saldo KDP per 31 Desember 2018 dan 2017 dirinci sebagai berikut:

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
- Saldo awal	283.073.339.994,11	213.321.532.472,68
- Mutasi penambahan	10.173.211.584,00	80.826.134.970,47
- Mutasi pengurangan	(26.678.749.641,05)	(11.074.327.449,04)
Saldo akhir	266.567.801.937,06	283.073.339.994,11

Mutasi penambahan nilai KDP Tahun 2018 dan 2017 berasal dari realisasi belanja modal atas paket/kontrak pekerjaan pada tahun berjalan yang belum selesai sampai dengan akhir Tahun 2018 dan 2017, dan pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan oleh pelaksana atau putus kontrak, termasuk belanja konsultan perencanaan dan pengawas, terdiri dari:

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
- Aset Peralatan dan Mesin	0,00	303.450.000,00
- Aset Gedung dan Bangunan	7.078.837.604,00	29.706.951.621,47
- Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.094.373.980,00	50.815.733.349,00
Jumlah	10.173.211.584,00	80.826.134.970,47

Penambahan KDP dari aset tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp7.078.837.604,00 terdiri dari:

No	SKPD	Nilai	Keterangan
1.	Dinas Pendidikan	57.236.000,00	Gedung tempat pendidikan
2.	Dinas Kesehatan	721.791.980,00	Gedung bangunan kesehatan
3.	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	4.142.265.624,00	Gedung bangunan kesehatan
4.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	49.600.000,00	Berupa gedung tempat pendidikan.
5.	Dinas Lingkungan Hidup	1.983.282.000,00	Bangunan gedung garasi pool
		24.280.000,00	Gedung kandang hewan/ ternak



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

No	SKPD	Nilai	Keterangan
6.	Dinas Perhubungan	10.582.000,00	Rambu tidak bersuar
7.	Dinas Perdagangan	89.800.000,00	Gedung Pertokoan/ Koperasi/ pasar
Total		7.078.837.604,00	

Penambahan KDP dari aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp3.094.373.980,00 merupakan koreksi aset atas pengajuan SPM SKPD yang diakui sebagai utang pengadaan aset tetap dicatat berdasarkan Berita Acara Serah Terima pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air sebesar Rp561.680.000,00 aset Jalan Kabupaten dan berupa reklasifikasi dari aset jalan Irigasi Jaringan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan dengan rincian:

No	SKPD	Nilai
1	Dinas Bina Marga dan SDA	
	a. Jalan Kabupaten	1.470.374.000,00
	Jalan Kabupaten (koreksi aset – pengajuan SPM)	561.680.000,00
	b. Jembatan Kabupaten	355.248.059,00
	c. Bangunan Pembawa Irigasi	137.875.000,00
	d. Bangunan Waduk Air Bersih/ Air Baku	29.007.500,00
2	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	
	a. Jalan Desa	94.915.000,00
	b. Instalasi Air Bersih/ Air Baku Lainnya	32.550.000,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	
	a. Jalan Khusus	24.138.000,00
	b. Instalasi Pengolahan Sampah Organik	69.740.000,00
4	Dinas Perhubungan	
	Bangunan Air Tawar	209.791.000,00
5	Dinas Perikanan	
	Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai	109.055.421,00
	TOTAL	3.094.373.980,00



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

Pengurangan KDP Tahun 2018 dan 2017 adalah reklasifikasi nilai saldo KDP tahun sebelumnya yang telah selesai dibangun dan siap digunakan/dimanfaatkan ke Aset Tetap yang bersangkutan yaitu:

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
- Aset Tanah	0,00	144.725.000,00
- Aset Peralatan dan Mesin	303.450.000,00	0,00
- Aset Gedung dan Bangunan	8.581.168.546,05	1.152.990.194,04
- Aset Jalan, Irigasi & Jaringan	17.794.131.095,00	9.776.612.255,00
Jumlah	26.678.749.641,05	11.074.327.449,04

Pengurangan KDP dari aset Peralatan dan Mesin Kendaraan Bermotor Angkutan Barang sebesar Rp303.450.000,00, berupa truk modifikasi untuk mobilisasi alat mesin pertanian sehingga direklasifikasi ke aset tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan.

Pengurangan KDP dari aset gedung dan bangunan sebesar Rp8.581.168.546,05 terdiri dari :

- a. Koreksi aset atas SP2D tidak cair TA.2017 yang terealisasi Ta.2018 sedangkan pencatatan asetnya sudah dilakukan pada TA. 2017 sebesar Rp4.224.223.614,00 dan koreksi hasil audit inspektorat atas SP2D tidak cair Ta.2017 sebesar Rp11.587.033,47 dengan rincian :

No	SKPD	Nilai	Keterangan
1.	Dinas Kesehatan	81.957.990,00	Bangunan Kesehatan
2.	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	4.142.265.624,00	Bangunan Kesehatan
3.	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	11.587.033,47	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
Total		4.235.810.647,47	

- b. Temuan BPK RI yang disetorkan ke Kas Daerah di tahun 2018 sebesar Rp285.250.101,58 dengan rincian

No	SKPD	Nilai	Keterangan
1.	Dinas Pendidikan	20.688.250,00	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 187/STS/BPKAD/2018 10 Desember 2018
2.	Dinas Kesehatan	2.400.000,00	Bangunan Kesehatan 080/STS/BPKAD/2018 23 Mei 2018
3	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	24.341.196,54	Bangunan Gedung Kantor 016/STS/BPKAD/2018 011/STS/BPKAD/2018 23 Januari 2018
		237.820.655,04	Bangunan Kesehatan 188/STS/BPKAD/2018 06 Desember 2018
Total		285.250.101,58	



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

- c. Reklasifikasi aset dari Konstruksi Dalam Pengerjaan yang sudah selesai pengerjaan fisiknya ke aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp4.060.107.797,00

No	SKPD	Nilai	Keterangan
1.	Dinas Pendidikan	544.040.797,00	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
2.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.516.067.000,00	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar
Total		4.060.107.797,00	

Pengurangan KDP dari aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp17.794.131.095,00 terdiri dari:

- a. Koreksi aset atas SP2D tidak cair TA.2017 yang terealisasi Ta.2018 sedangkan pencatatan asetnya sudah dilakukan pada TA. 2017 sebesar Rp750.453.107,00 Jembatan Kabupaten berdasarkan hasil rapat koordinasi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air dengan pelaksana dan konsultan pengawas.
- b. Reklasifikasi aset dari Konstruksi Dalam Pengerjaan yang sudah selesai pengerjaan fisiknya ke aset Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp17.043.677.988,00 dengan rincian:

No	SKPD	Nilai	Keterangan
1.	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	10.700.745.222,00	Jalan Daerah Kabupaten/Kota
		162.577.076,00	Jalan Desa
		2.436.998.629,00	Jembatan Kabupaten/Kota
		648.532.963,00	Jembatan Desa
		3.051.834.598,00	Bangunan Pembuang Pasang Surut
2.	Dinas Perhubungan	42.989.500,00	Bangunan Air Tawar
Total		17.043.677.988,00	

Rincian per SKPD pada **Lampiran 8**.

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
7.5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan	<u>1.972.345.946.212,99</u>	<u>1.775.897.422.297,12</u>



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp1.972.345.946.212,99 dan Rp1.775.897.422.297,12 dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Jenis Aset	Akumulasi Penyusutan 1/1/18	Koreksi Penyusutan Tahun 2018	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan 31/12/18
1	Peralatan dan Mesin	254.108.022.072,01	(6.917.575.726,96)	40.820.498.687,83	288.010.945.032,88
2	Gedung dan Bangunan	204.884.722.107,44	(35.931.742,00)	32.278.613.709,00	237.127.404.074,44
3	Jalan, irigasi dan Jaringan	1.316.904.678.117,67	0,00	130.302.918.988,00	1.447.207.597.105,67
	Jumlah	1.775.897.422.297,12	(6.953.507.468,96)	203.402.031.384,83	1.972.345.946.212,99

Koreksi akumulasi penyusutan 2018 sebesar Rp6.953.507.468,96 dicatat sebagai pengurang ekuitas (koreksi ekuitas) pada awal diberlakukannya kebijakan penyusutan aset tetap tahun 2017.

Beban penyusutan Tahun 2018 dicatat sebagai Beban Operasional tahun 2018 sebesar Rp203.402.031.384,83 merupakan saldo akumulasi penyusutan aset tetap sampai dengan 31 Desember 2018 sehingga menjadi Rp1.972.345.946.212,99.

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
7.5.3.1.4 Aset Lainnya	121.712.950.952,24	103.683.105.550,43

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2018 dan 2017 terdiri dari:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
Tuntutan Perbendaharaan	546.188.061,00	576.188.061,00
Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00
Aset Tak Berwujud	15.013.184.477,55	18.733.196.966,77
Aset Lain-Lain	106.153.578.413,69	84.373.720.522,66
Jumlah	121.712.950.952,24	103.683.105.550,43

Rincian masing-masing dijelaskan sebagai berikut:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
7.5.3.1.4.1 Tuntutan Perbendaharaan	546.188.061,00	576.188.061,00

Tuntutan Perbendaharaan merupakan tuntutan atas kerugian daerah kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bendahara yang melakukan kelalaian atau penyimpangan yang berakibat pada kerugian daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

Saldo Tuntutan Perbendaharaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp546.188.061,00. Tidak ada penambahan tuntutan perbendaharaan tahun 2018 yang disebabkan kelalaian bendahara. Pengurangan dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)	Keterangan
1	NT	49.322.500,00	0,00	12.000.000,00	37.322.500,00	SK Bupati Nomor 188.45/368/KUM/2011 tanggal 4 Nov 2011
2	Gt. AR	166.783.032,00	0,00	0,00	166.783.032,00	SK Bupati Nomor 188.45/293/KUM/2012 tanggal 11 Juni 2012
3	M.Ab	182.167.116,00	0,00	18.000.000,00	164.167.116,00	SK Bupati Nomor 188.45/323/KUM/2012 tanggal 12 Juni 2012
4	AK	177.915.413,00	0,00	0,00	177.915.413,00	SK Bupati Pembebanan Sementara
Jumlah		576.188.061,00	0,00	30.000.000,00	546.188.061,00	

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
7.5.3.1.4.2 Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00

Tuntutan Ganti Rugi merupakan tuntutan atas kerugian daerah kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Non-Bendahara yang melakukan kelalaian atau penyimpangan yang berakibat pada kerugian Pemerintah. Saldo per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Nihil.

Hasil Pemantauan kerugian BPK RI per 30 November 2017 tercatat 278 kasus TGR oleh PNS Non Bendahara dengan nilai Total Rp6.805.648.400,37 dengan rincian:

- 1 Kasus TGR atas nama H. Rusdianto, S.Hut sebesar Rp473.258.000,00 yang telah diproses sejak tahun 2007 namun sampai dengan 31 Desember 2016 belum ditetapkan SKTJMnya
- 277 kasus TGR dengan nilai total Rp6.332.390.400,37 yang belum diproses penetapannya

Selain itu hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan, terdapat kasus kerugian yang melibatkan pihak ketiga sebanyak 41 kasus dengan nilai total Rp47.001.088.925,07 dengan rincian:



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

- a. 2 kasus dengan nilai total sebesar Rp29.106.725,00 yang sudah memperoleh penetapan pembebanan
- b. 39 kasus dengan nilai total sebesar Rp46.971.982.200,07 belum diproses penetapannya.

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
7.5.3.1.4.3 Aset Tak Berwujud	46.809.703.061,28	45.308.276.561,28

Aset Tak Berwujud merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Kotabaru berupa aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya seperti *software* komputer dan sistem aplikasi.

Aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi disusutkan perbulan untuk tahun pengadaan 2018 dan yang tahun pengadaannya 2016 kebawah diasumsikan disusutkan per tahun. Metode amortisasi aset tak berwujud sama halnya dengan perlakuan aset tetap yaitu menggunakan metode garis lurus.

Penentuan umur masa manfaat aset tak berwujud ditetapkan sesuai ketentuan oleh yang berwenang terhadap aset tak berwujud.

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2018 dan 2017 sebagai berikut:

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
- Saldo awal	45.308.276.561,28	41.627.081.408,00
- Penambahan	1.685.693.000,00	3.710.980.153,28
- Pengurangan	184.266.500,00	(29.785.000,00)
- Saldo akhir	46.809.703.061,28	45.308.276.561,28

Mutasi aset tak berwujud tahun 2018 adalah sebagai berikut :

No	Aset tak Berwujud	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	Software	4.243.409.879,28	364.056.000,00	0,00	4.607.465.879,28
2	Penelitian/Kajian/Survey/Rencana/Makro/Informatika&Telematika	25.382.858.341,00	1.321.637.000,00	184.266.500,00	26.520.228.841,00
3	Pra Desain Kawasan	15.682.008.341,00	0,00	0,00	15.682.008.341,00
Jumlah		45.308.276.561,28	1.685.693.000,00	184.266.500,00	46.809.703.061,28



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

Penambahan saldo aset tak berwujud sebesar Rp1.685.693.000,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :

SKPD	Uraian	Nilai (Rp)
Software		
RSUD BLUD	Realisasi Belanja Modal software SIM-RS	197.956.000,00
BPPRD	Realisasi Belanja Modal Software Aplikasi SIMPATDA ke Website dan Online Sistem BPPRD	166.100.000,00
Total Penambahan Software		364.056.000,00
Penelitian/Kajian/Survey/Rencana/Makro/Informatika & Telematika		
DCKTR	Realisasi Belanja Modal Aset Tidak Berwujud atas Utang Pengadaan Aset tetap (SP2D thn. 2017 yg tdk cair) dan telah dibayarkan thn. 2018 dgn SP2D No. 6587/SP2D/LS/02/DCKTR/2018 tgl. 6 Des 2018.	184.266.500,00
DPRPP	Realisasi Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	736.235.500,00
	Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya - Terbitan Buku Laporan ke Aset Tidak Berwujud	91.410.000,00
Dinas Perdagangan	Reklasifikasi dari Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar ke Aset Tidak Berwujud	60.000.000,00
BAPPEDA	Realisasi Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	200.000.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	Realisasi Belanja Modal Aset Tidak Berwujud - penelitian/Kajian Indeks Kualitas Lingkungan di Kec. P.L. Utara	49.725.000,00
Total Penelitian/Kajian/Survey/Rencana Makro/Informatika & Telematika		1.321.637.000,00
Total Penambahan Aset Tidak Berwujud		1.685.693.000,00

Pengurangan saldo aset tak berwujud sebesar Rp184.266.500,00 pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang merupakan pengurangan dari aset lainnya – Aset tidak berwujud Penelitian/Kajian/Survey/Rencana Makro/Informatika dan Telematika Karena pada tahun 2017 asetnya sudah tercatat/diakui atas utang pengadaan aset tetap dengan SP2D No. 8855/SP2D/LS/02/DCKTR/2017 tanggal 22 Desember 2017.

Rincian Aset Tak Berwujud per SKPD ada pada **Lampiran 9**.

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
7.5.3.1.4.4 Akumulasi Amortisasi	31.796.518.583,73	26.575.079.594,51

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kotabaru mengatur mengenai amortisasi atas aset tak berwujud. Aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi disusutkan perbulan untuk tahun pengadaan 2018 dan yang tahun pengadaannya 2016 kebawah diasumsikan disusutkan pertahun. Metode amortisasi aset tak berwujud sama halnya dengan perlakuan aset tetap yaitu menggunakan metode garis lurus. Penentuan umur masa manfaat aset tak berwujud ditetapkan sesuai ketetapan oleh yang berwenang terhadap aset tak berwujud.

Akumulasi amortisasi dengan rincian:



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

No	Aset tak Berwujud	Amortisasi per 1 Jan 2018	Koreksi Akm. Amortisasi Tahun 2017	Beban Amortisasi	Akumulasi Amortisasi per 31 Des 2018
1	Software	3.289.120.512,87	(3.222.500,00)	193.956.258,17	3.479.854.271,04
2	Penelitian/Kajian/Survey/Rencana/Makro/Informatika&Telematika	16.122.710.930,22	(3.779.008,33)	3.223.146.302,53	19.342.078.224,42
3	Pra Desain Kawasan	7.163.248.151,42	(387.434.850,00)	2.198.772.786,85	8.974.586.088,27
Jumlah		26.575.079.594,51	(394.436.358,33)	5.615.875.347,55	31.796.518.583,73

Koreksi Akumulasi Amortisasi tahun 2017 dikarenakan lebih catat Beban Amortisasi tahun 2017. Koreksi Akumulasi Amortisasi Software sebesar Rp3.222.500,00 yaitu pada Dinas Lingkungan Hidup Rp500.000,00 dan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Rp2.722.500,00. Koreksi Akumulasi Amortisasi Penelitian/Kajian/Survey/Rencana/Makro/Informatika dan Telematika sebesar Rp3.779.008,33 pada Dinas Lingkungan Hidup. Koreksi Akumulasi Amortisasi Pra Desain Kawasan sebesar Rp387.434.850,00 yaitu pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
7.5.3.1.4.5 Aset Lain-Lain	106.153.578.413,69	84.373.720.522,66

Merupakan Aset Lain-lain yang berasal dari reklasifikasi Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Kotabaru dan aset yang dianggarkan dari belanja modal, namun aset tersebut dihibahkan keluar SKPD per 31 Desember 2018 dan 2017, dengan rincian mutasi sebagai berikut:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
Saldo awal	84.373.720.522,66	124.420.859.603,53
Mutasi Penambahan	35.087.598.697,01	13.055.340.881,00
Mutasi Pengurangan	(13.307.740.805,98)	(53.102.479.961,87)
Saldo akhir	106.153.578.413,69	84.373.720.522,66

Mutasi Penambahan saldo Aset Lain-lain tahun 2018 dan 2017 terdiri dari:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
- Reklasifikasi dari Aset PM	34.903.131.197,01	0,00
- Reklasifikasi dari Aset GB	172.030.000,00	0,00
- Reklasifikasi dari ATL	12.437.500,00	0,00
- Aset Kondisi Rusak Berat	0,00	644.883.500,00
- Koreksi atas Aset P3D	0,00	2.636.735.556,00
- Koreksi Akm. Amortisasi	0,00	9.773.721.825,00
Jumlah	35.087.598.697,01	13.055.340.881,00



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

Penambahan aset lain-lain berupa aset kondisi rusak berat berdasarkan Surat Keputusan Penyusunan Laporan Sensus Barang Milik Daerah No. 188.45/584/KUM/2018 merupakan reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp34.903.131.197,01. Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp172.030.000,00 terdiri dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rp54.200.000,00 berupa Rumah Negara Golongan I, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Rp64.266.000,00 berupa Bangunan Gedung Tepat Kerja Lainnya dan Kecamatan Pulau Laut Kepulauan Rp53.564.000,00 berupa Bangunan Gedung Kantor. Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp12.437.500,00 terdiri dari Dinas Kesehatan Rp9.512.500,00 berupa Buku Umum dan pada Dinas Lingkungan Hidup Rp2.925.000,00 berupa Buku Ilmu Sosial. Adapun mutasi Penambahan dapat dirincikan sebagai berikut:

No.	SKPD	Peralatan dan Mesin	Gedung Dan Bangunan	Aset Tetap Lainnya	Jumlah
1	Dinas Kesehatan	32.245.039.340,00	0,00	9.512.500,00	32.254.551.840,00
2	Dinas Lingkungan Hidup	380.186.287,91	0,00	2.925.000,00	383.111.287,91
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.035.753.258,62	54.200.000,00	0,00	1.089.953.258,62
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	90.732.300,00	0,00	0,00	90.732.300,00
5	Inspektorat Kabupaten	63.803.183,00	0,00	0,00	63.803.183,00
6	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	224.316.253,77	64.266.000,00	0,00	288.582.253,77
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	274.930.683,02	0,00	0,00	274.930.683,02
8	Kecamatan Pulau Laut Tengah	163.789.100,00	0,00	0,00	163.789.100,00
9	Kecamatan Pulau Laut Barat	85.915.400,00	0,00	0,00	85.915.400,00
10	Kecamatan Pulau Laut Kepulauan	77.321.000,00	53.564.000,00	0,00	130.885.000,00
11	Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar	34.579.619,86	0,00	0,00	34.579.619,86
12	Dinas Ketahanan Pangan	226.764.770,83	0,00	0,00	226.764.770,83
Jumlah		34.903.131.197,01	172.030.000,00	12.437.500,00	35.087.598.697,01



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

Mutasi Pengurangan aset lain-lain sebesar Rp13.307.740.805,98 dengan rincian:

SKPD	Nilai Perolehan	Keterangan
1. Penghapusan P3D sebesar Rp2.636.735.556,00 karena asetnya sudah diserahkan kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dengan rincian :		
Dinas Pendidikan	2.607.254.916,00	1. Berita acara serah terima personel dan sarana prasarana dari pemerintah kab. Kotabaru kepada pemerintah Prov. Kal-Sel No. 07 Tahun 2018, tgl. 6 Nov 2018. 2. Keputusan Bupati Kotabaru No. 188.45/638/KUM/2018 tentang penghapusan pencatatan BMD pada Dinas Pendidikan dan Dinas Perhubungan th. 2018.
Dinas Perhubungan	29.480.640,00	
2. Reklasifikasi aset Lain-lain Rusak Berat ke Aset Tetap Peralatan Mesin - Kendaraan bermotor penumpang karena kesalahan pencatatan		
Satuan Polisi Pamong Praja	100.000.000,00	Berdasarkan usulan SKPD No. 140/63/Satpol PP tgl. 4 Jan 2019.
3. Penghapusan Aset Lain-Lain Rusak Berat sebesar Rp3.758.263.742,02		
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	90.000.000,00	Berdasarkan SK No. 188.45/52/KUM/2011
Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru	238.400.000,00	Berdasarkan SK Penghapusan No. 188.45/585/KUM/2018
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.314.241.473,00	
Dinas Perhubungan	609.531.517,00	
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	24.500.000,00	
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	200.585.000,00	
Sekretariat Daerah	754.900.000,00	
Inspektorat Kabupaten	43.000.000,00	
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	290.753.752,02	
Sekretariat KPU	16.500.000,00	
Kecamatan Pulau Laut Kepulauan	53.977.000,00	
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura	64.375.000,00	
Dinas Perikanan	52.500.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

Dinas Perdagangan	5.000.000,00		
4. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang direklasifikasi ke Aset Kondisi Rusak Berat sebesar Rp6.812.741.507,96 dengan rincian :			
SKPD	Akm. Penyusutan Peralatan dan Mesin	Akm. Penyusutan Gedung dan Bangunan	Jumlah Akumulasi Penyusutan
Dinas Kesehatan	4.620.390.036,00	0,00	4.620.390.036,00
Dinas Lingkungan Hidup	356.072.629,00	0,00	356.072.629,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.022.413.867,00	16.561.110,00	1.038.974.977,00
Inspektorat Kabupaten	63.803.183,00	0,00	63.803.183,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	149.017.696,98	9.996.933,00	159.014.629,98
Kecamatan Pulau Laut Tengah	156.706.268,00	0,00	156.706.268,00
Kecamatan Pulau Laut Barat	78.125.072,00	0,00	78.125.072,00
Kecamatan Pulau Laut Kepulauan	76.764.126,00	9.373.699,00	86.137.825,00
Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar	31.872.883,98	0,00	31.872.883,98
Dinas Ketahanan Pangan	221.644.004,00	0,00	221.644.004,00
Jumlah Akumulasi Penyusutan	6.776.809.765,96	35.931.742,00	6.812.741.507,96
Jumlah Pengurangan	13.307.740.805,98		

Aset lain-lain dari reklasifikasi Piutang Uang Muka tahun 2016 belum diterima pendapatannya sampai dengan 31 Desember 2018 dan belum adanya SKTJM sebesar Rp4.030.774.950,00 terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

No	Nama Pekerjaan	Penyedia	Nomor Kontrak	Tanggal Kontrak	Saldo Uang Muka (Rp)
1	Peningkatan Jalan Tanjung Serdang Lontar	PT. Rahmawati Suryamas	602.1/03/SP/JL/15.03/BID/WIL./DBMSD A/2013	15 Nopember 2013	1.246.603.600,00
2	Pengerasan jalan Bakarangan-Sungai Durian	CV. Hidayah	602.1/04/SP/JL/15.30/BID.WIL/DBM&SD A/2013	3 Juli 2013	44.528.650,00
3.	Pembangunan DAM/ Bendung Sungai Tagur Haping Kec. Kelumpang Utara	CV. Alfi Mandiri	602.1/50/SP/26.01-TH/DBM&SDA/2014	5 Agustus 2014	275.816.700,00
4	Pembangunan Jembatan Tanjung Serudung	CV. Daya Alam Co	602.1/06/SP/JBT/15.05/BM1/DBM&SDA /2014	11 Agustus 2014	441.791.400,00
5	Pembangunan DAM/ Bendung Sungai Riam Tiangain Kec. Sungai Durian	CV. Lina Dwi Utama	602.1/26/SP/26.01-RT/DBM&SDA/2014	23 Juni 2014	566.769.600,00
6	Pembangunan Jembatan Sekandis-Gunung Calang Kec. Pamukan Selatan	PT. Haidasari Lestari	602.1/02/SP/JBT/B M3/DBM&SDA/2014	5 Agustus 2014	592.716.000,00
7	Pembangunan Jembatan Suangai Bulan – Teluk Sirih	CV. Afiat Pratama	602.1/06/SP/JBT/15.05/BM1/DBM&SDA /2016	27 Juli 2016	609.661.800,00
8	Pembangunan Dermaga penambahan Jeti di PPL	CV. Fhitama Rezki Perdana	05/PPBJ-JETI/ULANG/DKP/2 013	11 Oktober 2013	252.887.200,00
Jumlah					4.030.774.950,00

7.5.3.2 Kewajiban

31 Desember 2018	31 Desember 2017
(Rp)	(Rp)
<u>36.493.103.581,00</u>	<u>39.889.533.739,47</u>

Saldo Kewajiban Pemerintah Kabupaten Kotabaru per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp36.493.103.581,00 dan Rp39.889.533.739,47 yang terdiri dari:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
Kewajiban Jangka Pendek:		
- Utang Perhitungan Pihak Ketiga	67.480.633,00	0,00
- Utang Jangka Pendek Lainnya	25.850.827.081,00	31.802.772.834,47
- Utang Kelebihan Transfer Pem. Pusat	0,00	0,00
- Utang Beban	10.574.795.867,00	8.086.760.905,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	36.493.103.581,00	39.889.533.739,47
Kewajiban Jangka Panjang:		
- Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban	36.493.103.581,00	39.889.533.739,47



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

Rincian masing-masing Kewajiban dijelaskan sebagai berikut:

7.5.3.2.1	Kewajiban Jangka Pendek		
7.5.3.2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	31 Desember 2018	31 Desember 2017
		(Rp)	(Rp)
		67.480.633,00	0,00

Utang PFK merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diperhitungkan kepada pihak ketiga yang jatuh tempo kurang dari satu tahun. Pada tahun 2018 terdapat pemindahan akun Utang PFK yang mana pada tahun 2017 dicatat pada akun Utang Jangka Pendek Lainnya dengan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp3.168.166.612,00 terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar Rp43.441.021,00, Pajak Penghasilan Pasal 23 Rp11.230.480,00, Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) sebesar Rp529.078.851,00 dan PPN sebesar Rp2.584.416.260,00. Utang PFK atas SP2D tahun 2017 telah disetor ke Kas Negara tanggal 13 Maret 2019.

Utang PFK per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp67.480.633,00 dengan rincian:

No	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
1	Iuran Wajib Pegawai 2 %	3.811.843.651,00	3.811.843.651,00	0,00
2	Taperum	377.717.000,00	377.717.000,00	0,00
3	Pajak Penghasilan Pasal 21	16.816.673.475,00	16.816.673.475,00	0,00
4	Pajak Penghasilan Pasal 22	1.039.310.493,00	1.039.310.493,00	0,00
5	Pajak Penghasilan Pasal 23	260.147.890,00	260.147.890,00	0,00
6	Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)	5.001.310.856,00	4.989.634.917,00	11.675.939,00
7	PPN	26.512.155.156,00	26.456.350.462,00	55.804.694,00
8	Lainnya	176.190,00	176.190,00	0,00
9	Pajak daerah	140.795.798,00	140.795.798,00	0,00
10	Iuran Wajib Pegawai 8 %	15.227.390.249,00	15.227.390.249,00	0,00
	Jumlah	69.187.520.758,00	69.120.040.125,00	67.480.633,00

7.5.3.2.1.2	Utang Beban	31 Desember 2018	31 Desember 2017
		(Rp)	(Rp)
		10.574.795.867,00	8.086.760.905,00

Akun Utang Beban merupakan kewajiban yang timbul yang sampai 31 Desember 2018 belum diselesaikan pembayarannya. Rincian mutasi Utang Beban dapat dijelaskan sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
Saldo awal	8.086.760.905,00	10.088.753.785,00
Mutasi Penambahan	9.001.726.249,00	6.054.488.059,00
Mutasi Pengurangan	(6.513.691.287,00)	(8.056.480.939,00)
Saldo akhir	10.574.795.867,00	8.086.760.905,00

Saldo awal Utang Beban sebesar Rp8.086.760.905,00 terdiri atas:

- Utang beban pada Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp5.577.201.025,00 yakni kewajiban atas belanja jasa layanan masyarakat dan kader (promotor/ fasilitator);
- Utang beban jasa pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp31.332.500,00;
- Utang beban pegawai (tunjangan profesi guru) sebesar Rp33.700.380,00
- Utang beban pegawai (tunjangan tambahan penghasilan guru) pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.460.980.000,00.
- Utang beban barang jasa pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air atas SP2D yang tidak cair Nomor 9028/SP2D/LS/02/DBM&SDA/2017 sebesar Rp861.282.000,00
- Utang beban barang jasa pada Sekretariat Daerah atas SP2D yang tidak cair Nomor 9539/SP2D/LS/02/SETDA-TAPEM/2017 Sekretariat Daerah sebesar Rp122.265.000,00

Mutasi penambahan Utang Beban sebesar Rp9.001.726.249,00 terdiri dari Utang Jasa Pelayanan dan utang obat-obatan/pemeliharaan alat kesehatan pada Dinas RSUD (BLUD) sebesar Rp4.338.741.479,00 dan atas SPM/SP2D yang tidak cair tahun 2018 sebesar Rp4.662.984.770,00 pada 5 (lima) SKPD dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Kegiatan	No. SPM	Nilai SPM
1	Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas (Terisolir & Terpencil) Pada Dinas Pendidikan Kab. Kotabaru untuk bulan Oktober s.d Desember 2018 (Sebanyak 173 Pegawai) Ta. 2018	0959/SPM/LS/01/DISDIK/2018	326.175.000,00
2	Pembayaran Insentif Kepada Guru Non PNS Untuk Daerah Terpencil & Terisolir (Terpencil 227 Org @ Rp. 600.000,- Terisolir 2 Org @ Rp. 1.100.000,- dan 19 Org @ Rp. 825.000,- Bln Oktober s/d Desember 2018 Keg. Penyediaan Jasa Guru PTT dan Guru Kontrak (22.22)	0963/SPM/LS/01/DISDIK/2018	462.225.000,00
3	By. Jasa Layanan masy. dan kader By. Pengobatan Bagi Pasien Peserta Jamkesda/SKTM di Puskesmas dan RSUD untuk Tagihan Susulan bln Nov2017, April s/d Juni, Agts dan Okt 2018 An. Mansyah, SKM. MM DPA. 28.07	0295/SPM/LS/02/DINKES/2018	34.085.820,00



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

4	Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas bagi PNS di Puskesmas dan Instalasi Farmasi pada Bulan September s.d Desember 2018, 0321/SPM/LS/01/DINKES/2018, tgl. 10/12/2018	0321/SPM/LS/01/DINKES/2018	1.933.058.000,00
5	Pembayaran Tambahan Honorarium Berdasarkan Tempat Bertugas bagi PTT di Puskesmas dan Instalasi Farmasi pada Bulan September s.d Desember 2018 0322/SPM/LS/02/DINKES/2018, tgl. 10/12/2018	0322/SPM/LS/02/DINKES/2018	380.212.000,00
6	By. 100% Pekerjaan Cetak Buku Rapor Kesehatanku Tingkat SD/MI, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA No. Kontrak 440/01/PL-38.01/KPA-PPK/DINKES/2018 Tanggal 3 Oktober 2018 An. CV. Aswaja Pressindo DPA. 38.01	0333/SPM/LS/02/DINKES/2018	83.772.150,00
7	By. 100% Pekerjaan Cetak Buku KIA No. Kontrak 440/03/PL-35.01/KPA-PPK/DINKES/2018 Tanggal 3 Oktober 2018 An. CV. Aswaja Pressindo DPA. 35.01	0334/SPM/LS/02/DINKES/2018	62.719.800,00
8	Utang Jasa Pelayanan dan utang obat-obatan dan pemeliharaan alat kesehatan		4.338.741.479,00
9	Pembayaran 100% Upah Pek.Pemeliharaan Slab Culvert Blok E Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Keg.Rehab / Pemel. Jembatan No.Kontrak 602.1/07/SPK/UPAH/18.04/WIL1/DBM&SDA/2018 Tanggal 15 Oktober 2018	0193/SPM/LS/02/DBM&SDA/2018	4.377.000,00
10	Pembayaran 100% Upah.Pek.Pemeliharaan / Penanganan Ruas Jalan Desa Buluh Kuning Kec.Sungai Durian Keg.Pemel. Rutin/Berkala dan Penanganan Ruas Jalan No.Kontrak 602.1/05/SPK/UPAH/18.08/WIL3/DBM&SDA/2018 Tgl 03 Sept 2018	0208/SPM/LS/02/DBM&SDA/2018	90.382.000,00
11	Pembayaran 100% Upah Pek. Rehabilitasi / Penanganan Box Culvert Desa Rantau Buda Kec.Sungai Durian Keg.Rehab / Pemel. Jembatan No.Kontrak 602.1/04/SPK/UPAH/18.04/WIL3/DBM&SDA/2018 Tanggal 24 September 2018	0232/SPM/LS/02/DBM&SDA/2018	39.029.000,00
12	Pembayaran 100% Pek.Pengadaan Bahan Rehabilitasi Jembatan Dengan Slab Culvert Desa Tanjung Pelayar Keg.Rehab/Pemel. Jembatan No.Kontrak 602.1/08/SPK/BHN/18.04/WIL1/DBM&SDA/2018 Tanggal 21 November 2018	0246/SPM/LS/02/DBM&SDA/2018	54.298.000,00
13	Pembayaran 100% Upah Pek. Rehabilitasi Jembatan Dengan Slab Culvert Desa Tanjung Pelayar Keg.Rehab/Pemel. Jembatan No.Kontrak 602.1/08/SPK/UPAH/18.04/WIL1/DBM&SDA/2018 Tanggal 21 November 2018	0247/SPM/LS/02/DBM&SDA/2018	20.646.000,00
14	Pembayaran 100% Pek. Pengadaan Bahan Pemeliharaan/Penanganan Jembatan Ruas Jalan Berangas Kec. Pulau Laut Timur Keg.Rehab/Pemel. Jembatan No.Kontrak 602.1/09/SPK/BHN/18.04/WIL1/DBM&SDA/2018 Tanggal 15 November 2018	0248/SPM/LS/02/DBM&SDA/2018	49.360.000,00
15	Pembayaran 100% Upah Pek. Pemeliharaan/Penanganan Jembatan Ruas Jalan Berangas Kec. Pulau Laut Timur Keg.Rehab/Pemel. Jembatan No.Kontrak 602.1/09/SPK/UPAH/18.04/WIL1/DBM&SDA/2018 Tanggal 15 November 2018	0249/SPM/LS/02/DBM&SDA/2018	19.952.000,00
16	Pembayaran 100% Pek. Pengadaan Bahan Penanganan Jembatan Tanggap Darurat Desa Sungai Hanyar Kec. Kelumpang Tengah Keg.Rehab/Pemel. Jembatan No.Kontrak 602.1/05/SPK/UPAH/18.04/WIL2/DBM&SDA/2018 Tanggal 15 November 2018	0250/SPM/LS/02/DBM&SDA/2018	10.873.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

17	Pembayaran 100% Pek. Pengadaan Bahan Penanganan Jembatan Darurat Ruas Jalan Lingkar Pulau Laut Kec. Pulau Laut Selatan Keg.Rehab/Pemeliharaan Jembatan No.Kontrak 602.1/10/SPK/BHN/18.04/WIL1/DBM&SDA/2018 Tanggal 21 November 2018	0270/SPM/LS/02/DBM&SDA/2018	38.214.000,00
18	Pembayaran 100% Pek.Pengadaan Bahan Pemeliharaan/ Penanganan Ruas Jalan Desa Trombong Sari Kec. Sungai DurianKeg.Pemel Rutin/Berkala dan Penanganan Ruas Jalan No.Kontrak 602.1/06/SPK/BHN/18.08/WIL3/DBM&SDA/2018 Tgl 19 November 2018	0271/SPM/LS/02/DBM&SDA/2018	52.614.000,00
19	Pembayaran 100% Pek. Pengadaan Bahan Rehabilitasi Jembatan dengan Slab Culvert Desa Mulyoharjo Kec. Pamukan Utara Keg.Rehab/Pemeliharaan Jembatan No.Kontrak 602.1/05/SPK/BHN/18.04/WIL3/DBM&SDA/2018 Tanggal 19 November 2018	0272/SPM/LS/02/DBM&SDA/2018	43.348.000,00
20	Pembayaran 100% Pek.Pengadaan Bahan Pemeliharaan / Penanganan Ruas Jalan Desa Mulyoharjo Kec. Pamukan Utara Keg.Pemel Rutin/Berkala dan Penanganan Ruas Jalan No.Kontrak 602.1/07/SPK/BHN/18.08/WIL3/DBM&SDA/2018 Tgl 19 November 2018	0273/SPM/LS/02/DBM&SDA/2018	77.719.000,00
21	Pembayaran 100% Upah Pek.Rehabilitasi Jembatan Dengan Slab Culvert Desa Mulyoharjo Kec.Pamukan Utara Keg.Rehab/Pemel. Jembatan No.Kontrak 602.1/05/SPK/UPAH/18.04/WIL3/DBM&SDA/2018 Tanggal 19 Nov 2018	0275/SPM/LS/02/DBM&SDA/2018	15.232.000,00
22	Pembayaran 100% Upah Pek.Pemeliharaan / Penanganan Ruas Jalan Desa Trombong Sari Kec.Sungai Durian Keg.Pemel Rutin/Berkala dan Penanganan Ruas Jalan No,Kontrak 602.1/06/SPK/UPAH/18.08/WIL3/DBM&SDA/2018 Tanggal 19 Nov 2018	0276/SPM/LS/02/DBM&SDA/2018	50.313.000,00
23	Pembayaran 100% Upah Pek.Pemeliharaan / Penanganan Ruas Jalan Desa Mulyoharjo Keg.Pemel Rutin/Berkala dan Penanganan Ruas Jalan No,Kontrak 602.1/07/SPK/UPAH/18.08/WIL3/DBM&SDA/2018 Tanggal 19 Nov 2018	0277/SPM/LS/02/DBM&SDA/2018	43.663.000,00
24	Pembayaran 100% Upah Pek.Pemeliharaan / Penanganan Ruas Jalan Desa Sekayu baru - Betung Kec. Pamukan Utara Keg.Pemel Rutin/Berkala dan Penanganan Ruas Jalan No,Kontrak 602.1/08/SPK/UPAH/18.08/WIL3/DBM&SDA/2018 Tanggal 19 Nov 2018	0278/SPM/LS/02/DBM&SDA/2018	145.528.000,00
25	Pmbyrn MC.1,2,3,4 100% Pkrjn Lanjutan Air Bersih (PAMSIMAS) Kec.Kelumpang Hilir, Keg. Pemb. sarana dan prasarana air bersih perdesaan, Kntrk No.602/03/SP-PAMSIMAS.KELP.HLR/BGJK/DCKTR/2018, Tgl.10-7-2018, Rp.224.986.000,-	0255/SPM/LS/02/DCKTR/2018	213.736.700,00
26	Pmbyrn Retensi 5% Pkrjn Lanjutan Air Bersih (PAMSIMAS) Kec.Kelumpang Hilir, Keg. Pemb. sarana dan prasarana air bersih perdesaan, Kntrk No.602/03/SP-PAMSIMAS.KELP.HLR/BGJK/DCKTR/2018, Tgl.10-7-2018, Rp.224.986.000, Pmlhrn No.55.19.18.00875.1.13.01.0	0256/SPM/LS/02/DCKTR/2018	11.249.300,00
27	Pmbyrn 100% Pkrjn Pengawasan Teknis: Lanjutan Air Bersih (PAMSIMAS) Kec.Kelumpang Hilir, Keg. Pemb. sarana dan prasarana air bersih	0257/SPM/LS/02/DCKTR/2018	8.360.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

	perdesaan, Kntkr No.602/12/SPK/PGWS/BGJK/DCKTR/2018, Tgl.10-7-2018, Rp.8.360.000,-		
28	Pmbyrn 100% Pkrjn Pengembangan PIPANISASI IKK Kelumpang Utara Kabupaten Kotabaru, Keg. Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum, Kontrak No.602/14/PPK- SPK/PPIKKSRPUDI/APBDP-SPAM- DCKTR/2018, Tgl.19-11-2018, Rp.97.943.000,-	0264/SPM/LS/02/DCKTR/2018	97.943.000,00
29	Pembayaran sbsr 100%. Pek.Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat. Kegiatan peningkatan Produksi Buah dan Aneka Tanaman. Brdsrkn SPK.No.15/SP/PPK/TPH- 19.21/DTPHP/2018. Tgl 4 Oktober 2018. NK. Rp. 293.900.000,-	0136/SPM/LS/02/DTPHP/2018	293.900.000,00
	Jumlah Penambahan Utang Beban		9.001.726.249,00

Mutasi pengurangan Utang Beban sebesar Rp6.513.691.287,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Kegiatan	No. SP2D	Nilai SPM
1	Koreksi Utang Beban pada Dinas Kesehatan		31.332.500,00
2	Utang Jasa Pelayanan dan utang obat-obatan dan pemeliharaan alat kesehatan		5.498.811.787,00
3	Pembayaran Tahap II (60%) Pek.Belanja Jasa Konsultan Inventarisasi Jalan dan Jembatan	6379/SP2D/LS/02/DBM&SDA/2018	861.282.000,00
4	Biaya Belanja Cetak Koordinasi Pemerintah Daerah dan Spanduk Pemberantasan Pungli	6850/SP2D/LS/02/SETDA/2018	122.265.000,00
	Jumlah Pengurangan Utang Beban		6.513.691.287,00

Mutasi pengurangan Utang Beban sebesar Rp31.332.500,00 pada Dinas Kesehatan adalah koreksi karena adanya pembayaran utang pada tahun 2017 yang belum tercatat pada akun Utang Beban tahun 2017. Koreksi atas utang berdasarkan bukti pembayaran berupa Kwitansi tanggal 28 Februari 2017 dengan rincian “Rujukan Mei s.d Agustus 2015”.

7.5.3.2.1.3	Utang Kelebihan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	Transfer Pemerintah	(Rp)	(Rp)
	Pusat	0,00	0,00

Berdasarkan Konfirmasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, Pemerintah Pusat tidak mengakui adanya utang kelebihan transfer, sehingga tahun 2018 dan 2017 tidak ada utang kelebihan transfer pada Pemerintah Pusat.

7.5.3.2.1.4	Utang Jangka Pendek	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	Lainnya	(Rp)	(Rp)
		25.850.827.081,00	31.802.772.834,47



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

Akun Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan kewajiban yang timbul yang sampai 31 Desember 2018 belum diselesaikan pembayarannya. Rincian mutasi Utang Jangka Pendek Lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
Saldo awal	31.802.772.834,47	839.273.000,00
Mutasi Penambahan	22.280.476.466,00	31.204.888.834,47
Mutasi Pengurangan	(28.232.422.219,47)	(241.389.000,00)
Saldo akhir	25.850.827.081,00	31.802.772.834,47

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp25.850.827.081,00 terdiri dari:

- Utang Jangka Pendek Lainnya terdiri dari Utang Pengadaan Aset Tetap per 31 Desember 2018 sebesar Rp25.850.827.081,00 dan belum diajukan pencairannya sampai dengan 31 Desember 2018 terdiri dari utang SP2D yang tidak cair per 31 Desember 2014 oleh Dinas Kebudayaan dan pariwisata sebesar Rp12.950.000,00, Per 31 Desember 2015 sebesar Rp6.868.500,00 pada Dinas Cipta karya, Pemukiman dan Perumahan dan sebesar Rp28.021.000,00 pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Per 31 Desember 2016 kekurangan Pembayaran termin atas Pekerjaan Pembangunan RSUD pada Dinas Cipta Karya, Pemukiman dan Perumahan sebesar Rp550.044.500,00. Dan Per 31 Desember 2017 sebesar Rp2.972.466.615,00 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- Penambahan Utang atas SPM yang tidak cair sebesar Rp22.280.476.466,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Kegiatan	No.SPM	Nilai Utang
1	By. 100% Pekerjaan Pengadaan IPAL Puskesmas Kotabaru No. Kontrak 602.1/003/SP/PKM-KOTABARU/25.07/DINKES-YANKES/2018 Tanggal 08 Juni 2018 An. CV. Nambur Marlata DPA. 25.07	0280/SPM/LS/02/DIN KES/2018	474.728.726,00
2	By. 100% Pekerjaan Rehab Rumah Dinas Paremedis Puskesmas Gn. Batu Besar No. Kontrak 602.1/015/SP/PKM-GN.BT.BESAR/25.35/DINKES-YANKES/2018 Tanggal 09 Juli 2018 An.CV. Asyirra Indo Konstruksi DPA. 25.35	0282/SPM/LS/02/DIN KES/2018	202.958.000,00
3	By. Retensi 5% Pekerjaan Rehab Rumah Dinas Paremedis Puskesmas Gn. Batu Besar No. Kontrak 602.1/015/SP/PKM-GN.BT.BESAR/25.35/DINKES-YANKES/2018 Tanggal 09 Juli 2018 An.CV. Asyirra Indo Konstruksi DPA. 25.35	0283/SPM/LS/02/DIN KES/2018	10.682.000,00
4	By.100% Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Ruang Rawat Inap Puskesmas Marabatuan No. Kontrak 602.1/005/SP/PKM-MRBTN/25.19/DINKES/YANKES/2018 Tanggal 06 Juni 2018 An. CV. Dhania DPA. 25.19	0298/SPM/LS/02/DIN KES/2018	549.213.772,00
5	By.Retensi 5% Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Ruang Rawat Inap Puskesmas Marabatuan No. Kontrak 602.1/005/SP/PKM-MRBTN/25.19/DINKES/YANKES/2018 Tanggal 06 Juni 2018 An. CV. Dhania DPA. 25.19	0300/SPM/LS/02/DIN KES/2018	42.247.218,00
6	By. 100% Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Puskesmas Ruang Rawat Inap Puskesmas Tanjung	0324/SPM/LS/02/DIN KES/2018	406.077.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

No.	Nama Kegiatan	No.SPM	Nilai Utang
	Samalantakan No. Kontrak 602.1/069/SP/PKM-TG.SAMALANTAKAN/25.19/DINKES-YANKES/2018 Tanggal 9 Agustus 2018 An. CV Bluebells DPA. 25.19		
7	By. 100% Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Ruang Rawat Inap Pusk. Tg. Selayar No. Kontrak 602.1/075/SP-TG.SELAYAR/25.19/DINKES-YANKES/2018 Tgl 09 Agustus 2018 An. CV. Dhania DPA. 25.19	0324.a/SPM/LS/02/DINKES/2018	561.600.000,00
8	By. Retensi 5% Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Puskesmas Ruang Rawat Inap Puskesmas Tanjung Samalantakan No. Kontrak 602.1/069/SP/PKM-TG.SAMALANTAKAN/25.19/DINKES-YANKES/2018 Tanggal 9 Agustus 2018 An. CV Bluebells DPA. 25.19	0325/SPM/LS/02/DINKES/2018	38.859.700,00
9	By. Retensi 5% Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Ruang Rawat Inap Pusk. Tg. Selayar No. Kontrak 602.1/075/SP-TG.SELAYAR/25.19/DINKES-YANKES/2018 Tgl 09 Agustus 2018 An. CV. Dhania DPA. 25.19	0326/SPM/LS/02/DINKES/2018	43.200.000,00
10	By. 100% Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Puskesmas Ruang Rawat Inap Puskesmas Tg. Samalantakan No. Kontrak 602.1/SPK/PGWS/25.19/PPRRIPM/DISKES/2018 Tanggal 9 Agustus 2018 An. CV. Fathir Al Maeqaly Engineer DPA. 25.19	0335/SPM/LS/02/DINKES/2018	42.955.000,00
11	By. 100% Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Puskesmas Ruang Rawat Inap Puskesmas Tg. Selayar No. Kontrak 602.1/075/SPK/PKM.TG.SELAYAR/25.19/DINKES-YANKES/2018 Tanggal 9 Agustus 2018 An. CV. Ramier Jaya Arkananta DPA. 25.19	0336/SPM/LS/02/DINKES/2018	42.725.000,00
12	By. 100% Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Puskesmas Ruang Rawat Inap Puskesmas Marabatuan No. Kontrak 602.1/SPK/PGWS/25.19/PPRRIPM/DISKES/2018 Tanggal 6 Juni 2018 An. CV. Mandiri Tata Sarana Consultant DPA. 25.19	0337/SPM/LS/02/DINKES/2018	42.933.000,00
13	By. 100% Pekerjaan Pembangunan Poskesdes Pantai Gedambaan No. Kontrak 602.1/099/SP/POSKEDES-GEDAMBAAN/25.05/DINKES-YANKES/2018 Tanggal 5 Nov 2018 An. CV. Budi Karya DPa. 25.05	0339/SPM/LS/02/DINKES/2018	163.280.300,00
14	By. 100% Pekerjaan Pembangunan Poskesdes Pantai Gedambaan No. Kontrak 602.1/099/SP/POSKEDES-GEDAMBAAN/25.05/DINKES-YANKES/2018 Tanggal 5 Nov 2018 An. CV. Budi Karya DPa. 25.05	0340/SPM/LS/02/DINKES/2018	8.593.700,00
15	By. 100% Pekerjaan Pengawasan Teknis Pengadaan IPAL Puskesmas Kotabaru No. Kontrak 602.1/006/SP/KON-KOTABARU/25.07/DINKES-YANKES/2018 Tanggal 8 Juni 2018 An. CV. Assa Indo Teknika DPA. 25.07	0341/SPM/LS/02/DINKES/2018	32.800.000,00
16	By. 100% Pengawasan Teknis Pembangunan Poskesdes Pantai Gedambaan SPK 602.1/076/SPK/PWS/POSKEDES-GEDAMBAAN/25.05/DINKES-YANKES/2018 Tanggal 5 Nov 2018 An. CV. Ans Consulindo DPA. 25.05	0347/SPM/LS/02/DINKES/2018	11.900.000,00
17	By. 100% Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan UGD Puskesmas Sungai Kupang No. Kontrak 03/PWS/PSPP-25.07/DINKES/2018 Tanggal 16 Juli 2018 An. CV. Vivalavida Teknika DPA. 25.07	0348/SPM/LS/02/DINKES/2018	11.974.000,00
18	Pembayaran TERMIN I, II, III Dan IV (Fisik 100%) Pek. Peningkatan Jalan Poros Tarjun Serongga Kec. Kelumpang Hilir No.Kontrak 602.1/06/SP/JL-TS/JLN.02-BM/2018 Tgl. 02 Juli 2018	0214/SPM/LS/02/DB M&SDA/2018	3.702.186.557,00



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

No.	Nama Kegiatan	No.SPM	Nilai Utang
19	Pembayaran 100% Pek. Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan Terminal Kelumpang Hilir Kec. Kelumpang Hilir No.Kontrak 602.1/13/SPK/PWS/JL-TKH/JLN02-BM/2018 Tgl. 28 Agustus 2018	0234/SPM/LS/02/DB M&SDA/2018	28.435.000,00
20	Pembayaran Sekaligus (100%) Pek.Konsultan Perencana DIR Mangga Kec.Kelumpang Utara Keg.Pembangunan/Peningkatan Sarana & Prasarana Irigasi No.Kontrak 602.1/03/SPK/PRC/24.20-MG/DBM&SDA/2018 Tgl 12 Nov 2018	0244/SPM/LS/02/DB M&SDA/2018	49.500.000,00
21	Pembayaran Sekaligus (100%) Pek.Konsultan Perencana Perencanaan DIR Tanjung Seloka Kec.Pulau Laut Selatan Keg.Pembangunan/Peningkatan Sarana & Prasarana Irigasi No.Kontrak 602.1/04/SPK/PRC/24.20-TS/DBM&SDA/2018 Tanggal 12 Nov 2018	0245/SPM/LS/02/DB M&SDA/2018	49.500.000,00
22	Pembayaran Termin III (Fisik 100%) Sebesar 55% Pek. Peningkatan Jalan Malangkayan Hampang - Gadang Kec.Hampang Keg.Pening. Jln Wil II No.Kontrak 602.1/05/SP/JL-MHG/JLN.02-BM/2018 Tgl. 02 Juli 2018 No.ADD 602.1/05.a/SP/JL-MHG/JLN.02-BM/2018 Tgl 8 Agt 2018	0251/SPM/LS/02/DB M&SDA/2018	1.176.427.853,00
23	Pembayaran Termin I, II, III & IV (Fisik 100%) Sebesar 95% Pek.Peningkatan Struktur Ruas Jalan Desa Sungai Bali - Desa Sekapung (Lanjutan) Keg.Peningkatan Jalan Wilayah I No.Kontrak 602.1/11/SP/JL-SBDS/JLN.01-BM/2018 Tanggal 09 Agust 2018	0253/SPM/LS/02/DB M&SDA/2018	1.248.488.710,00
24	Pembayaran Sekaligus Pek.Konsultan Pengawas Peningkatan Struktur Ruas Jalan Desa Sungai Bali - Desa Sekapung (Lanjutan) Keg.Peningkatan Jalan Wilayah I No.Kontrak 602.1/11/SP/JL-SBDS/JLN.01-BM/2018 Tanggal 09 Agust 2018	0254/SPM/LS/02/DB M&SDA/2018	64.185.000,00
25	Pembayaran 100% Pek.Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan Malangkayan - Hampang - Gadang Kec.Hampang No.Kontrak 602.1/05/SPK/PWS/JL-MHG/JLN02-BM/2018 Tgl. 02 Juli 2018 No.ADD 602.1/05.1/ADD/SPK/PWS/JL-MHG/JLN02-BM/2018 Tgl 25 Oktober 2018	0255/SPM/LS/02/DB M&SDA/2018	87.340.000,00
26	Pembayaran 100% Pek.Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan Poros Tarjun - Serongga Kec.Kelumpang Hilir No.Kontrak 602.1/06/SP-PWS/JL-TS/JLN.02-BM/2018 Tgl 02 Juli 2018 dan No.ADD Kontrak 602.1/06.a/ADD/SP-PWS/JL-TS/JLN.02-BM/2018 Tgl 24 Oktober 2018	0256/SPM/LS/02/DB M&SDA/2018	74.690.000,00
27	Pembayaran Termin III & IV (Fisik 100%) Sebesar 55% Pek.Peningkatan Jalan Poros Magalau - Sampanahan (Lanjutan) Kec.Kelumpang Barat - Kec.Sampanahan Keg.Peningkatan Jalan Wilayah III No.Kontrak 602.1/07/SP/JL-MS/JLN.03-BM/2018 Tanggal 05 Juli 2018	0257/SPM/LS/02/DB M&SDA/2018	3.852.045.345,00
28	Pembayaran Sekaligus (Fisik 100%) Pek.Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan Poros Magalau - Sampanahan (Lanjutan) 602.1/07/SP-PWS/JL-MS/JLN.03-BM/2018 Tgl 05 Juli 2018 dan No. ADD 602.1/07.a/ADD/SP-PWS/JL-MS/JLN.03-BM/2018 Tgl. 29 Okt 2018	0258/SPM/LS/02/DB M&SDA/2018	36.322.308,00
29	Pembayaran 100% Pek.Konsultan Perencana Peningkatan Struktur Ruas Jalan Sampanahan - Desa Sangsang Kec.Sampanahan Keg.Peningkatan Jalan Wilayah III No.Kontrak 602.1/22/SPK/PRC-SSS/JLN3-BM/2018 Tanggal 12 November 2018	0259/SPM/LS/02/DB M&SDA/2018	43.341.000,00
30	Pembayaran 100% Pek.Konsultan Perencana Peningkatan Struktur Ruas Jalan Sulangit - Tanjung	0260/SPM/LS/02/DB M&SDA/2018	58.092.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

No.	Nama Kegiatan	No.SPM	Nilai Utang
	Samalantakan (K14-005) Kec.Pamukan Selatan Keg.Peningkatan Jalan Wilayah III No.Kontrak 602.1/21/SPK/PRC-STJ/JLN3-BM/2018 Tanggal 12 November 2018		
31	Pembayaran 100% Pek.Konsultan Perencana Peningkatan Struktur Ruas Jalan Tanjung Batu - Sulangkit (K13-002) Keg.Peningkatan Jalan Wilayah II No.Kontrak 602.1/16/SPK/PRC-TBS/JLN2-BM/2018 Tanggal 12 November 2018	0261/SPM/LS/02/DB M&SDA/2018	66.378.000,00
32	Pembayaran 100% Pek.Konsultan Perencana Peningkatan Ruas Jalan Siayuh - Sampanahan (K12-001) Kec.Kelumpang Barat Keg.Peningkatan Jalan Wilayah II No.Kontrak 602.1/18/SPK/PRC-SS/JLN2-BM/2018 Tanggal 12 November 2018	0262/SPM/LS/02/DB M&SDA/2018	91.328.000,00
33	Pembayaran 100% Pek.Konsultan Perencana Peningkatan Struktur Ruas Jalan Sungai Pinang-Pasar Sungai Pinang (K03-002) Ruas Jalan Polsek Pulau Laut Tengah (K03-004) dan Ruas Jalan SMA 1 Pulau Laut Tengah (K03-005) No.Kontrak 602.1/17/SPK/PRC-SPPLT/JLN1-BM/20	0264/SPM/LS/02/DB M&SDA/2018	43.015.000,00
34	Pembayaran 100% Pek.Konsultan Perencana (Review) Peningkatan Struktur Ruas Jalan Tanjung Serdang-Lontar (K03-006) & Ruas Jalan Lontar-Tanjung Seloka (K05-001) (Review Design) No.Kontrak 602.1/15/SPK/PRC-TSLTS/JLN1-BM/2018 Tgl 12 Nov 2018	0265/SPM/LS/02/DB M&SDA/2018	57.339.000,00
35	Pembayaran 100% Pek.Konsultan Perencana Peningkatan Jalan Poros Plajau Baru - Pantai (Review Design) Kec.Kelumpang Selatan Keg.Peningkatan Jalan Wilayah II No.Kontrak 602.1/19/SPK/PRC-PBP/JLN2-BM/2018 Tgl 12 Nov 2018	0266/SPM/LS/02/DB M&SDA/2018	66.587.000,00
36	Pembayaran 100% Pek.Konsultan Perencana Peningkatan Struktur Ruas Jalan Simpang Banian - Sungai Durian (K17-001) Kec.Sungai Durian Keg.Peningkatan Jalan Wilayah III No.Kontrak 602.1/14/SPK/PRC-SBSD/JLN3-BM/2018 Tanggal 12 Nov 2018	0267/SPM/LS/02/DB M&SDA/2018	48.630.000,00
37	Pembayaran Retensi 5% Pek. Peningkatan Jalan Poros Tarjun Serongga Kec. Kelumpang Tengah No.Kontrak 602.1/06/SP/JL-TS/JLN.02-BM/2018 Tgl. 02 Juli 2018	0269/SPM/LS/02/DB M&SDA/2018	246.812.437,00
38	Pembayaran Man Month Bulan 3&4 Pek.Konsultan Pengawas Peningkatan Struktur Ruas Jalan Semaras-Lontar-Tanjung Seloka No.Kontrak 602.1/10/SP-PWS/JL-SLTS/JLN.01-BM/2018 Tgl 07 Agust 2018 ADD.602.1/10.a/ADD/SP-PWS/JL-SLTS/JLN.01-BM/2018 Tgl 07 Agus 2018	0274/SPM/LS/02/DB M&SDA/2018	75.240.000,00
39	Pembayaran Retensi (5%) Pek.Peningkatan Jalan Malangkayan - Hampang - Gadang Kec.Hampang Keg.Pening. Jln Wil II No.Kontrak 602.1/05/SP/JL-MHG/JLN.02-BM/2018 Tgl. 02 Juli 2018 No.ADD 602.1/05.a/SP/JL-MHG/JLN.02-BM/2018 Tgl 8 Agt 2018	0279/SPM/LS/02/DB M&SDA/2018	175.000.000,00
40	Pembayaran 100% Pek.Konsultan Pengawas Peningkatan Struktur Ruas Jalan Sekayu Baru - Bakau - Sengayam No.Kontrak 602.1/03/SP-PWS/JL-SBBS/JLN.03-BM/2018 Tgl 02 Jul 2018 No ADD 602.1/03.a/ADD/SP-PWSJL-SBBS/JLN.03-BM/2018 Tgl 23 Okto 2018	0280/SPM/LS/02/DB M&SDA/2018	16.249.103,00
41	Pembayaran Retensi (5%) Pek.Peningkatan Struktur Ruas Jalan Desa Sungai Bali - Sekapung (Lanjutan) Keg.Peningkatan Jalan Wilayah I No.Kontrak 602.1/11/SP/JL-SBDS/JLN.01-BM/2018 Tanggal 09 Agust 2018	0284/SPM/LS/02/DB M&SDA/2018	65.709.932,00



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

No.	Nama Kegiatan	No.SPM	Nilai Utang
42	Pembayaran Retensi (5%) Pek.Peningkatan Jalan Poros Magalau - Sampanahan (Lanjutan) Kec.Kelumpang Barat - Kec.Sampanahan Keg.Peningkatan Jalan Wilayah III No.Kontrak 602.1/07/SP/JL-MS/JLN.03-BM/2018 Tanggal 05 Juli 2018	0285/SPM/LS/02/DB M&SDA/2018	493.851.967,00
43	Pembayaran 100% Pek.Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan Nelayan Desa Hilir Muara Kec.P.L.Utara Keg.Peningkatan Jalan Wilayah I No.Kontrak 602.1/14/SPK/PWS/JL-JLHM/JLN01-BM/2018 Tgl 10 Sep 2018 ADD 602.1/14.1/ADD/SPK/PWS/JL-JLHM/JLN01-BM/2018 Tgl 06 Des	0286/SPM/LS/02/DB M&SDA/2018	68.887.000,00
44	Pembayaran Prestasi Akhir Setelah Dilakukan Pemutusan Kontrak (20,23%) Pek.Peningkatan Struktur Ruas Jalan Semaras-Lontar-Tanjung Seloka No.Kontrak 602.1/10/SP/JL-SLTS/JLN.01-BM/2018 Tgl 07 Agust 2018 No.ADD 602.1/10.a/ADD/SP/JL-SLTS/JLN.01-BM/2018 Tgl 07	0287/SPM/LS/02/DB M&SDA/2018	11.730.000,00
45	Pembayaran 100% Pek.Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan Ratu Intan Desa Serongga Kec.Kelumpang Hilir Keg.Peningkatan Jalan Wilayah II No.Kontrak 602.1/12/SP-PWS/JL-RI/JLN.02-BM/2018 Tgl 20 Agus 2018 No.ADD 602.1/12.a/ADD/SP-PWS/JL-RI/JLN.02-BM/2018 Tgl 1	0291/SPM/LS/02/DB M&SDA/2018	55.440.000,00
46	Pembayaran Termin I,II,III&IV (Fisik 100% Pek.Peningkatan Jalan Ratu Intan Desa Serongga No.Kontrak 602.1/12/SP/JL-RI/JLN.02-BM/2018 Tgl 20 Agus 2018 ADD.602.1/12.a/ADD/SP/JL-RI/JLN.02-BM/2018 Tgl 17 Sep 2018 No.Jam.Pmbyr 3/KTB/GBPT/18 Tgl 21 Des 2018	0293/SPM/LS/02/DB M&SDA/2018	2.246.809.850,00
47	Pembayaran Retensi (5%) Pek.Peningkatan Jalan Ratu Intan Desa Serongga No.Kontrak 602.1/12/SP/JL-RI/JLN.02-BM/2018 Tgl 20 Agus 2018 ADD.602.1/12.a/ADD/SP/JL-RI/JLN.02-BM/2018 Tgl 17 Sep 2018 No.Jam.Pmbyr 3/KTB/GBPT/18 Tgl 21 Des 2018	0298/SPM/LS/02/DB M&SDA/2018	118.253.150,00
48	Pembayaran 100% Pek.Konsultan Perencana Pembangunan Jembatan Hutan Meranti Putih Kec. Pulau Laut Utara Keg.Pembangunan Jembatan Wilayah I No.Kontrak 602.1/01/SPK/PRC/15.24/DBM&SDA/2018 Tgl 07 Nov 2018	0299/SPM/LS/02/DB M&SDA/2018	97.350.000,00
49	Pembayaran Termin I, II, III & IV (Fisik 100%) Pek.Peningkatan Jalan Nelayan Desa Hilir Muara Kec.Pulau Laut Utara Keg.Peningkatan Jalan Wilayah I No.Kontrak 602.1/14/SP/JL-JN/JLN.01-BM/2018 Tgl. 10 Sep 2018 No Jam Pmbyr 4/KTB/GBPT/18 Tgl 21 Des 2018	0288/SPM/LS/02/DB M&SDA/2018	1.388.262.784,00
50	Pembayaran Retensi 5% Pek.Peningkatan Jalan Nelayan Desa Hilir Muara Kec.Pulau Laut Utara Keg.Peningkatan Jalan Wilayah I No.Kontrak 602.1/14/SP/JL-JN/JLN.01-BM/2018 Tgl. 10 September 2018	0300/SPM/LS/02/DB M&SDA/2018	106.789.445,00
51	Pmbyrn 100% Pkrjn Pengadaan Bahan Kimia Tawas Kabupaten Kotabaru, Keg. Pengembangan Teknologi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah, Kontrak No.602/11/PPK-SPK/BKTAWAS/APBD-SPAM-DCKTR/2018, Tgl.12-11-2018, Rp.71.775.000,-	0259/SPM/LS/02/DC KTR/2018	71.775.000,00
52	Pmbyrn 100% Pkrjn Pengadaan Bahan Kimia Kaporit Kabupaten Kotabaru, Keg. Pengembangan Teknologi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah, Kontrak No.602/12/PPK-SPK/BKKAPORIT/APBD-SPAM-DCKTR/2018, Tgl.12-11-2018, Rp.71.775.000,-	0260/SPM/LS/02/DC KTR/2018	71.775.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

No.	Nama Kegiatan	No.SPM	Nilai Utang
53	Pembayaran 100% Pekerjaan Konsultan Pengawas Pembangunan Tugu di Siring Laut. Sesuai Kontrak No. 602.1/PPK/2553427/PWS-TUGU/DISBUDPAR/2018. Tgl 18 Mei 2018. Dan No Addendum 602.1/ADD/PPK/2553427/PWS-TUGU/DISBUDPAR/2018. Nilai Kontrak Rp. 92.966.500,00	0137/SPM/LS/02/DISBUDPAR/2018	92.966.500,00
54	Pembayaran 100% Pekerjaan Pembangunan Tugu di Siring Laut. Sesuai Kontrak No. 08/SP/TUGU.SL-PPSP/DISBUDPAR/2018. Tanggal Kontrak, 18 Mei 2018. Nilai Kontrak Rp. 4.778.493.261,23	0135/SPM/LS/02/DISBUDPAR/2018	3.108.090.946,00
55	Pembayaran Retensi 5% Pekerjaan Pembangunan Tugu di Siring Laut. Sesuai Kontrak No. 08/SP/TUGU.SL-PPSP/DISBUDPAR/2018. Tanggal Kontrak, 18 Mei 2018. Nilai Kontrak Rp. 4.778.493.261,23	0136/SPM/LS/02/DISBUDPAR/2018	238.924.663,00
Jumlah Penambahan Utang Jangka Pendek Lainnya			22.280.476.466,00

- Pengurangan Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp28.232.422.219,47 terdiri dari Pemindahan akun saldo Utang PFK per 31 Desember 2017 sebesar Rp3.168.166.612,00 pada tahun 2018 dicatat pada akun Utang PFK.
- Pengurangan karena adanya koreksi sebesar Rp762.040.140,47 pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air sebesar Rp750.453.107,00 koreksi atas dasar berita acara rapat pekerjaan pembangunan jembatan penghubung Pulau Laut – Pulau Kalimantan pada tanggal 1 Maret 2018 dengan nomor surat undangan 630/13/JBT/DBM&SDA/2018 Tanggal 28 Februari 2018 dan koreksi pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sebesar Rp11.587.033,47 berdasarkan hasil Monev Inspektorat Kotabaru No. 700/03-WIL.IV/IK, tanggal 6 Maret 2018.
- Pengurangan Utang Pengadaan Aset Tetap sebesar Rp24.302.215.467,00 berdasarkan pencairan SP2D tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Kegiatan	No.SP2D	Nilai SP2D
1	Pemby 22% Pek.Pembg Rumah Dinas Guru SDN Manunggul Lama Kec.Sungai Durian	7398/SP2D/LS/02/DISDIK/2018	56.402.237,00
2	Pemby 65% Pek.Rehab Ruang Kelas SDN Mangga Kec. Kelp. Utara	6874/SP2D/LS/02/DISDIK/2018	270.271.298,00
3	Pemby.49% Pek.Pemb.Rumdin Guru SDN Gendang Timburu Kec.Sei.Durian	6873/SP2D/LS/02/DISDIK/2018	155.939.334,00
4	Pemby.84% Pek.Pemb.Rumdin Guru SDN Sang Sang Kec.Kelp.Tengah	7399/SP2D/LS/02/DISDIK/2018	239.858.790,00
5	By. 42.08% Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Ruang Perawatan PKM Tamianggeronggang	6285/SP2D/LS/02/DINKES/2018	84.357.990,00
6	By. 100% Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Ruang Rawat Inap Puskesmas Bakau	6397/SP2D/LS/02/DINKES/2018	453.757.200,00
7	By. Retensi 5% Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Ruang Rawat Inap Puskesmas Bakau	6398/SP2D/LS/02/DINKES/2018	34.904.400,00
8	Pembayaran Termin I, II (Fisik 73,02) Pek.Pembangunan Jembatan Rt.02 Desa Stagen Kec.Pulau Laut Utara	6757/SP2D/LS/02/DBM&SDA/2018	195.097.087,00
9	Pembayaran Termin I, II (Fisik 80,5%) Pek.Peningkatan Jalan Komplek Perumahan Karya Utama Blok A dan Blok C	6760/SP2D/LS/02/DBM&SDA/2018	136.577.466,00
10	Pembayaran Termin I, II (Fisik 83,22%) Pek.Pembangunan Jembatan Rt.12 Desa Lintang Jaya Kec.Pamukan Utara	6758/SP2D/LS/02/DBM&SDA/2018	195.918.450,00
11	Pembayaran Prestasi Akhir Pekerjaan sebesar 18,18% Pek.Peningkatan Jalan Sulangkit Tanjung Samalantakan	6761/SP2D/LS/02/DBM&SDA/2018	816.467.125,00



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

No.	Nama Kegiatan	No.SP2D	Nilai SP2D
	Kec.Pamukan Selatan		
12	Pembayaran Termin I (Fisik 30,53%) Pek.Pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Laut - Pulau Kalimantan Kec.Pulau Laut Tengah	6759/SP2D/LS/02/DBM&SDA/2018	10.878.788.639,00
13	Pembayaran Termin II, III (Fisik 100%) Pek.Peningkatan Ruas Jalan Sepagar Sebanti Kec.Pulau Laut Barat	6709/SP2D/LS/02/DBM&SDA/2018	3.194.844.000,00
14	Pembayaran Retensi (5%) Pek.Peningkatan Ruas Jalan Sepagar Sebanti Kec.Pulau Laut Barat	6710/SP2D/LS/02/DBM&SDA/2018	235.835.800,00
15	Pembayaran 100% Konsultan Perencana Pmbangunan Jembatan Pantai Baru dan Konsultan Perencana Pembangunan Jembatan Desa Bumi Asih Kec. Kelp. Selatan	6708/SP2D/LS/02/DBM&SDA/2018	28.325.000,00
16	Pmbyrn 100% Pkrjn Pengumpulan Data GCP Kawasan Sebelimbangan dan Sekitarnya	6587/SP2D/LS/02/DCKTR/2018	184.266.500,00
17	Pmbyrn 100% Pkrjn Biaya Operasional IKK Lontar Kec.Pulau Laut Barat. Keg.Pngktn Distribusi Pnydn Air Baku	6852/SP2D/LS/02/DCKTR/2018	112.500.000,00
18	Pmbyrn 100% Biaya Operasional IKK Pudi Kec. Kelumpang Utara, Keg.Pngktn Distribusi Pntdn Air Baku	6853/SP2D/LS/02/DCKTR/2018	112.500.000,00
19	Pmbyrn 100% Biaya Operasional IKK Hampang Kec. Hampang. Keg. Pnngktn dstbrs pnydan air baku	6854/SP2D/LS/02/DCKTR/2018	112.500.000,00
20	Pmbyrn MC.3 49.62% Pkrjn Pemb. Rumah Sakit Umum Daerah (Lanjutan) Kec. PLU Kab. Kotabaru	6460/SP2D/LS/02/DCKTR/2018	4.142.265.624,00
21	Pmbyrn 100% Pkrjn Pengadaan Mobil Jenazah Besar Kab. Kotabaru	6608/SP2D/LS/02/DCKTR/2018	433.735.000,00
22	Permintaan Pembayaran 100% Keperluan Pekerjaan Pembangunan Workshop Las	6255/SP2D/LS/02/DISNAKERTRANS/2018	860.113.027,00
23	Pembayaran 100% pekerjaan Pengadaan Genset Pembangkit Listrik Untuk Ekowisata	6396/SP2D/LS/02/DLH/2018	161.359.000,00
24	Pembayaran 100% Pekerjaan Pembangunan Tempat Parkir	6883/SP2D/LS/02/DISPERIK/2018	18.994.300,00
25	Pembayaran 100% Pembuatan Rest Area di Objek Wisata Pantai Gedambaan	6399/SP2D/LS/02/DISBUDPAR/2018	1.017.117.600,00
26	Pembayaran 5% Pembuatan Rest Area di Objek Wisata Pantai Gedambaan	6400/SP2D/LS/02/DISBUDPAR/2018	169.519.600,00
	Jumlah Pengurangan Utang Jangka Pendek Lainnya		24.302.215.467,00

7.5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

7.5.3.2.2.1 Utang Jangka Panjang Lainnya	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
	0,00	0,00

Utang jangka panjang lainnya per 31 Desember 2018 dan 2017 nihil.

7.5.3.3 Ekuitas	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
	2.881.051.622.181,46	2.818.065.551.771,22



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

Merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban per 31 Desember 2018 dan 2017.

Pada TA 2016 sudah menyajikan berdasarkan akuntansi berbasis Akrua sehingga penyajian ekuitas menjadi hanya satu akun. Saldo ekuitas 31 Desember 2018 sebesar Rp2.881.051.622.181,46 atau meningkat sebesar Rp62.986.070.410,24 atau 2,24% dari ekuitas TA 2017 dengan rincian sebagai berikut:

- Kenaikan Aset Lancar	8.531.537.050,88
- Kenaikan Investasi Jangka Panjang	35.634.518.033,65
- Kenaikan Aset Tetap	193.954.225.281,36
- Kenaikan Aset Lainnya	23.135.217.724,36
- Kenaikan Kewajiban	3.396.430.158,47
- Kenaikan Akumulasi Penyisihan Piutang	(111.961.600,06)
- Kenaikan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(196.448.523.915,87)
- Kenaikan Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(5.105.372.322,55)
Jumlah	62.986.070.410,24

Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Kotabaru telah menerapkan penyisihan piutang, penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tak berwujud sehingga saldo ekuitas di neraca telah menggambarkan nilai kekayaan bersih yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kotabaru.

Saldo ekuitas di neraca sama dengan saldo ekuitas akhir dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang secara tidak langsung menggambarkan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam satu tahun anggaran.



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

7.5.4. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional (LO) disajikan sebagai bagian dari laporan keuangan tahun 2018. LO tahun 2018 disajikan dengan perbandingan laporan tahun 2017, karena laporan keuangan tahun 2017 sudah menyajikan berbasis akrual.

7.5.4.1 Pendapatan - LO

Pendapatan-LO Kabupaten Kotabaru adalah Pendapatan untuk tahun 2018 dan 2017 sebesar Rp1.460.262.866.253,75 dan Rp1.443.675.862.637,81 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Realisasi Pendapatan – LO Tahun 2018 dan 2017

No	Pendapatan - LO	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Asli Daerah – LO	130.341.615.953,18	120.142.747.023,35	10.198.868.929,83	8,49
2	Pendapatan Transfer–LO	1.286.023.064.148,43	1.276.331.084.605,42	9.691.979.543,01	0,76
3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah – LO	43.898.186.152,14	47.202.031.009,04	(3.303.844.856,90)	(7,00)
	Jumlah	1.460.262.866.253,75	1.443.675.862.637,81	16.587.003.615,94	1,15

7.5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah – LO

Pendapatan Asli Daerah – LO Kabupaten Kotabaru adalah Pendapatan untuk tahun 2018 dan 2017 sebesar Rp130.341.615.953,18 dan Rp120.142.747.023,35 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel Realisasi Pendapatan Asli Daerah – LO
Tahun 2018 dan 2017**

No	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pajak Daerah– LO				
	a. Pajak Hotel	347.267.472,00	319.111.242,00	28.156.230,00	8,82
	b. Pajak Losmen	11.853.000,00	10.570.000,00	1.283.000,00	12,14
	c. Pajak Restoran	5.566.372.485,00	5.204.922.637,00	361.449.848,00	6,94
	d. Pajak Rumah Makan	93.282.800,00	97.410.525,00	(4.127.725,00)	(4,24)
	e. Pajak Warung	24.212.000,00	24.150.000,00	62.500,00	0,26
	f. Cafeteria	200.000,00	0,00	200.000,00	100
	g. Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	8.056.000,00	4.500.000,00	3.556.000,00	79,02
	h. Tontonan Film/Bioskop	0,00	0,00	0,00	0,00
	i. Pajak Diskotik, Karaoke, Klab Malam dan Sejenisnya	149.259.897,00	204.615.139,00	(55.355.242,00)	(27,05)
	j. Permainan Bilyar, Golf, Bowling	3.045.900,00	1.491.900,00	1.554.000,00	104,16
	k. Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan	6.477.000,00	3.054.900,00	3.422.100,00	112,02



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

	l. Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat Kebugaran	4.727.100,00	4.878.750,00	(151.650,00)	(3,11)
	m. Pertandingan Olahraga	13.620.000,00	10.250.000,00	3.370.000,00	32,88
	n. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	259.502.812,00	297.111.937,00	(37.609.125,00)	(12,66)
	o. Pajak Reklame Kain	12.796.784,00	15.753.825,00	(2.957.041,00)	(18,77)
	p. Pajak Parkir	27.339.300,00	0,00	27.339.300,00	0,00
	q. Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	8.750.948.159,00	7.387.159.821,00	1.363.788.338,00	18,46
	r. Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	4.810.761.761,00	3.850.786.158,00	959.975.603,00	24,93
	s. Pajak Air Tanah	20.319.846,00	17.291.414,00	3.028.432,00	17,51
	t. Pajak Sarang Burung Walet	46.250.900,00	0,00	46.250.900,00	0,00
	u. Batu Kapur	15.899.853.863,00	15.843.681.992,00	46.171.871,00	0,29
	v. Pasir dan kerikil	3.525.948.092,37	2.907.697.704,59	618.250.387,78	21,26
	w. Tanah Serap (Fullers earth)	1.100.237.552,00	836.064.180,00	264.173.372,00	31,60
	x. Tanah Diatome	992.228.749,00	1.152.485.601,00	(160.256.852,00)	(13,91)
	y. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	2.922.062.049,00	2.730.590.453,00	191.471.596,00	7,01
	z. BPHTB - Pemindahan Hak	268.018.175,00	320.620.100,00	(52.601.925,00)	(16,41)
	aa BPHTB - Pemberian Hak Baru	19.694.349.880,00	2.623.025.803,00	17.071.324.077,00	650,83
	Jumlah (1)	64.558.991.576,37	43.867.224.081,59	20.691.767.494,78	47,17
2	Retribusi Daerah- LO				
	a. Pelayanan kesehatan di Puskesmas	341.074.923,00	229.073.980,00	112.000.943,00	48,89
	b. Pengambilan/Pengumpulan Sampah dari Sumbernya ke Lokasi	156.973.000,00	230.220.500,00	(73.247.500,00)	(31,82)
	c. Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	216.074.000,00	176.192.000,00	39.882.000,00	22,64
	d. Retribusi Pelayanan Pasar – Pelataran	3.000.000,00	9.000.000,00	(6.000.000,00)	(66,67)
	e. Retribusi Pelayanan Pasar – Kios	388.478.165,00	324.208.624,00	64.269.541,00	19,82
	f. Retribusi PKB - Mobil Bus – Bus	9.622.500,00	13.465.000,00	(3.842.500,00)	(28,54)
	g. Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban – Truck	79.337.500,00	213.220.500,00	(133.883.000,00)	(62,79)
	h. Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3	217.500,00	520.000,00	(302.500,00)	(58,17)
	i. Penyediaan Peta Dasar (Garis)	18.150.000,00	22.200.000,00	(4.050.000,00)	(18,24)
	j. Penyewaan Tanah dan Bangunan	228.098.048,00	177.511.548,00	50.586.500,00	28,50



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

	k. Ruangan	159.224.300,00	104.209.500,00	55.014.800,00	52,79
	l. Kendaraan Bermotor	208.295.000,00	104.980.000,00	103.315.000,00	98,41
	m. Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir berbagai Jenis Barang	1.647.184.967,00	1.648.992.767,00	1.807.800,00	0,11
	n. Pelelangan Ikan	384.000,00	900.000,00	(516.000,00)	(57,33)
	o. Tempat Kegiatan Usaha	0,00	396.000,00	(396.000,00)	(100,00)
	p. Pelayanan Tempat Khusus Parkir	180.953.000,00	158.340.000,00	22.613.000,00	14,28
	q. Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	0,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	r. Pelayanan Tempat Rekreasi	212.181.500,00	170.608.500,00	41.573.000,00	24,37
	s. Pelayanan Tempat Pariwisata	118.124.000,00	151.766.000,00	(33.642.000,00)	(22,17)
	t. Pelayanan Tempat Olahraga	0,00	200.000,00	(200.000,00)	(100,00)
	u. Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah	35.240.000,00	184.060.000,00	(148.820.000,00)	(80,85)
	v. Pemberian Izin Untuk Mendirikan Bangunan	923.773.000,00	735.368.000,00	188.405.000,00	25,62
	w. Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi	0,00	358.979.250,00	(358.979.250,00)	(100,00)
	x. Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi	0,00	800.000,00	(800.000,00)	(100,00)
	y. Pemberian Izin Trayek kepada Badan	21.800.000,00	16.600.000,00	5.200.000,00	31,33
	z. Penggunaan Ruas Jalan Tertentu	4.082.325,00	2.069.600,00	2.012.725,00	97,25
	aa Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	104.361.380,00	0,00	104.361.380,00	0,00
	Jumlah (2)	5.056.629.108,00	5.034.881.769,00	21.747.339,00	0,43
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan- LO				
	a. Bank KAL-SEL	12.481.102.458,00	10.958.612.947,00	1.522.489.511,00	13,89
	b. PDAM	0,00	0,00	0,00	0,00
	c. BPR Pulau Laut Utara	209.856.242,14	82.725.855,00	127.130.387,14	153,68
	d. PT. MUPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah (3)	12.690.958.700,14	11.041.338.802,00	1.649.619.898,14	14,94
4	Lain Lain PAD yang Sah- LO				
	a. Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	92.100.000,00	54.150.000,00	37.950.000,00	70,08
	b. Jasa Giro Kas Daerah	2.320.854.485,00	6.536.591.449,24	(4.215.736.964,24)	(64,49)
	c. Jasa Giro Kas Bendahara	87.961.962,00	67.548.109,00	67.548.109,00	(100,00)
	d. Pendapatan Bunga	0,00	5.874.657.526,00	(5.874.657.526,00)	(100,00)
	e. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	2.285.366.733,15	1.603.852.669,50	681.514.063,65	42,49



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

f. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	774.788.017,00	1.615.161.701,00	(840.373.684,00)	(52,03)
g. Denda Pajak	134.505.177,00	181.837.671,04	(47.332.494,04)	(26,03)
h. Denda Retribusi	(2.516.335,00)	(24.509,02)	(2.491.825,98)	10.166,98
i. Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pelaksanaan dan uang muka	1.207.610.748,80	884.202.000,00	323.408.748,80	36,58
j. Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan	169.144.594,00	193.896.912,00	(24.752.318,00)	(12,77)
k. Pendapatan dari Pengembalian Lain-lain	233.057.479,00	168.188.285,00	64.869.194,00	38,57
l. Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	32.950.434.818,21	35.663.291.580,00	(2.712.856.761,79)	(7,61)
m. Lumpsum Payment	0,00	264.630.444,00	(264.630.444,00)	(100,00)
n. Pendapatan Dana Kapitasi JKN	5.678.966.406,00	5.932.633.804,00	(253.667.398,00)	(4,28)
o. Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN	443.755.000,00	0,00	443.755.000,00	0,00
p. Pendapatan Lain-lain BLUD	716.749.341,51	640.508.860,00	76.240.481,51	11,90
q. Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	683.908.227,00	518.175.869,00	165.732.358,00	31,98
Jumlah (4)	48.035.036.568,67	60.199.302.370,76	(12.164.265.802,09)	(20,21)
Total Jumlah (1 s/d 4)	130.341.615.953,18	120.142.747.023,35	10.198.868.929,83	8,49

Pendapatan pajak daerah – LO disajikan sebesar Rp64.558.991.576,37 sedangkan pendapatan pajak daerah – LRA disajikan sebesar Rp63.436.269.358,00 atau terdapat selisih sebesar Rp1.122.722.218,37. Perbedaan tersebut disebabkan adanya pelunasan piutang TA 2018 sebesar Rp2.922.062.049,00 dan adanya penambahan piutang pada TA 2018 sebesar Rp1.799.339.830,63 dengan rincian sebagai berikut:

a. Saldo Akhir Piutang TA 2018	Rp16.389.916.022,63
b. Saldo Akhir Piutang TA 2017	<u>Rp15.267.193.804,26</u>
Selisih	Rp1.122.722.218,37

Pendapatan retribusi daerah – LO disajikan sebesar Rp5.056.629.108,00 sedangkan pendapatan retribusi daerah – LRA disajikan sebesar Rp5.085.736.912,00 atau terdapat selisih sebesar (Rp29.107.804,00). Perbedaan tersebut disebabkan adanya pelunasan piutang TA 2018 sebesar Rp102.449.300,00 dan penambahan piutang TA 2018 sebesar Rp131.557.104,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Saldo Akhir Piutang TA 2018	Rp550.738.398,00
b. Jumlah Saldo Akhir Piutang TA 2017	<u>Rp579.846.202,00</u>
Selisih	(Rp29.107.804,00)



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

Pendapatan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan – LO disajikan sebesar Rp12.690.958.700,14 atau terdapat selisih sebesar Rp81.804.752,14 dengan pendapatan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan – LRA disajikan sebesar Rp12.609.153.948,00. Perbedaan karena atas kurang catat bagian laba yang disetor oleh PD. BPR Pulau Laut Utara tahun 2017.

Pendapatan Lain-lain PAD yang sah – LO disajikan sebesar Rp48.035.036.568,67, sedangkan pendapatan lain-lain PAD yang sah – LRA disajikan sebesar Rp50.752.899.453,26 atau terdapat selisih sebesar (Rp2.717.862.885,59). Perbedaan tersebut disebabkan adanya pelunasan piutang TA 2018 sebesar Rp8.938.383.916,00 dan penambahan piutang TA 2018 sebesar Rp11.656.246.800,59 dengan rincian sebagai berikut:

a. Saldo Akhir Piutang TA 2018	Rp9.125.023.553,67
b. Saldo Akhir Piutang TA 2017	<u>Rp11.842.886.439,26 -</u>
Selisih	(Rp2.717.862.885,59)

Pendapatan Transfer– LO

Pendapatan Transfer – LO Kabupaten Kotabaru adalah Pendapatan untuk tahun 2018 Rp1.286.023.064.148,43 tahun 2017 sebesar Rp1.276.331.084.605,42 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Realisasi Pendapatan Transfer – LO
Tahun 2018 - 2017

No	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Transfer Pemerintah Pusat – dana Perimbangan– LO				
	a. DAU	612.929.409.000,00	597.207.951.000,00	15.721.458.000,00	2,63
	b. DAK	167.498.841.495,00	139.811.925.930,00	27.686.915.565,00	19,80
	c. Bagi Hasil Pajak	49.189.299.562,00	58.112.914.380,00	(8.923.614.818,00)	(15,36)
	d. Bagi Hasil SDA	174.922.522.213,00	156.124.882.485,00	18.797.639.728,00	12,04
	Jumlah (1)	1.004.540.072.270,00	951.257.673.795,00	53.282.398.475,00	5,60
2	Transfer Pemerintah Pusat lainnya - LO				
	a. Dana Penyesuaian	144.947.050.000,00	160.077.727.200,00	(15.130.677.200,00)	(9,45)
	b. Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah (2)	144.947.050.000,00	160.077.727.200,00	(15.130.677.200,00)	(9,45)
3	Transfer Pemerintah Provinsi - LO				
	a. Bagi Hasil Pajak Provinsi	136.535.941.878,43	164.995.683.610,42	(28.459.741.731,99)	(17,25)
	b. Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah (3)	136.535.941.878,43	164.995.683.610,42	(28.459.741.731,99)	(17,25)
	Total Jumlah (1 s/d 3)	1.286.023.064.148,43	1.276.331.084.605,42	9.691.979.543,01	0,76



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

Pendapatan transfer pemerintah pusat – dana perimbangan LO disajikan sama dengan yang disajikan di pendapatan transfer pemerintah pusat – dana perimbangan LRA sebesar Rp1.004.540.072.270,00.

Pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya – LO disajikan sebesar Rp144.947.050.000,00 sama dengan yang disajikan pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya – LRA.

Pendapatan transfer bagi hasil pajak pemerintah (LO) disajikan sebesar Rp136.535.941.878,43 sedangkan pendapatan transfer bagi hasil pajak pemerintah provinsi (LRA) disajikan sebesar Rp113.499.696.290,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp23.036.245.588,43. Perbedaan tersebut disebabkan adanya pelunasan piutang TA 2017 dan penambahan piutang TA 2018 dengan rincian:

a. Piutang Akhir TA 2018	Rp108.415.347.869,07
b. Piutang Akhir TA 2017	<u>Rp85.379.102.280,64</u>
Selisih	Rp23.036.245.588,43
Dengan rincian sebagai berikut:	
a. Piutang Pem Prov TA 2018	Rp49.768.252.852,07
b. Piutang Pem Prov TA 2017	<u>Rp28.055.468.603,64</u>
Selisih	Rp21.712.784.248,43
c. Piutang Pem Pusat TA 2018	Rp58.647.095.017,00
d. Piutang Pem Pusat TA 2017	<u>Rp57.323.633.677,00</u>
Selisih	Rp1.323.461.340,00

7.5.4.1.2 Lain-lain Pendapatan yang Sah- LO

Lain Lain Pendapatan yang Sah – LO Kabupaten Kotabaru untuk tahun 2018 sebesar Rp43.898.186.152,14 dan tahun 2017 sebesar Rp47.202.031.009,04 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel
Realisasi Lain Lain Pendapatan yang Sah – LO
Tahun 2018 – 2017

No	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
Pendapatan Hibah – LO					
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00	0,00
2	Pendapatan dana BOS	37.688.329.910,00	40.495.384.985,00	(2.807.055.075,00)	(6,93)
3	Pendapatan Hibah dari Pihak Ketiga	0,00	450.543.044,00	(450.543.044,00)	(100,00)
4	Pendapatan Lainnya	209.856.242,14	256.102.980,04	(46.246.737,90)	(18,06)
Jumlah		43.898.186.152,14	47.202.031.009,04	(3.303.844.856,90)	(7,00)

Lain-lain pendapatan yang sah – LO sebesar Rp43.898.186.152,14 yang disajikan dalam LRA sebesar Rp43.688.329.910,00 atau terdapat selisih sebesar Rp209.856.242,14. Perbedaan tersebut disebabkan adanya kenaikan Penyertaan



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

modal pada BPR Pulau Laut atas pengumuman laba tahun 2018 sebesar Rp209.856.242,14.

Pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Kotabaru untuk Hibah Air Minum Perkotaan yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri APBN TA. 2018 dengan nomor Perjanjian Hibah Daerah PHD-41/AMK/MK.7/2018 sebesar Rp6.000.000.000,00 merupakan hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum Pusat kepada PDAM yang sudah dicairkan melalui SP2D Nomor 1068/SP2D/LS/03/PPKD/2018 25 April 2018 berupa dana talangan.

Pendapatan Hibah dana BOS Pusat Tahun 2018 sebanyak 279 sekolah negeri dibawah Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru memperoleh hibah dana BOS dari pemerintah provinsi dengan nilai total sebesar Rp37.688.329.910,00. Atas pendapatan hibah tersebut telah dilakukan pengesahan oleh BUD sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kotabaru.

Pendapatan Lainnya sebesar Rp209.856.242,14 merupakan kenaikan penyertaan modal akibat pengumuman laba pada BPR Pulau Laut TA. 2018.

7.5.4.2 **Beban**

Jumlah Beban Daerah untuk 2018 sebesar Rp1.420.053.238.258,55 dan 2017 sebesar Rp1.536.356.723.871,55 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Realisasi Beban Tahun 2018 - 2017

No	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Operasi	1.208.022.923.497,55	1.262.199.304.153,55	(54.176.380.656,00)	(7,57)
2	Beban Transfer	212.030.314.761,00	274.157.419.718,00	(62.127.104.957,00)	(75,00)
	Jumlah	1.420.053.238.258,55	1.536.356.723.871,55	(116.303.485.613,00)	(7,57)

Uraian masing-masing beban adalah sebagai berikut:

7.5.4.2.1 **Beban Operasi**

Tabel Realisasi Beban Operasi Tahun 2018 - 2017

No	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Pegawai	480.409.502.130,00	467.891.658.224,00	12.517.843.906,00	2,68
2	Beban Barang dan Jasa	467.295.836.305,59	506.142.431.098,43	(38.846.594.792,84)	(7,68)
3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Beban Hibah	43.526.985.792,00	81.096.791.512,38	(37.569.805.720,38)	(46,33)
6	Beban Bantuan Sosial	860.000.000,00	1.900.000.000,00	(1.040.000.000,00)	(54,74)
7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	209.017.906.732,38	199.038.779.145,41	9.979.127.586,97	5,01
8	Beban Penyisihan Piutang	344.421.579,27	526.997.442,74	(182.575.863,47)	(34,64)
9	Beban Lain – Lain	6.568.270.958,31	5.602.646.730,59	965.624.227,72	17,24
	Jumlah	1.208.022.923.497,55	1.262.199.304.153,55	(54.176.380.656,00)	(4,29)

Beban Operasi Kabupaten Kotabaru adalah Beban Operasi untuk tahun 2018 sebesar Rp1.208.022.923.497,55 dan tahun 2017 sebesar Rp1.262.199.304.153,55 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

Beban pegawai (LO) disajikan sebesar Rp480.409.502.130,00 sedangkan belanja pegawai yang disajikan (LRA) disajikan sebesar Rp478.150.269.130,00 atau terdapat selisih sebesar **Rp2.259.233.000,00**. Selisih tersebut karena adanya SPM Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas yang belum dicairkan sampai dengan 31 Desember 2018 pada Dinas Pendidikan sebesar **Rp326.175.000,00** (Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas (Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas (Terisolir & Terpencil) Pada Dinas Pendidikan Kab. Kotabaru untuk bulan Oktober s.d Desember 2018 Sebanyak 173 Pegawai Tahun 2018) dan pada Dinas Kesehatan sebesar **Rp1.933.058.000,00** (Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas bagi PNS di Puskesmas dan Instalasi Farmasi pada Bulan September s.d Desember 2018)

Beban barang dan jasa (LO) disajikan sebesar Rp467.295.836.305,59 sedangkan belanja barang dan jasa (LRA) disajikan sebesar Rp477.256.973.270,70 atau terdapat selisih sebesar Rp9.961.136.965,11. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Koreksi Penambahan Beban Barang jasa	Rp1.826.494.972,60
b. Koreksi Pengurangan Beban Barang Jasa	<u>Rp11.787.631.937,71 -</u>
Jumlah	Rp9.961.136.965,11

Dalam beban barang jasa diantaranya terdapat beban persediaan sebesar Rp69.566.484.254,89 dengan rincian sebagai berikut:

a. Persediaan Akhir TA 2017	Rp17.968.973.815,15
b. Realisasi Belanja Persediaan TA 2018	<u>Rp70.619.477.832,00</u>
Jumlah	Rp88.588.451.647,15
c. Persediaan Akhir TA 2018	<u>Rp19.021.967.392,26 -</u>
Beban Persediaan TA 2018	Rp69.566.484.254,89

Tabel Realisasi Beban Barang Jasa Tahun 2018 – 2017

No	Uraian	2018	2017	Kenaikan/Penurunan	%
1	Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	20,238,651,150.56	19,008,313,677.44	1,230,337,473.12	6.47
2	Beban Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	0.00	2,184,100.00	(2,184,100.00)	(100.00)
3	Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2,266,546,680.00	2,918,791,008.00	(652,244,328.00)	(22.35)
4	Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	793,410,160.00	1,016,245,100.00	(222,834,940.00)	(21.93)
5	Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	697,524,804.60	849,866,424.00	(152,341,619.40)	(17.93)
6	Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	5,182,553,728.00	4,338,491,161.00	844,062,567.00	19.46
7	Beban Persediaan Pengisian Isi Tabung Gas	118,337,250.00	124,535,750.00	(6,198,500.00)	(4.98)
8	Beban pembuatan logo,plakat, vandell dan	384,114,000.00	472,238,000.00	(88,124,000.00)	(18.66)



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

	sejenisnya				
9	Beban Kebutuhan Harian Rumah Tangga KDH/WKDH	1,565,272,172.00	1,567,410,331.00	(2,138,159.00)	(0.14)
10	Beban Bahan Briket	0.00	196,152,000.00	(196,152,000.00)	(100.00)
11	Beban Persediaan Bahan Baku Bangunan	146,710,500.00	458,257,250.00	(311,546,750.00)	(67.99)
12	Beban Persediaan Bahan/Bibit Tanaman	314,325,520.00	520,276,025.00	(205,950,505.00)	(39.58)
13	Beban Persediaan Bibit Ternak	49,890,200.00	154,585,000.00	(104,694,800.00)	(67.73)
14	Beban Persediaan Bahan Obat-obatan	122,194,392.83	5,445,960,139.39	(5,323,765,746.56)	(97.76)
15	Beban Persediaan Bahan Kimia	959,330,415.00	1,342,185,421.00	(382,855,006.00)	(28.52)
16	Beban Bahan Pameran	547,884,650.00	379,871,886.00	168,012,764.00	44.23
17	Beban Perlengkapan Olah Raga	81,922,000.00	172,741,000.00	(90,819,000.00)	(52.58)
18	Beban Bahan Pelatihan	328,182,000.00	592,123,500.00	(263,941,500.00)	(44.58)
19	Beban Perlengkapan Lapangan	104,110,400.00	472,040,100.00	(367,929,700.00)	(77.94)
20	Beban Bahan Percontohan Pengendalian Hama Penyakit	0.00	22,880,000.00	(22,880,000.00)	(100.00)
21	Beban Pakan Ternak	180,650,000.00	165,872,000.00	14,778,000.00	8.91
22	Beban Bahan penelitian	498,000.00	0.00	498,000.00	-
23	Beban Jasa telepon	267,531,291.00	323,701,695.00	(56,170,404.00)	(17.35)
24	Beban Jasa air	934,612,135.00	712,049,012.00	222,563,123.00	31.26
25	Beban Jasa listrik	7,174,947,153.00	6,542,053,144.00	632,894,009.00	9.67
26	Beban Jasa Surat Kabar/Majalah	876,325,100.00	901,618,600.00	(25,293,500.00)	(2.81)
27	Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet	1,183,797,224.00	1,012,299,307.00	171,497,917.00	16.94
28	Beban Jasa Paket/Pengiriman	353,530,500.00	292,183,430.00	61,347,070.00	21.00
29	Beban Jasa Sertifikasi	69,250,000.00	13,350,000.00	55,900,000.00	418.73
30	Beban Jasa Cleaning Service	2,419,433,000.00	2,517,970,000.00	(98,537,000.00)	(3.91)
31	Beban Jasa Montir/Tukang, Revarasi/Service	480,214,500.00	459,173,000.00	21,041,500.00	4.58
32	Beban Jasa Angkutan Penyeberangan Ferry	414,733,089.00	409,634,300.00	5,098,789.00	1.24
33	Beban Retribusi Sampah	17,115,000.00	11,830,000.00	5,285,000.00	44.67
34	Beban Jasa Propaganda dan Penyiaran	5,570,817,215.00	4,539,200,693.00	1,031,616,522.00	22.73
35	Beban Dokumentasi	379,157,500.00	263,234,500.00	115,923,000.00	44.04
36	Beban Dekorasi	1,937,143,395.00	1,687,286,039.00	249,857,356.00	14.81
37	Beban Visum Et Repertum	4,702,950.00	6,371,900.00	(1,668,950.00)	(26.19)
38	Beban Perkara	7,500,000.00	5,800,000.00	1,700,000.00	29.31
39	Beban Jasa Uji Sampel	186,679,692.00	229,358,481.00	(42,678,789.00)	(18.61)
40	Beban Jasa Portir	35,050,000.00	9,300,000.00	25,750,000.00	276.88
41	Beban Operasional Sekolah	4,520,601,000.00	6,749,389,500.00	(2,228,788,500.00)	(33.02)
42	Beban Jasa Kerjasama Pendidikan	222,000,000.00	63,500,000.00	158,500,000.00	249.61
43	Beban Jasa Pengolahan, Pengelolaan dan Perbibitan	234,488,400.00	836,855,300.00	(602,366,900.00)	(71.98)
44	Beban Jasa Layanan Masyarakat dan Kader (Promotor/Fasilitator)	28,334,511,110.00	31,524,778,213.00	(3,190,267,103.00)	(10.12)



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

45	Beban Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23,260,486,913.70	22,461,620,582.60	798,866,331.10	3.56
46	Beban Jasa Event Organisation (EO)	1,810,468,000.00	0.00	1,810,468,000.00	-
47	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan	0.00	22,000,000.00	(22,000,000.00)	(100.00)
48	Beban Premi Asuransi Perjalanan dan Tugas-tugas Kedinasan	106,041,600.00	0.00	106,041,600.00	-
49	Beban Jasa Service	475,774,179.00	455,578,195.00	20,195,984.00	4.43
50	Beban Penggantian Suku Cadang	1,271,676,672.00	1,448,605,668.00	(176,928,996.00)	(12.21)
51	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1,456,178,705.00	1,525,024,939.00	(68,846,234.00)	(4.51)
52	Beban Jasa KIR	8,865,000.00	19,263,100.00	(10,398,100.00)	(53.98)
53	Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan	360,815,100.00	408,229,078.00	(47,413,978.00)	(11.61)
54	Beban Cetak	5,609,423,422.90	4,829,658,137.00	779,765,285.90	16.15
55	Beban Penggandaan	3,211,709,639.00	3,776,697,590.00	(564,987,951.00)	(14.96)
56	Beban Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	42,000,000.00	11,200,000.00	30,800,000.00	275.00
57	Beban Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	1,513,746,401.00	1,668,290,990.00	(154,544,589.00)	(9.26)
58	Beban Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	69,220,000.00	54,450,000.00	14,770,000.00	27.13
59	Beban Sewa Mess/Asrama	0.00	6,750,000.00	(6,750,000.00)	(100.00)
60	Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat	87,550,000.00	158,060,000.00	(70,510,000.00)	(44.61)
61	Beban Sewa Sarana Mobilitas Air	20,000,000.00	7,800,000.00	12,200,000.00	156.41
62	Beban Sewa Eskavator	0.00	18,000,000.00	(18,000,000.00)	(100.00)
63	Beban Sewa Meja Kursi	257,180,000.00	186,525,000.00	70,655,000.00	37.88
64	Beban Sewa Tenda	560,695,000.00	468,684,000.00	92,011,000.00	19.63
65	Beban Sewa Pakaian Adat/Tradisional	98,850,000.00	37,450,000.00	61,400,000.00	163.95
66	Beban Sewa Soundsystem	472,000,000.00	405,800,000.00	66,200,000.00	16.31
67	Beban Sewa Taman	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	-
68	Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai	8,160,263,738.00	7,939,764,900.00	220,498,838.00	2.78
69	Beban Makanan dan Minuman Rapat	8,151,689,817.00	7,405,623,452.00	746,066,365.00	10.07
70	Beban Makanan dan Minuman Tamu	4,237,187,269.00	4,193,944,618.00	43,242,651.00	1.03
71	Beban Makanan dan Minuman Pelatihan	862,103,200.00	866,826,726.00	(4,723,526.00)	(0.54)
72	Beban Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	5,443,225,350.00	5,610,233,296.00	(167,007,946.00)	(2.98)
73	Beban pakaian Dinas KDH dan WKDH	81,100,000.00	88,500,000.00	(7,400,000.00)	(8.36)
74	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	143,172,000.00	212,569,500.00	(69,397,500.00)	(32.65)
75	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	143,102,500.00	101,602,500.00	41,500,000.00	40.85
76	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	1,551,731,000.00	1,087,404,050.00	464,326,950.00	42.70
77	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	105,282,000.00	100,078,000.00	5,204,000.00	5.20
78	Beban Pakaian Dinas	240,433,000.00	60,618,000.00	179,815,000.00	296.64



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

	Lapangan (PDL)				
79	Beban Pakaian kerja lapangan	1,050,430,750.00	1,122,071,000.00	(71,640,250.00)	(6.38)
80	Beban Pakaian KORPRI	85,915,020.00	32,505,000.00	53,410,020.00	164.31
81	Beban Pakaian Adat Daerah	0.00	2,500,000.00	(2,500,000.00)	(100.00)
82	Beban Pakaian Batik Tradisional	1,333,954,600.00	961,568,500.00	372,386,100.00	38.73
83	Beban Pakaian Olahraga	1,471,194,250.00	1,298,788,550.00	172,405,700.00	13.27
84	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39,927,538,934.00	40,457,701,948.00	(530,163,014.00)	(1.31)
85	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	83,058,360,986.00	108,472,493,881.00	(25,414,132,895.00)	(23.43)
86	Beban Pemulangan Pegawai yang Pensiun Dalam Daerah	0.00	1,000,000.00	(1,000,000.00)	(100.00)
87	Beban Pemulangan Pegawai yang Pensiun Luar Daerah	3,100,000.00	4,174,000.00	(1,074,000.00)	(25.73)
88	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3,389,753,316.00	4,282,066,906.00	(892,313,590.00)	(20.84)
89	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,803,073,525.00	5,238,386,478.00	(2,435,312,953.00)	(46.49)
90	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	7,728,684,826.00	13,064,621,728.00	(5,335,936,902.00)	(40.84)
91	Beban Jasa Konsultansi Penelitian	699,659,500.00	3,530,437,600.00	(2,830,778,100.00)	(80.18)
92	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	65,494,000.00	3,769,902,400.00	(3,704,408,400.00)	(98.26)
93	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan	56,866,000.00	22,095,000.00	34,771,000.00	157.37
94	Beban Jasa Konsultasi Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	380,335,000.00	871,695,300.00	(491,360,300.00)	(56.37)
95	Beban Jasa Konsultasi Teknologi Informatika	0.00	275,000,000.00	(275,000,000.00)	(100.00)
96	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	(2,384,595,298.00)	0.00	(2,384,595,298.00)	-
97	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	(3,042,424,500.00)	0.00	(3,042,424,500.00)	-
98	Beban Barang yang Akan Dijual kepada Masyarakat	0.00	177,500,000.00	(177,500,000.00)	-
99	Beban Beasiswa Tugas Belajar S1	620,456,150.00	373,310,000.00	247,146,150.00	66.20
100	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	356,000,000.00	130,925,246.00	225,074,754.00	171.91
101	Beban Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan	683,222,000.00	2,395,416,166.00	(1,712,194,166.00)	(71.48)
102	Beban Sosialisasi	0.00	25,200,000.00	(25,200,000.00)	(100.00)
103	Beban Bimbingan Teknis	655,959,299.00	3,299,478,650.00	(2,643,519,351.00)	(80.12)
104	Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - LO	71,713,206,610.00	64,906,570,800.00	6,806,635,810.00	10.49
105	Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - LO	554,130,000.00	560,716,600.00	(6,586,600.00)	(1.17)
106	Beban Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap - LO	56,596,751,900.00	49,427,550,900.00	7,169,201,000.00	14.50
107	Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	69,150,000.00	142,500,000.00	(73,350,000.00)	(51.47)



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

108	Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat	4,036,040,000.00	931,525,000.00	3,104,515,000.00	333.27
109	Beban Barang Jasa BLUD	35,845,379,654.00	34,683,062,437.00	1,162,317,217.00	3.35
110	Beban Beasiswa Untuk Pendidikan Menengah - LO	0.00	10,000,000.00	(10,000,000.00)	(100.00)
111	Beban Beasiswa Untuk Pendidikan Tinggi - LO	0.00	695,000,000.00	(695,000,000.00)	(100.00)
112	Beban Pemeliharaan Kesehatan	18,981,000.00	6,857,700.00	12,123,300.00	176.78
	JUMLAH	467.295.836.305,59	506.142.431.098,43	(38.846.594.792,84)	(7.68)

Beban hibah (LO) disajikan sebesar Rp43.526.985.792,00 sedangkan belanja hibah (LRA) disajikan sebesar Rp33.669.823.942,00 atau terdapat selisih sebesar Rp9.857.161.850,00. Perbedaan tersebut disebabkan adanya barang yang belum diserahkan kepada masyarakat dengan rincian:

a. Dinas Perikanan	Rp9.659.011.850,00
b. Dinas Ketahanan Pangan	Rp180.000.000,00
c. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura & Peternakan	<u>Rp18.150.000,00</u> +
Jumlah	Rp9.857.161.850,00

Beban Bantuan Sosial (LO) disajikan sebesar Rp860.000.000,00 sama dengan Belanja Hibah (LRA)

Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp209.017.906.732,38 merupakan beban penyusutan aset tetap dan beban amortisasi aset tak berwujud masing-masing sebesar Rp203.402.031.384,83 dan Rp5.615.875.347,55. Beban Penyusutan aset tetap terdiri dari:

a. Beban penyusutan peralatan dan mesin	Rp40.820.498.687,83
b. Beban penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp32.278.613.709,00
c. Beban penyusutan jalan Irigasi dan Jaringan	<u>Rp130.302.918.988,00</u> +
Jumlah	Rp203.402.031.384,83

Beban penyisihan piutang disajikan sebesar Rp344.421.579,27 terdiri dari:

a. Beban penyisihan piutang pajak	Rp 6.455.755,98
b. Beban penyisihan piutang retribusi	Rp 28.990.487,75
c. Beban penyisihan piutang lain-lain PAD	Rp111.475.335,54
d. Beban penyisihan piutang lainnya	<u>Rp197.500.000,00</u> +
Jumlah	Rp344.421.579,27

Beban lain-lain disajikan sebesar Rp6.568.270.958,31 adalah beban penurunan investasi dari Kerugian PDAM TA 2018.

7.5.4.2.2 BebanTransfer

Jumlah Beban Transfer tahun 2018 sebesar Rp212.030.314.761,00 dan tahun 2017 sebesar Rp274.157.419.718,00 terdiri dari:

Tabel Realisasi BebanTransfer Tahun 2018 - 2017

No	Beban Transfer	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
----	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------	---



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak	812.493.000,00	3.249.972.000,00	(2.437.479.000,00)	(75,00)
3	Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi	524.999.959,00	2.100.000.000,00	(1.575.000.041,00)	(75,00)
2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	65.043.472.435,00	115.290.278.351,00	(50.246.805.916,00)	(43,58)
4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	144.947.050.000,00	152.814.870.000,00	(7.867.820.000,00)	(5,15)
5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	702.299.367,00	702.299.367,00	0,00	0,00
	Jumlah	212.030.314.761,00	274.157.419.718,00	(62.127.104.957,00)	(75,00)

Beban transfer bagi hasil pajak (LO) disajikan sebesar Rp812.493.000,00 sama dengan belanja transfer bagi hasil pajak yang disajikan (LRA).

Beban transfer bagi hasil retribusi (LO) disajikan sebesar Rp524.999.959,00 sama dengan belanja transfer bagi hasil retribusi yang disajikan (LRA).

Beban Transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya (LO) disajikan sebesar Rp65.043.472.435,00 sama dengan belanja Transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya yang disajikan (LRA).

Beban transfer bantuan keuangan ke desa (LO) disajikan sebesar Rp144.947.050.000,00 sama dengan belanja transfer bantuan keuangan ke desa yang disajikan (LRA)

Beban transfer bantuan keuangan lainnya sebesar Rp702.299.367,00 merupakan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang disajikan sama sebesar belanja transfer bantuan keuangan lainnya dalam LRA.

7.5.4.2.3 Surplus/Defisit Non Operasional

Surplus/Defisit Non Operasional tahun 2018 nihil.

7.5.4.2.4 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa merupakan rekening yang menampung peristiwa atau kejadian luar biasa tahun 2018 yang mempunyai karakteristik kejadiannya tidak normal dan jarang terjadi serta di luar kendali entitas pemerintah daerah.

Beban luar biasa pada LO tahun 2018 disajikan sebesar Rp270.759.948,00 merupakan Pengembalian atas kelebihan penerimaan PBB dari PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Batulicin atas setoran dari Desa Bangkalan Dayak karena terjadi kesalahan pelimpahan setoran PBB sebesar Rp6.222.948,00 melalui akun Belanja tidak terduga dengan Nomor SP2D 1151/SP2D/LS/01/PPKD/2018 tanggal 30 April 2018 dan Penyelesaian Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Di Desa Bangkalan Melayu Kec.Kelumpang Hulu Kab.Kotabaru Tahun 2017 PT.Sinar Mas Agro Resources and Technology,Tbk berdasarkan SP2D Nomor 4139/SP2D/LS/01/PPKD/2018 tanggal 3 September 2018 sebesar Rp264.537.000,00.

7.5.4.3 Surplus/Defisit – LO



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

Surplus/ defisit pada Laporan Operasional tahun 2018 dan 2017 sebesar Rp39.938.868.047,20 dan (Rp92.680.861.233,74)

7.5.5 LAPORAN ARUS KAS

Komponen-komponen Arus Kas :

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
7.5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi	236.214.102.783,56	42.382.631.972,76

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp236.214.102.783,56 dan Rp42.382.631.972,76. Arus kas bersih dari aktivitas operasi TA 2018 meningkat sebesar Rp193.831.470.810,80 atau 457,34% dari TA 2017. Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan selisih dari arus masuk kas dan arus keluar kas yang terdiri dari:

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
Arus Masuk Kas		
Pendapatan Pajak Daerah	63.436.269.358,00	42.873.306.434,00
Pendapatan Retribusi Daerah	5.070.872.606,00	4.879.064.948,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.609.153.948,00	11.041.338.802,00
Lain-Lain PAD Yang Sah	50.660.799.453,26	59.058.674.178,74
Dana Bagi Hasil Pajak	49.189.299.562,00	58.112.914.380,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	174.922.522.213,00	156.124.882.485,00
Dana Alokasi umum	612.929.409.000,00	597.207.951.000,00
Dana Alokasi Khusus	167.498.841.495,00	139.811.925.930,00
Dana Alokasi Khusus Reboisasi	0,00	0,00
Dana Otonomi Khusus/Dana Penyesuaian	144.947.050.000,00	160.077.727.200,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	113.499.696.290,00	99.965.272.979,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00
Pendapatan Hibah	43.688.329.910,00	49.302.224.956,00
Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi	1.438.452.243.835,26	1.378.455.283.292,74
Belanja Pegawai	478.150.269.130,00	467.891.658.224,00
Belanja Barang Jasa	477.256.973.270,70	502.102.023.515,60
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	33.669.823.942,00	90.021.549.862,38
Belanja Bantuan Sosial	860.000.000,00	1.900.000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan (Transfer Bantuan Keuangan)	210.692.821.802,00	268.807.447.718,00
Belanja Tak Terduga	270.759.948,00	0,00
Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa (Bagi Hasil Pajak)	812.493.000,00	3.249.972.000,00
Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa (Bagi Hasil Retribusi)	0,00	0,00
Belanja Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	524.999.959,00	2.100.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi	1.202.238.141.051,70	1.336.072.651.319,98
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	236.214.102.783,56	42.382.631.972,76



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
7.5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(246.979.055.602,00)	(272.006.030.268,00)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi TA 2018 dan 2017 masing-masing sebesar (Rp246.979.055.602,00) dan (Rp272.006.030.268,00). Arus Kas Bersih dari Investasi TA 2018 meningkat sebesar Rp25.026.974.666,00 atau 9,20% dari TA 2017. Arus kas bersih aktivitas investasi merupakan selisih dari arus masuk kas dan arus keluar kas dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
Arus Masuk Kas		
Pendapatan Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Pendapatan Penjualan Atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya	92.100.000,00	54.150.000,00
	0,00	,00
Jumlah Arus Masuk Kas	92.100.000,00	54.150.000,00
Arus Keluar Kas		
Belanja Tanah	3.698.615.090,00	5.560.393.576,00
Belanja Peralatan dan Mesin	47.460.710.276,00	38.261.883.371,00
Belanja Gedung dan Bangunan	56.604.535.798,00	78.051.649.553,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	123.073.464.474,00	128.559.784.579,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	6.939.660.447,00	10.274.826.351,00
Belanja Aset Lainnya	1.336.327.000,00	1.377.470.000,00
Belanja Modal BLUD	1.957.842.517,00	1.974.172.838,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	6.000.000.000,00	8.000.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas	247.071.155.602,00	272.060.180.268,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(246.979.055.602,00)	(272.006.030.268,00)

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
7.5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	402.358.500,00	(635.975.000,00)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan TA 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp402.358.500,00 dan (Rp635.975.000,00). Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan TA 2018 naik sebesar Rp1.038.333.500,00 atau 163,27% dari TA 2017. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan merupakan selisih dari arus masuk kas dan arus keluar kas dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
Arus Masuk Kas		
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	1.727.358.500,00	1.084.025.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas	1.727.358.500,00	1.084.025.000,00
Arus Keluar Kas		
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Pemda Lainnya (Dana Talangan kepada Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan)	1.325.000.000,00	1.720.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas	1.325.000.000,00	1.720.000.000,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	402.358.500,00	(635.975.000,00)

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
7.5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	(2.470.387.869,00)	2.621.792.854,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris TA 2018 dan 2017 masing-masing sebesar (Rp2.470.387.869,00) dan Rp2.621.792.854,00. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris merupakan selisih dari arus kas masuk dan arus kas keluar dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	66.019.354.146,00	73.816.350.311,00
Penerimaan Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Tahun Lalu	104.740.679,00	1.800.000,00
Penerimaan Saldo UP/TU Tahun Lalu	280.097.500,00	30.000.000,00
Penerimaan Saldo UP/TU Tahun Berjalan	0,00	4.661.515.564,00
Kontra Pos (Pengembalian belanja LS/GU tahun berjalan)	0,00	0,00
Sisa Kas di Bendahara Penerimaan yang disetor ke Tahun Anggaran Berikutnya	14.864.306,00	0,00
Sisa Kas di Bendahara Penerimaan yang disetor ke Tahun Anggaran Berikutnya	177.915.413,00	0,00
Kelebihan Debet oleh Bank	52.680.212,00	0,00
Pertanggungjawaban SP2D UP/TU (SP2D GU/TU Nihil)	0,00	37.896.437.623,00
Jumlah Arus Masuk Kas	66.649.652.256,00	116.406.103.498,00
Arus Keluar Kas		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	69.120.040.125,00	70.715.664.332,00
Penempatan UP/TU pada Bendahara Pengeluaran	0,00	43.015.966.100,00
Transfer Keluar pada Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kelebihan Setor Pajak Pusat	0,00	0,00
Kelebihan Debet oleh Bank	0,00	52.680.212,00
Jumlah Arus Keluar Kas	69.120.040.125,00	113.784.310.644,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(2.470.387.869,00)	2.621.792.854,00



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
7.5.5.5 Kenaikan/Penurunan Kas	(12.832.982.187,44)	(227.637.580.441,24)

Kenaikan/penurunan kas TA 2018 dan 2017 masing-masing sebesar (Rp12.832.982.187,44) dan (Rp227.637.580.441,24). Terdapat penurunan sebesar Rp214.804.598.253,80 atau 94,36%, dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Operasi	236.214.102.783,56	42.382.631.972,76
Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(246.979.055.602,00)	(272.006.030.268,00)
Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	402.358.500,00	(635.975.000,00)
Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	(2.470.387.869,00)	2.621.792.854,00
Kenaikan/Penurunan Kas	(12.832.982.187,44)	(227.637.580.441,24)

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
7.5.5.6 Saldo Awal Kas di BUD, BLUD, dan FKTP	23.211.168.492,26	250.848.748.933,50

Saldo awal kas di BUD, FKTP, dan BLUD per 31 Desember 2018 terdiri dari:

- Saldo awal di BUD sebesar Rp1.237.264.619,87
Merupakan saldo kas di rekening kas daerah per 1 Januari 2018, sedangkan saldo awal BUD per 1 Januari 2017 adalah sebesar Rp235.390.491.212,51
- Saldo awal BLUD sebesar Rp14.991.703.349,09
Merupakan saldo kas di rekening kas BLUD per 1 Januari 2018, sedangkan saldo awal BLUD per 1 Januari 2017 adalah sebesar Rp11.909.314.193,09
- Saldo Awal kas di FKTP sebesar Rp3.194.557.983,30
Merupakan saldo kas dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di rekening puskesmas per 1 Januari 2018. Sedangkan saldo di FKTP Per 1 Januari 2017 sebesar Rp3.548.943.527,90
- Saldo Awal kas di Bendahara Bos sebesar Rp3.787.642.540,00

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
7.5.5.7 Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD, FKTP dan BOS	10.378.186.304,82	23.211.168.492,26

Saldo akhir kas di BUD, FKTP, BLUD dan BOS sebesar Rp10.378.186.304,82 terdiri dari:

- Saldo akhir per 31 Desember 2018 di BUD sebesar Rp3.369.986.702,41
Merupakan saldo kas di rekening kas daerah per 31 Desember 2018, sedangkan saldo akhir BUD per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp1.237.264.619,87
- Saldo akhir kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp14.864.306,00



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

- Saldo akhir kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp1000.000,00 namun msh ada sisa kas di bendahara pengeluaran Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air tahun 2017 yang belum disetor sebesar Rp177.915.403,00 sehingga masih melekat di dalam silpa
- Saldo akhir kas BLUD sebesar Rp616.547.906,81
Merupakan saldo kas yang berada di BLUD per 31 Desember 2018, sedangkan saldo akhir kas di BLUD per 31 Desember 2017 sebesar Rp14.991.703.349,09
- Saldo Akhir kas di FKTP sebesar Rp2.841.173.453,60
Merupakan saldo kas sisa dana FKTP yang berada di Puskesmas per 31 Desember 2018, sedangkan saldo akhir kas di FKTP per 31 Desember 2017 sebesar Rp3.194.557.983,30
- Saldo Akhir kas di Bendahara BOS sebesar Rp3.424.179.156,00
Merupakan saldo kas dibendahara BOS SD dan SMP per 31 Desember 2018, sedangkan saldo akhir kas di Bendahara Bos per 31 Desember 2017 sebesar Rp3.787.642.540,00
- Utang PFK sebesar (Rp67.480.633,00) yang telah disetor ke Kas Negara tanggal 13 Maret 2019.

Saldo akhir kas di BUD, BLUD, FKTP dan BOS per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp10.378.186.304,82 dan sebesar Rp23.211.168.492,26 atau menurun sebesar 12.832.982.187,44 atau 55,29% dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
Saldo Awal Kas di BUD, BLUD dan FKTP	23.211.168.492,26	250.848.748.933,50
Kenaikan/Penurunan Kas	(12.832.982.187,44)	(227.637.580.441,24)
Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD dan FKTP dan BOS	10.378.186.304,82	23.211.168.492,26

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
7.5.5.8 Saldo Akhir Kas	10.378.186.304,82	23.664.106.823,26

Saldo akhir kas TA 2018 sebesar Rp10.378.186.304,82 dan TA 2017 sebesar Rp23.664.106.823,26 merupakan saldo kas per 31 Desember 2018 dan 2017. Rincian saldo akhir kas TA 2018 dan 2017 sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
Saldo Akhir Kas di BUD	3.369.986.702,41	1.237.264.619,87
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	178.915.413,00	280.097.500,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	14.864.306,00	104.740.679,00
Saldo Akhir Kas di BLUD	616.547.906,81	14.991.703.349,09
Saldo Akhir Kas di FKTP	2.841.173.453,60	3.194.557.983,30
Saldo Akhir Kas Lain-lain	0,00	68.100.152,00
Saldo Kas di Bendahara Bos	3.424.179.156,00	3.787.642.540,00
Saldo Utang PFK	(67.480.633,00)	0,00
Saldo Akhir Kas	10.378.186.304,82	23.664.106.823,26

Saldo kas di Laporan Arus Kas tahun 2018 disajikan sama dengan Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp10.378.186.304,82.



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

7.5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

7.5.6.1 Ekuitas Awal	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
	2.818.065.551.771,22	2.932.998.020.139,58

Saldo ekuitas awal TA 2018 sebesar Rp2.818.065.551.771,22 merupakan saldo akhir ekuitas dari ekuitas tahun 2017 dan saldo ekuitas awal TA 2017 sebesar Rp2.932.998.020.139,58 merupakan saldo akhir dari ekuitas tahun sebelumnya.

7.5.6.2 Penambahan/Pengurangan Ekuitas dari Laporan Operasional	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
	39.938.868.047,20	(92.680.861.233,74)

Penambahan/pengurangan Ekuitas bersumber dari Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp39.938.868.047,20 dan sebesar (Rp92.680.861.233,74).

7.5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Koreksi Nilai Persediaan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Pada TA 2018 tidak ada koreksi nilai persediaan.

b. Selisih Revaluasi Aset Tetap	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Pada TA 2018 dan TA 2017 masing-masing tidak terdapat selisih revaluasi aset tetap.

c. Koreksi Ekuitas Lainnya	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
	23.047.202.363,04	(22.251.607.134,62)

Koreksi ekuitas lainnya TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar Rp23.047.202.363,04 dan (Rp22.251.607.134,62) terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

1) Koreksi saldo awal kas	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
	(68.100.152,00)	(20.064.534,00)

Koreksi saldo awal kas TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar (Rp68.100.152,00) dan (Rp20.064.534,00). Koreksi saldo awal TA 2017 adalah koreksi atas saldo awal kas lain-lain yang merupakan saldo awal kas dari dana Sisa Kas BOS Pendamping yang ada di SD dan SMP yang sudah disetor ditahun 2018.

2) Koreksi saldo awal investasi	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
	35.911.127.997,68	(1.981.681.547,49)

Koreksi saldo awal investasi TA 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp35.911.127.997,68 dan (Rp1.981.681.547,49). Koreksi karena Penyesuaian Penambahan akibat koreksi rugi dan koreksi saldo penyertaan modal tahun 2017 sesuai Laporan Keuangan audited pada PDAM Kab. KotabaruTA 2018 dengan rincian sebagai berikut :

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
- Kurang catat saldo penyertaan modal pada PDAM Kotabaru	35.911.127.997,68	(1.981.681.547,49)
Jumlah	35.911.127.997,68	(1.981.681.547,49)

3) Koreksi piutang	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
	376.953.799,00	212.500,00

Koreksi piutang TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar Rp376.953.799,00 dan sebesar Rp212.500,00. Koreksi TA 2018 dengan rincian sebagai berikut :

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
- Koreksi kurang catat piutang LUEP	(15.000.000,00)	0,00
- Koreksi pelunasan Piutang Retribusi Rumah Dinas	360.000,00	0,00
- Koreksi kurang catat Piutang Denda Retribusi Pasar	(1,00)	0,00
- Koreksi Pelunasan Piutang Lain-lain PAD yang sah	172.800,00	0,00
- Koreksi pelunasan denda Piutang Lainnya (LUEP)	421.000,00	212.500,00
- Koreksi Pelunasan Piutang LUEP	391.000.000,00	0,00
Jumlah	376.953.799,00	212.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

4) Koreksi penyisihan piutang	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
	232.459.979,21	38.117.387.064,04

Koreksi penyisihan piutang TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar Rp232.459.979,21 dan sebesar Rp38.117.387.064,04 dengan rincian sebagai berikut :

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
- Koreksi penyisihan piutang pajak	(1.490.351.287,17)	1.482.764.057,46
- Koreksi penyisihan piutang retribusi	54.552.278,00	0,00
- Koreksi penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
- Koreksi Pencatatan Penyisihan Piutang TP/TGR	0,00	2.489.426.500
- Koreksi kurang catat penyisihan piutang lain-lain PAD	1.274.060.862,92	34.145.196.506,58
- Koreksi penyisihan piutang lainnya	394.198.125,46	0,00
Jumlah	232.459.979,21	38.117.387.064,04

5) Koreksi aset tetap	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
	(12.869.211.637,66)	(76.695.001.312,47)

Koreksi aset tetap TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar (Rp12.869.211.637,66) dan sebesar (Rp76.695.001.312,47) dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
- Koreksi kurang catat aset tetap	36.263.041.847,50	0,00
- Koreksi lebih catat aset tetap	(49.132.253.485,16)	(76.695.001.312,47)
Jumlah	(12.869.211.637,66)	(76.695.001.312,47)

Koreksi terjadi karena reklasifikasi aset tetap yang kondisinya rusak berat ke aset lain-lain, aset yang berasal dari hasil sensus dan penghapusan.

6) Koreksi penyusutan aset tetap	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
	140.765.961,00	283.821.729,00

Koreksi penyusutan aset tetap TA 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp140.765.961,00 dan Rp283.821.729,00. Koreksi terjadi karena lebih catat atas kendaraan bermotor roda dua sebesar Rp13.000.000,00, lebih catat atas kendaraan bermotor roda empat yang sudah dimutasi ke RSUD sebesar Rp153.843.272,00 dan koreksi kurang catat atas akumulasi penyusutan aset peralatan mesin yang telah direklasifikasi ke aset lain-lain sebesar Rp25.920.000,00 dan koreksi atas aset peralatan mesin yang



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

direklasifikasi ke Jalan, irigasi dan Jaringan pada BLUD sebesar Rp157.311,00.

Akumulasi penyusutan menggambarkan penurunan nilai ekonomis dari aset tetap yang dipergunakan dalam aktivitas penyelenggaraan pemerintahan.

7) Koreksi amortisasi aset tak berwujud	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
	499.279.008,48	292.424.000,00

Koreksi amortisasi aset tak berwujud TA 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp499.279.008,48 dan Rp292.424.000,00. Akumulasi amortisasi menggambarkan penurunan nilai ekonomis dari aset tak berwujud yang dipergunakan dalam aktivitas penyelenggaraan pemerintahan.

8) Koreksi aset lainnya	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
	(1.137.405.092,67)	4.645.443.027,30

Koreksi aset lainnya TA 2018 dan 2017 masing-masing sebesar (Rp1.137.405.092,67) dan sebesar Rp4.645.443.027,30 dengan rincian sebagai berikut :

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
- Koreksi kurang catat aset lainnya	(2.026.841.451,15)	(88.218.750,00)
- Koreksi lebih catat aset lainnya	889.436.358,48	4.733.661.777,30
Jumlah	(1.137.405.092,67)	4.645.443.027,30

Koreksi kurang catat aset lainnya TA 2018 dan 2017 masing-masing sebesar (Rp1.137.405.092,67) dan Rp4.645.443.027,30. Merupakan pencatatan kembali aset lain-lain berupa aset tetap yang dalam kondisi rusak berat dan telah diusulkan untuk dihapus, namun sampai dengan tanggal neraca belum terdapat SK Penghapusannya

9) Koreksi Persediaan	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
	(70.000.000,00)	0,00

Koreksi persediaan sebesar TA 2018 dan 2017 masing-masing sebesar (Rp70.000.000,00) dan Rp0,00 merupakan koreksi atas persediaan barang yang diserahkan kepada masyarakat tahun 2017 pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan.



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

10) Koreksi Kewajiban	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
	31.332.500,00	13.105.851.939,00

Koreksi Kewajiban TA 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp31.332.500,00. dan sebesar Rp13.105.851.939,00 dengan rincian sebagai berikut :

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
- Koreksi kurang catat kewajiban	31.332.500,00	0,00
- Koreksi lebih catat kewajiban	0,00	13.105.851.939,00
Jumlah	31.332.500,00	13.105.851.939,00

Koreksi kurang catat kewajiban pada Dinas Kesehatan atas Utang Jasa Pelayanan yang telah dilakukan pelunasan pada tahun 2017.

7.5.6.4 Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp2.881.051.622.181,46 dan sebesar Rp2.818.065.551.771,22 menggambarkan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang terdiri dari saldo aset dikurangi dengan kewajiban yaitu:

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
- Saldo Aset	2.917.544.725.762,46	2.857.955.085.510,69
- Saldo Kewajiban	(36.493.103.581,00)	(39.889.533.739,47)
Jumlah	2.881.051.622.181,46	2.818.065.551.771,22

7.6 Penyerahan Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) dalam Rangka Pelimpahan Urusan dari Pemerintah Kabupaten Kotabaru kepada Pemerintah Provinsi

Menindaklanjuti UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 12/5935/SJ tanggal 16 Oktober 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengalihan Urusan Berdasarkan Undang-Undang tersebut, dimana urusan yang dialihkan dari Pemerintah Kabupaten Kotabaru kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meliputi enam urusan yaitu pendidikan, kehutanan, pertambangan, ketenagakerjaan, perhubungan, serta perikanan dan kelautan, Pemerintah Kabupaten Kotabaru telah melaksanakan serah terima P3D dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan BAST Nomor 01 Tahun 2016 dan 42 Tahun 2016 tanggal 30 September 2016.



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

Aset yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan SK Bupati Nomor 188.45/640/KUM/2017 telah dihapus seluruhnya dan diserahkan ke Provinsi. Sedangkan penghapusan aset berdasarkan usulan SKPD dengan Nomor SK 188.45/627/KUM/2017 telah dilakukan verifikasi dan validasi.

Tahun 2018 dilakukan penyerahan Aset P3D yang masih ada tercatat di Neraca Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Personel dan sarana prasarana dari Pemerintah Kabupaten Kotabaru kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan selatan Nomor 7 tahun 2018 dengan nilai aset sebesar Rp2.636.735.556,00 terdiri dari Urusan perhubungan sebesar Rp29.480.640,00 dan urusan pendidikan sebesar Rp2.607.254.916,00 merupakan penyerahan tahap 2 sebagai lanjutan penyerahan P3D tahap 1 Tanggal 28 Desember 2017. Sehingga semua aset yang menjadi urusan P3D setelah diserahkan wewenanganya kepada pemerintah provinsi Kalimantan Selatan.



PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (stakeholder) guna meningkatkan good governance.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotabaru TA 2018 disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 53 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru dan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 54 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru.

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun dengan mengungkapkan beberapa penjelasan terhadap Laporan Keuangan secara keseluruhan, sehingga diharapkan dapat dengan mudah dibaca dan dipahami oleh pengguna laporan dan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun hanya untuk manajemen entitas pelaporan.

Semoga dengan tersusunnya Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat memberikan penjelasan dan informasi yang berguna sebagai media pertanggungjawaban serta sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kotabaru.

BUPATI KOTABARU,



H. SAYED JAFAR